KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BALIKPAPAN
JALAN KOLONEL SYARIFUDDIN YOES RT.041 NOMOR 10 BALIKPAPAN 76114
TELEPON (0542) 7581284
LAMAN www.kkp.go.id, SUREL bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id

Yth. Sekretaris BPPMHKP
Gedung Mina Bahari II Lantai 6
Jalan Medan Merdeka Timur No.16
Jakarta 10110

22 Juli 2026

SURAT PENGANTAR
Nomor : B.837/BPPMHKP.BPN/TU.140/VII/2026

No.	Jenis Naskah Dinas yang dikirim	Jumlah	Keterangan
1.	Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II TA 2026	Satu Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterima tanggal Juli 2026

Penerima
……..,

(…….)
Nomor Telepon

Pengirim
Kepala Balai KIPM Balikpapan,

Ditandatangani
Secara Elektronik

Arsal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

BALAI PPMHKP BALIKPAPAN

TRIWULAN II TAHUN 2026

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKJ) Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Balai PPMHKP) Balikpapan Triwulan II Tahun 2026 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Balai PPMHKP Balikpapan dalam penggunaan anggaran yang akuntabel untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Laporan ini menguraikan informasi terkait pencapaian kinerja, kendala dan upaya harus dilakukan dalam rangka pencapaian target Triwulan II Tahun 2026.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Balai PPMHKP Balikpapan Tahun 2026. Secara umum target indikator kinerja yang ditetapkan pada periode Triwulan II Tahun 2026 telah dicapai sesuai target yang ditetapkan. Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja Balai PPMHKP Balikpapan di masa mendatang.

Ungkapan terimakasih kepada seluruh pihak dan jajaran pegawai Balai PPMHKP Balikpapan yang telah membantu dan mendukung pencapaian kinerja Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan II Tahun 2026.

Kami menyadari laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu saran, tanggapan maupun masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan kedepannya.

Balikpapan, 17 Juli 2026
Plh. Kepala Balai PPMHKP Balikpapan

Frederica Ethis Maharani

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1.3 STRATEGI ORGANISASI

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 VISI DAN MISI

2.2 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

2.3 PENGUKURAN KINERJA

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

3.2 ANALISIS DAN EVALUASI

3.3 REALISASI ANGGARAN

BAB IV. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

4.2 REKOMENDASI

LAMPIRAN

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Tabel 2. Target Indikator Kinerja Kegiatan Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan II Tahun 2026

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan II Tahun 2026

Tabel 4. Capaian Sasaran Kegiatan 1 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan II Tahun 2026

Tabel 5. Capaian Sasaran Kegiatan 2 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan II Tahun 2026

Tabel 6. Capaian Sasaran Kegiatan 3 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan Triwulan II Tahun 2026

Tabel 7. Nilai Persepsi, Nilai Interval SKM, Nilai Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Tabel 8. Nilai Rata-rata (NRR) Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Tabel 9. Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan II Triwulan II Tahun 2026

Tabel 10. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan Triwulan II Triwulan II Tahun 2026

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai PPMHKP Balikpapan

Gambar 2. Struktur Tim Kerja Balai PPMHKP Balikpapan

Gambar 3. Peta Strategis Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan II Tahun 2026

Gambar 4. Dasboard Capaian IK dan IKU Pada Sistem Aplikasi Kinerjaku

Gambar 5. Sertifikasi CPIB di Kapal

Gambar 6. Koordinasi Antar Instansi Terkait Guna Percepatan Sertifikasi

Gambar 7. Kegiatan Inspeksi Penerapan HACCP di Unit Pengolahan Ikan PT. Ocean Paradise Fishery

Gambar 8. Kegiatan Inspeksi Penerapan HACCP di Unit Pengolahan Ikan PT. Atlas Agung Abadi

Gambar 9. Tangkap Layar Kegiatan Surveilen Penerapan HACCP di UPI Pada Website HONEST

Gambar 10. Kegiatan Inspeksi Penerapan Kelayakan Dasar (SKP) di UMKM Secara *Online* (*Remote Inspection*)

Gambar 11. Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI), Bimbingan Teknis Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) dan Penyusunan Panduan CDIB Secara Daring dan Luring

Gambar 12. Peningkatan Kompetensi Pegawai Dengan Mengikuti Kegiatan Bimtek Secara Online

Gambar 13. Kegiatan Apel Pagi dan Pengarahan Rutin Dari Pimpinan

Gambar 14. Tangkap Layar Aplikasi SIDAK Triwulan II Triwulan II Tahun 2026

Gambar 15. Capaian Nilai IKPA Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan II Tahun 2026

Gambar 16. Tangkap Layar Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 17. Tangkap Layar Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan II Triwulan II Tahun 2026 Pada Website https://ptsp.kkp.go.id/skm/

Gambar 18. Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP)

Gambar 19. Kegiatan *Morning Briefing* Secara Rutin

Gambar 20. Pendampingan Secara Langsung Pada Pengguna Layanan

Gambar 21. Publikasi Standar Layanan

Gambar 22. Tangkap Layar Realisasi Anggaran Sampai Dengan Triwulan II Pada Website https://spanint.kemenkeu.go.id/

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan II Tahun 2026 mencerminkan hasil pencapaian selama periode tersebut. Penilaian atas tingkat keberhasilan pencapaian sasaran kinerja Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan II Tahun 2026 diukur dengan membandingkan target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja pada tiap perspektif yang relevan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Balai PPMHKP Balikpapan Tahun 2026 untuk mencapai kondisi yang diinginkan sebagai suatu *outcome / impact* dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk kegiatan Balai PPMHKP Balikpapan selama Tahun 2026.

Pada Tahun 2026 Balai PPMHKP Balikpapan mempunyai 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2026. Pengukuran atas pencapaian kinerja dilakukan secara triwulanan, semester dan tahunan. Pencapaian atas target indikator kinerja menjadi Nilai Kinerja Organisasi (NKO), Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan pada periode Triwulan II Tahun 2026 adalah sebesar 111.91 % dengan kategori istimewa, nilai capaian Triwulan II Tahun 2026 lebih rendah dari nilai capaian Triwulan II tahun 2025 sebesar 114.36 %.

Penurunan nilai capaian ini disebabkan karena perbedaan jumlah parameter IKU yang dinilai, terdapat 2 parameter IKU di triwulan II tahun 2025 yang sudah tidak dinilai pada tahun 2026 yaitu IKU rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor dan IKU persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas serta perbedaan cara perhitungan capaian IKU Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan dan IKU Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan di tahun 2025 dan di 2026 dimana pada tahun 2025 capaian IKU dihitung pada pencapaian unit usaha yang disertifikasi pada sektor produksi primer (6 sertifikasi) dan pasca panen (3 sertifikasi). Sedangkan di tahun 2026 capaian IKU dihitung dari efektifitas pelaksanaan kegiatan pengendalian mutu dan pengawasan mutu pada sektor produksi primer dan pasca panen.

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Secara keseluruhan capaian indikator kinerja kegiatan Balai PPMHKP Balikpapan pada periode Triwulan II Tahun 2026 sudah tercapai dengan baik. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja 11 Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan pada Triwulan II Tahun 2026, terdapat 7 Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori pencapaian memenuhi atau melebihi target dan 4 Indikator Kinerja yang belum memiliki realisasi pada Triwulan II, karena target pencapaian dilakukan per tahun.

Uraian Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori pencapaian memenuhi atau melebihi target adalah sebagai berikut :

1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan
2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan
3. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai PPMHKP Balikpapan
4. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai PPMHKP Balikpapan
5. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai PPMHKP Balikpapan
6. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Balai PPMHKP Balikpapan
7. Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup Balai PPMHKP Balikpapan

Uraian Indikator Kinerja Kegiatan yang belum memiliki nilai capaian pada Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Persentase implementasi metode terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan lingkup Balai KIPM Balikpapan
2. Nilai pembangunan Integritas lingkup Balai PPMHKP Balikpapan
3. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai PPMHKP Balikpapan
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Balai PPMHKP Balikpapan

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan secara lengkap dapat diliat pada Tabel 1. Dengan Nilai Capaian Kinerja Organisasi sebesar 111.91 % berdasarkan data dari website https://kinerjaku.kkp.go.id/

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2026	Target JUNI	Capaian JUNI	%	Target s/d JUNI	Capaian s/d JUNI	%	Kategori
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu keamanan hasil kelautan perikanan						109,12			109,12		
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan Data Dukung1	Persen (%)	Maximize	Nilai Posisi Akhir	72	72	74,2	103,06	72	74,2	103,06	Baik
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan Data Dukung1	Persen (%)	Maximize	Nilai Posisi Akhir	72	72	82,92	115,17	72	82,92	115,17	Istimewa
Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar											
Persentase implementasi metode terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Persen (%)	Maximize	Nilai Posisi Akhir	72	0			0	0		
Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Balai PPMHKP Balikpapan						114,7			114,7		
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai PPMHKP Balikpapan Data Dukung1	Indeks	Maximize	Nilai Posisi Akhir	82,5	75	83,57	111,43	75	83,57	111,43	Istimewa
Nilai pembangunan integritas lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	77	0			0	0		
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86,2	0			0	0		
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai PPMHKP Balikpapan Data Dukung1	Persen (%)	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86	86	100	116,28	86	100	116,28	Istimewa
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai PPMHKP Balikpapan Data Dukung1	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	92,1	83	99,59	119,99	83	99,59	119,99	Istimewa
Nilai Kinerja Perencaan Anggaran (NKPA) lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	71,75	0			0	0		
Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Persen (%)	Maximize	Nilai Posisi Akhir	77	77	100	120	77	100	120	Istimewa
Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan Data Dukung1	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	89	89	94,11	105,74	89	94,11	105,74	Baik

Tabel 1. Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NKO) Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan II Tahun 2026

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KINERJA KEUANGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

Capaian Kinerja keuangan Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan II Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II telah terealisasi sebesar Rp. 2.713.061.117,- atau sebesar 49.36 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.495.927.000,-.

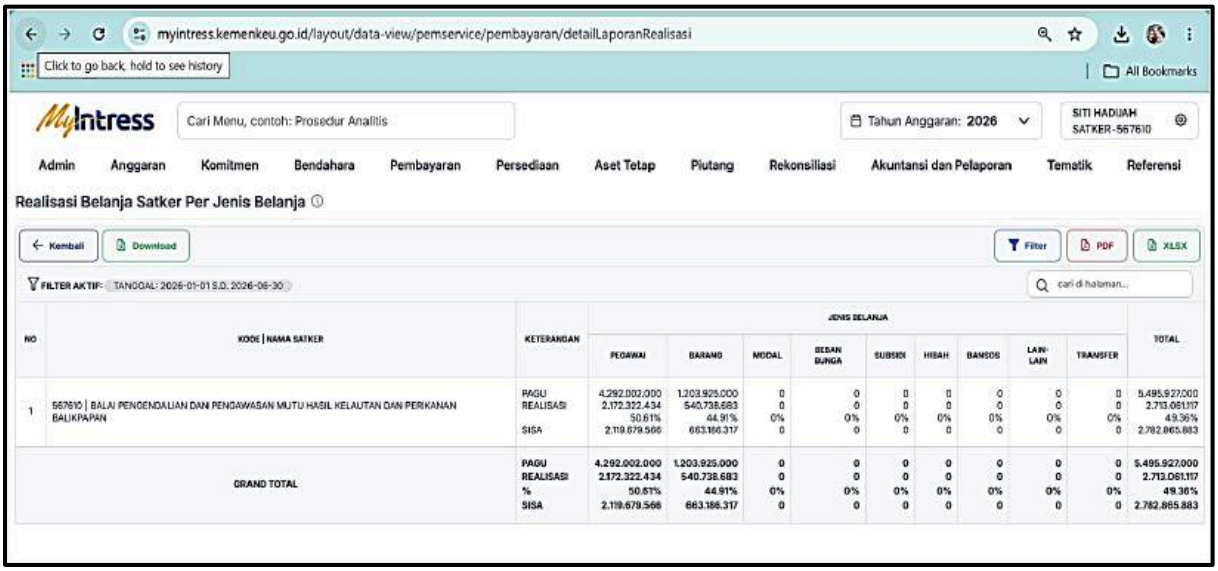

NO	KODE | NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA									TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAIN-LAIN	TRANSFER	
1	567610 | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BALIKPAPAN	PAGU	4.292.002.000	1.203.925.000	0	0	0	0	0	0	0	5.495.927.000
		REALISASI	2.172.322.434	540.738.683	0	0	0	0	0	0	0	2.713.061.117
			50.61%	44.91%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	49.36%
		SISA	2.119.679.566	663.186.317	0	0	0	0	0	0	0	2.782.865.883
GRAND TOTAL		PAGU	4.292.002.000	1.203.925.000	0	0	0	0	0	0	0	5.495.927.000
		REALISASI	2.172.322.434	540.738.683	0	0	0	0	0	0	0	2.713.061.117
		%	50.61%	44.91%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	49.36%
		SISA	2.119.679.566	663.186.317	0	0	0	0	0	0	0	2.782.865.883

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Balai PPMHKP Balikpapan merupakan salah satu UPT BPPMHKP - Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai PPMHKP Balikpapan dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelengara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai PPMHKP Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Triwulan II Tahun 2026 untuk mencapai visi dan misi Balai PPMHKP Balikpapan. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Balai PPMHKP Balikpapan serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Balai PPMHKP Balikpapan.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPMHKP mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Dalam melaksanakan tugasnya, UPT menyelenggarakan fungsi :

a) Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
b) Pelaksanaan inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut dan verifikasi penerbitan sertifikat pada unit penangkapan ikan, unit pembenihan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan, unit distribusi obat ikan, unit penanganan hasil kelautan dan perikanan, unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan dan unit distribusi hasil kelautan dan perikanan
c) Pelaksanaan surveilens, pengambilan dan pengujian contoh, dan pemeriksaan tindak lanjut hasil surveilens pada unit penangkapan ikan, unit pembenihan ikan, unit pembudidayaan ikan, unit produksi pakan ikan, unit produksi obat ikan, unit distribusi obat ikan, unit penanganan hasil kelautan dan perikanan, unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan dan unit distribusi hasil kelautan dan perikanan
d) Pelaksanaan penerbitan sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan
e) Pelaksanaan pemantauan kesegaran ikan, residu bahan berbahaya terhadap hasil kelautan dan perikanan serta racun hayati di perairan
f) Pelaksanaan pengelolaan dan penerapan sistem manajemen mutu pelayanan operasional, sistem manajemen mutu laboratorium dan sistem anajemen mutu lembaga inspeksi
g) Pelaksanaan kerja sama terkait layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

h) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi terkait pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan
i) Pelaksanaan pemmantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan operasional pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan dan
j) Pelaksanaan urusan ketatausahaan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPPMHKP, Kepala Balai PPMHKP Balikpapan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan kelompok Jabatan Fungsional. Jumlah SDM aparatur yang mendukung Balai PPMHKP Balikpapan sejumlah 18 pegawai (PNS) , 11 orang PPPK, 3 orang PPPK Paruh Waktu dan 1 orang PJLP. ASN di BKIPM Balikpapan terdiri dari 2 pegawai pejabat struktural, 2 pegawai fungsional umum, 9 pegawai fungsional inspektur mutu, 2 pegawai fungsional arsiparis, 3 pegawai fungsional keuangan, 1 pegawai fungsional BMN, 3 orang Pengelola Layanan Operasional, 4 orang Operator Layanan Operasional, 3 orang Penata Layanan Operasional dan 1 orang Pengadministrasi Perkantoran. Distribusi pegawai yang berimbang ini diperlukan dalam membentuk *workforce* yang efektif dan efisien.

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai PPMHKP Balikpapan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai PPMHKP Balikpapan Nomor B.85/BPPMHKP.BPN/KP.440/VI/2026 tanggal 22 Juni 2026, Balai PPMHKP dipimpin oleh Kepala Balai dan dibantu oleh 4 Ketua Tim Kerja yaitu Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Produksi Primer, Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Pengawasan Pasca Panen, Ketua Tim Kerja Manajemen Mutu dan Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial.

Gambar 2. Struktur Tim Kerja Balai PPMHKP Balikpapan

1.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ORGANISASI

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Balai PPMHKP Balikpapan disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan, serta diseleraskan dengan perkembangan lingkungan yang terjadi. Sejalan

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

dengan arah dan kebijakan BPPMHKP untuk mewujudkan organisasi dan dukungannya terhadap mandate yang diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian Kebijakan Ekonomi Biru dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan (prioritas).

Aspek strategis organisasi merupakan penjabaran lebih detail dari tujuan Balai PPMHKP Balikpapan dengan indikator dan target yang terukur. Aspek strategis tersebut dijabarkan melalui Sasaran Kegiatan Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan II Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Meningkatkan ekspor produk perikanan dengan pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan mulai dari hulu sampai hilir, sejak ikan ditangkap sampai di ekspor ke negara tujuan.

Penjaminan keberterimaan produk perikanan di Negara tujuan dilakukan melalui pemenuhan standar mutu dan keamanan dari sektor produksi primer dan sektor produksi pasca panen, pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI dan pemenuhan standar produk sesuai persyaratan negara tujuan, sehingga produk perikanan yang diekspor diterima di negara tujuan ekspor.

Sasaran Kegiatan 2 : Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar

Peningkatan ekspor hasil kelautan dan perikanan selain melalui pengendalian dan pengawasan mutu produk hasil kelautan dan perikanan, juga dilakukan melalui pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi.

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sasaran Kegiatan 3 : Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Balai PPMHKP Balikpapan

Melaksanakan pengelolaan organisasi yang bersih, efektif dan terpercaya melalui penyediaan data dan informasi yang baik, benar dan akurat, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia aparatur, kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan serta melakukan inovasi guna peningkatan kinerja dan mengevaluasi pelayanan kinerja melalui pelaksanaan survey kepuasan masyarakat.

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika dan penyajian LKj Triwulan II Tahun 2026 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku seperti dalam Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

a. Bab I – Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
b. Bab II – Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
c. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
d. Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasiserta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dan hal-hal lainnya

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI

Sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan visi dan misinya yaitu :

Visi : Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian berlandaskan gotong royong

Misi :

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 2 Triwulan II Tahun 2026, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, Balai PPMHKP Balikpapan sebagai UPT dari BPPMHKP menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) misi KKP dalam Renstra 2020-2026, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2026, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Balai PPMHKP Balikpapan sebagai UPT BPPMHKP turut bertanggungjawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu :

1. Meningkatnya konstribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan;

2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

2.2. SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yangl pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Gambar 3. Peta Strategis Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan II Tahun 2026

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Peta strategis, sasaran kegiatan dan indikator kinerja Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan II Tahun 2026 ditunjukan pada Gambar 3. dan Tabel 2.

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Triwulan II Tahun 2026
IKK. 1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	%	72
IKK. 2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	%	72
IKK. 3	Persentase implementasi metode terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	%	72
IKK. 4	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Indeks	82.5
IKK. 5	Nilai pembangunan integritas lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Nilai	77
IKK. 6	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Nilai	86.2
IKK. 7	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Persen	86
IKK. 8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Nilai	92.1
IKK. 9	Nilai Kinerja Perencaan Anggaran (NKPA) lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Nilai	71.75
IKK. 10	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Persen	77
IKK. 11	Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Nilai	3.5

Tabel 2. Target Indikator Kinerja Kegiatan Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan II Tahun 2026

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.3. PENGUKURAN KINERJA

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, akan diperoleh indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize.

Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah :

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut :

   a. Polarisasi Maximize

   Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi lebih tinggi dari target, dengan formula :

   Indeks Capaian IKU = Realisasi/Target x 100%

   b. Polarisasi Minimize

   Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula :

   Indeks Capaian IKU = {1 + (1 - Realisasi/Target)} x 100%

   c. Polarisasi Stabilize

   Pada jenis polarisasi ini, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :

BIRU	HIJAU	KUNING	MERAH	HITAM
110 - 120	**90 - < 110**	**70 - < 90**	**50 - < 70**	**< 50**
Istimewa	**Baik**	**Cukup**	**Kurang**	**Sangat Kurang**

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Secara umum target kinerja Balai PPMHKP Balikpapan pada Triwulan II Triwulan II Tahun 2026 telah tercapai, hal ini ditandai dengan Nilai Capaian Organisasi (NKO) sebesar 111.91 % dengan kategori istimewa, berdasarkan pelaporan melalui sistem aplikasi pengelolaan kinerja di https://kinerjaku.kkp.go.id

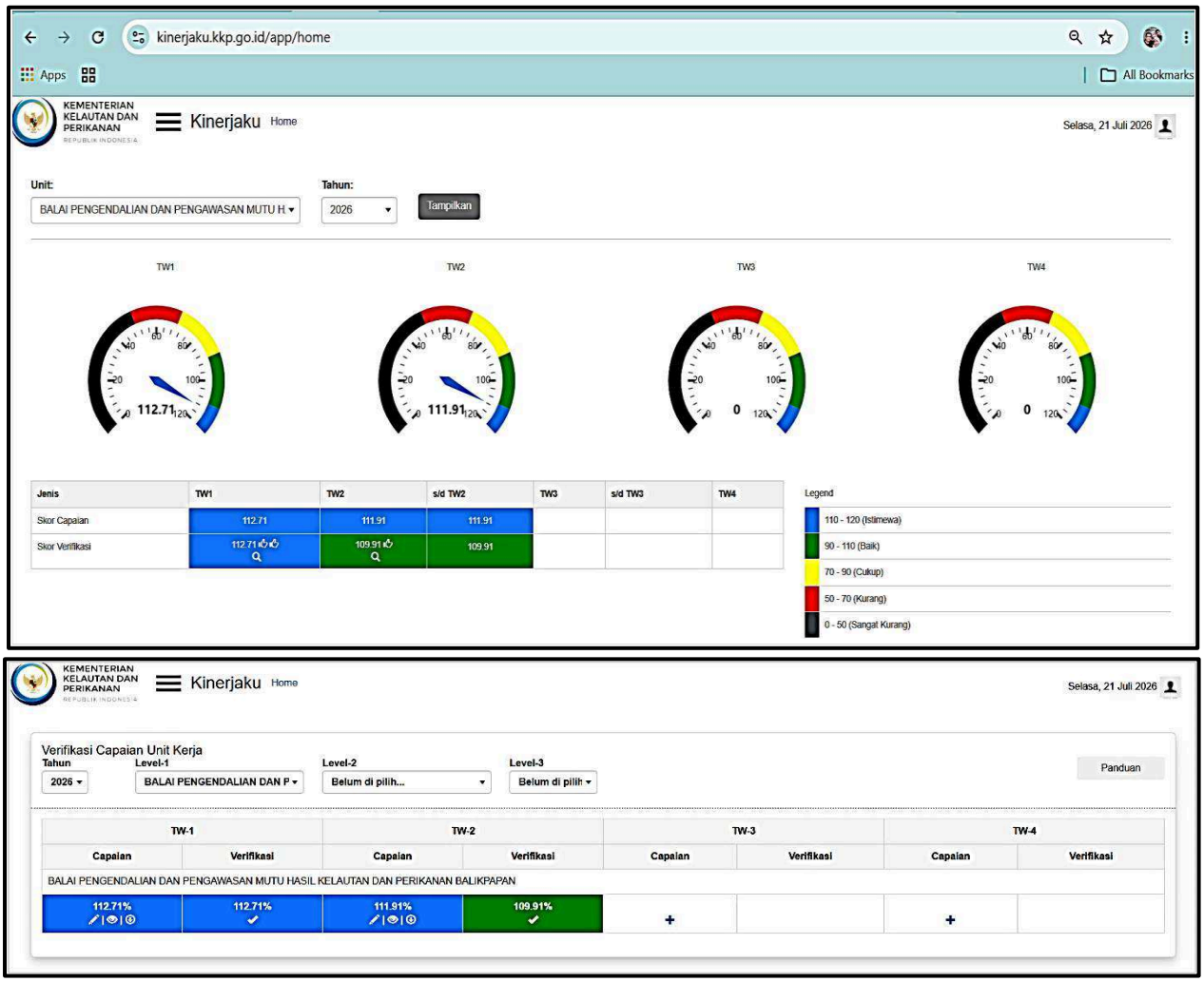

Gambar 4. Dasboard Capaian IK dan IKU pada Sistem Aplikasi Kinerjaku

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Nilai capaian kinerja merupakan gambaran nilai kinerja Balai PPMHKP Balikpapan secara keseluruhan. Nilai capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 sebesar 111.91 %, capaian ini lebih rendah dari capaian Nilai Kinerja Organisasi Triwulan II tahun 2025 yaitu sebesar 113,17 %. Penurunan nilai capaian ini disebabkan karena perbedaan jumlah parameter IKU yang dinilai, terdapat 2 parameter IKU di triwulan II tahun 2025 yang sudah tidak dinilai pada tahun 2026 yaitu IKU rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor dan IKU persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas serta perbedaan cara perhitungan capaian IKU Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan dan IKU Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan di tahun 2025 dan di 2026 dimana pada tahun 2025 capaian IKU dihitung pada pencapaian unit usaha yang disertifikasi pada sektor produksi primer (6 sertifikasi) dan pasca panen (3 sertifikasi). Sedangkan di tahun 2026 capaian IKU dihitung dari efektifitas pelaksanaan kegiatan pengendalian mutu dan pengawasan mutu pada sektor produksi primer dan pasca panen.

Rekapitulasi capaian kinerja Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan II Tahun 2026 secara keseluruhan, dapat dilihat pada Tabel 3.

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Triwulan II Tahun 2026			
			Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	%	Kategori
SK 1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan Perikanan						
IKK. 1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	%	72	74.2	103.06	Baik
IKK. 2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	%	72	82.92	115.15	Istimewa

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Triwulan II Tahun 2026			
			Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	%	Kategori
SK 2. Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar						
IKK. 3	Persentase implementasi metode terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	%	-	-	-	-
SK. 3. Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Balai PPMHKP Balikpapan						
IKK. 4	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Indeks	75	83.57	111.43	Istimewa
IKK. 5	Nilai pembangunan integritas lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Nilai	-	-	-	-
IKK. 6	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Nilai	-	-	-	-
IKK. 7	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Persen	86	100	116.28	Istimewa
IKK. 8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Nilai	83	99.59	119.99	Istimewa
IKK. 9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Nilai	-	-	-	-
IKK. 10	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Persen	77	100	120	Istimewa
IKK. 11	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	Indeks	89	94.11	105.74	Baik

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan II Tahun 2026

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3.2. ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja berdasarkan sasasan kegiatan secara lebih detil berdasarkan indikator kinerjanya serta dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra Balai KIPM Balikapapan, adalah sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1 : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan perikanan menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan II Tahun 2026. Nilai capaian kegiatan Balai PPMHKP Balikpapan untuk sasaran kegiatan 1 pada Triwulan II Tahun 2026 tersebut adalah 109.12 % dengan kategori baik.

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2026			Renstra 2026 - 2029		Kategori
		Realisasi TW. I	Target TW. I	Realisasi TW. I	(%)	Target	(%)	
SK 1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan								
IKK. 1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	100	72	74.2	103.06	72	103.06	Baik
IKK. 2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	120	72	82.92	115.15	72	115.75	Istimewa

Tabel 4. Capaian Sasaran Kegiatan 1 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan perikanan adalah :

1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan.
2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan.

IKK. 1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya mendukung Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dari hulu sampai hilir adalah dengan kegiatan pengendalian dan pengawasan pada produk hasil kelautan dan perikanan yaitu :

a. Kegiatan pengendalian dilakukan melalui pelaksanaan sertifikasi meliputi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB), Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB), Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB), Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB) dan dari perikanan tangkap meliputi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di kapal. Output dari kegiatan pengendalian adalah sertifikat yang diterbitkan kepada pelaku usaha perikanan oleh Otoritas Kompeten.
b. Kegiatan pengawasan dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan surveilen Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB), Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB), Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik (CPOIB), Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB) dan dari perikanan tangkap meliputi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di kapal. Output darikegiatan pengawasan adalah Surat Keterangan Hasil Surveilen (SKHS) yang diterbitkan kepada pelaku usaha perikanan yang telah tersertifikasi CPIB, CBIB, CPIB di Kapal, CPPIB, CPOIB dan CDOIB serta telah dilakukan surveilen terhadap penerapannya di unit usaha tersebut.

Sektor produksi perikanan primer merujuk pada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya. Pelaksanaan kegiatan pengendalian pada

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

sektor produksi primer dilakukan berdasarkan permohonan yang masuk pada sistem OSS maupun secara manual. Selama Triwulan II Tahun 2026, terdapat 1 jenis permohonan sertifikasi sektor produksi primer yaitu Sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) di Kapal.

Pelaksanaan sertifikasi CPIB di Kapal dilakukan dengan metode inspeksi penilaian mandiri (*onsite*) pada 2 kapal muatan yang berlokasi di Balikpapan yaitu:

1. KM. Sukses Bahagia II pada tanggal 6 Mei 2026
2. KM. Sukses Bahagia III pada tanggal 11 Juni 2026

Jumlah SDM yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi CPIB di kapal pada Triwulan II Tahun 2026 sebanyak 5 orang inspektur mutu dan 1 orang calon inspektur mutu (pendamping). Output dari kegiatan pengendalian pada sektor produksi primer pada Triwulan II Tahun 2026 terdiri dari Sertifikat CPIB di Kapal sebanyak 2 sertifikat.

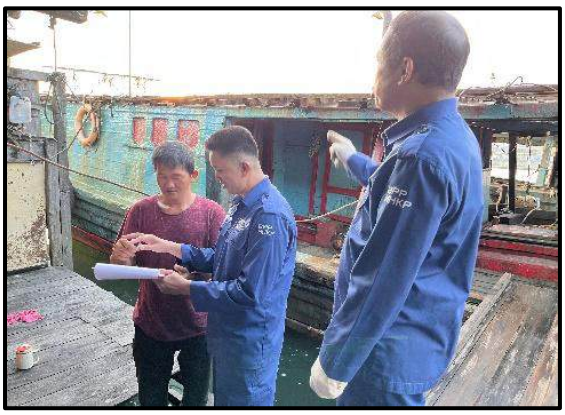

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

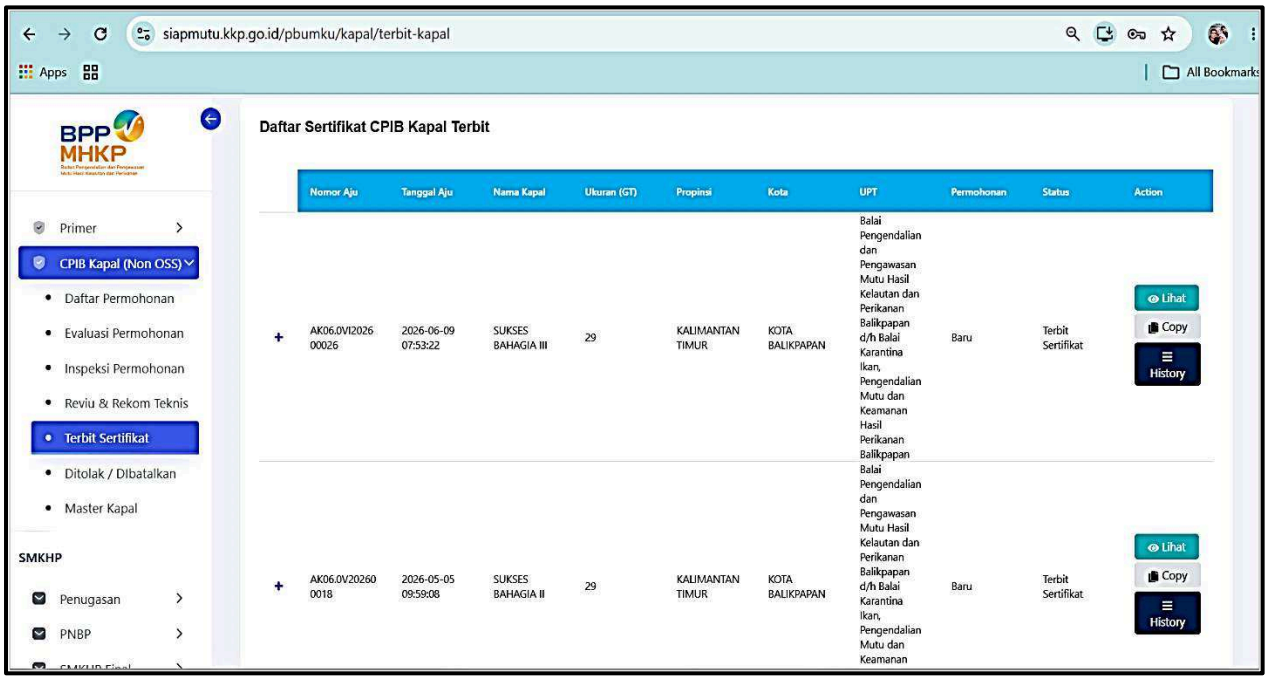

Gambar 5. Sertifikasi CPIB di Kapal

Dalam upaya percepatan sertifikasi sektor produksi primer, dilakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mendukung penyelesaian kendala yang dihadapi pelaku usaha pada proses sertifikasi yaitu :

- Satuan Pelayanan Balai Pengelolaan Kelautan Balikpapan, Satuan Pelayanan Pengelolaan Ruang Laut Balikpapan tanggal 24 Juni 2026 dan
- Satuan Kerja PSDKP Balikpapan tanggal 25 Juni 2026 guna memastikan keselarasan pelaksanaan tugas dan fungsi serta mendukung efektivitas penyelenggaraan layanan

Gambar 6. Koordinasi Antar Instansi Terkait Guna Percepatan Sertifikasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Realisasi terhadap IKU Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan TW I Tahun 2026 sebesar 74.20 % berdasarkan Surat Kepala Pusat Mutu Produksi Primer Nomor B.607/BPPMHKP.3/RC.610/VII/2026 tanggal 13 Juli 2026 tentang Capaian Indikator Kinerja "Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan" Triwulan II Tahun 2026. Bila dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja ini pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 400 % atau nilai capaian 120 %, nilai capaian di Triwulan II tahun 2026 memiliki nilai capaian yang lebih rendah. Hal ini disebabkan karena perbedaan formula perhitungan terhadap nilai capaian pada triwulan berjalan.

Keberhasilan pencapaian melebihi target kinerja sebesar 74.20 % atau persentase pencapaian sebesar 103.06 % tersebut disebabkan meningkatnya tingkat kesadaran dan komitmen pelaku usaha dan sinergi yang baik dengan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di hulu. Selain itu pencapaian hasil tersebut juga disebabkan oleh koordinasi yang baik dengan pelaku usaha sehingga kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan adanya proses produksi saat pelaksanaan inspeksi dapat terpenuhi.

Realisasi anggaran lingkup Kegiatan Pengawasan Mutu Produksi Primer Triwulan II Tahun 2026 sebesar 0 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 2.000.000,-. Kegiatan sertifikasi telah dilakukan namun proses pertanggungjawaban anggaran belum dilakukan. Efisiensi anggaran pada pelaksanaan IKU ini dapat tercapai oleh pengaturan SDM pelaksana kegiatan.

IKK. 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen adalah pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu terhadap unit usaha yang telah menerapkan program persyaratan dasar, manajemen keamanan pangan berbasis HACCP dan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Adapun lingkup kegiatan pengendalian mutu dan pengawasan mutu yang

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Pengendalian mutu adalah semua kegiatan yang meliputi inspeksi, surveilen dan pengambilan contoh dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
b. Pengawasan mutu adalah kegiatan untuk melihat konsistensi terhadap penerapan standar dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melalui kegiatan surveilen

Kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencapaian target yang telah dilakukan selama Triwulan II tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengendalian penerapan jaminan mutu di Unit Pengolahan Ikan (UPI) melalui kegiatan inspeksi dan surveilen penerapan HACCP.
   a. Kegiatan inspeksi dilakukan pada Bulan Mei 2026 pada 1 UPI sebanyak 2 ruang lingkup produk dan Bulan Juni 2026 pada 1 UPI sebanyak 3 ruang lingkup produk yaitu :
      - Tanggal 20 Mei 2026, dilakukan secara online (*Remote Inspection*) pada UPI PT. Ocean Paradise Fishery, dengan 2 ruang lingkup produk yaitu :
        1) Frozen Shrimp
        2) Frozen Demersal Fish

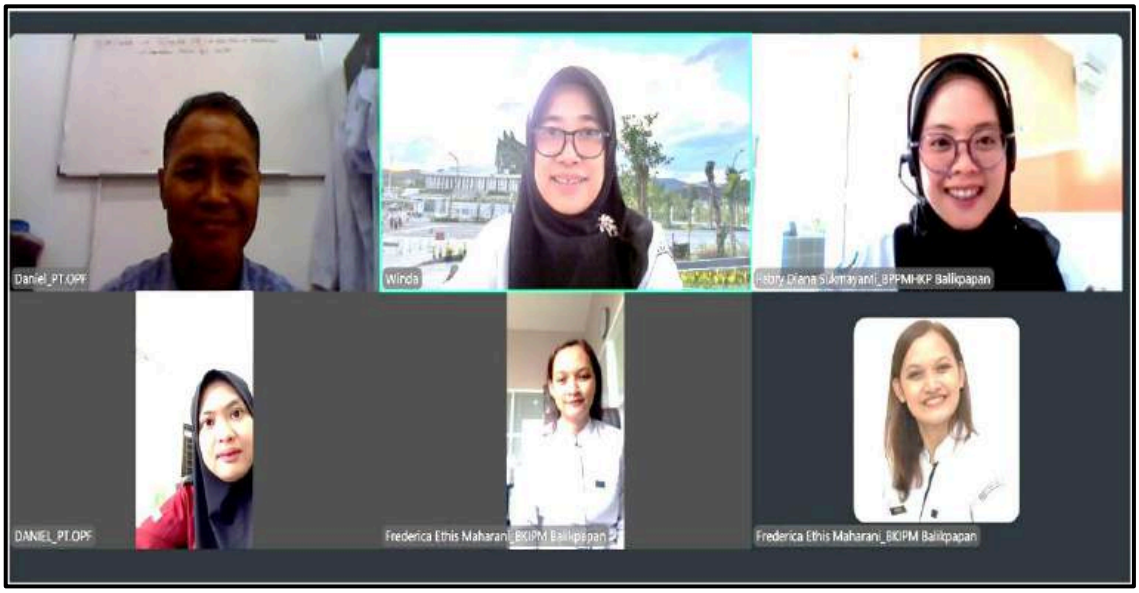

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 7. Kegiatan Inspeksi Penerapan HACCP di Unit Pengolahan Ikan PT. Ocean Paradise Fishery

- Tanggal 24 Juni 2026, dilakukan secara *On-site* pada PT. Atlas Agung Abadi (Unit Manggar) dengan 3 ruang lingkup produk yaitu Live Crab, Live Eel dan Live Lobster.

Gambar 8. Kegiatan Inspeksi Penerapan HACCP di Unit Pengolahan Ikan PT. Atlas Agung Abadi

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

b. Pelaksanaan surveilen pada Bulan Mei 2026 telah dilakukan pada 5 Unit Pengolahan Ikan (UPI). Terdapat 2 UPI yang tidak dilakukan surveilen penerapan HACCP disebabkan tidak ada proses produksi yaitu PT. Borneo Ocean Nauly dengan ruang lingkup Dried Seaweed dan 1 UPI CV. Multi Sarana Jaya dengan ruang lingkup Dried Seaweed tidak dilakukan surveilen karena proses pengajuan sertifikasi HACCP. Adapun surveilen UPI telah dilakukan pada UPI sebagai berikut :

1) PT. Ocean Paradise Fishery
2) PT. Nusaybah Alby Saing
3) CV. Tiga A (Unit Manggar)
4) CV. Tiga A (Unit Kampung Baru)
5) PT. Samudra Manggala Abadi

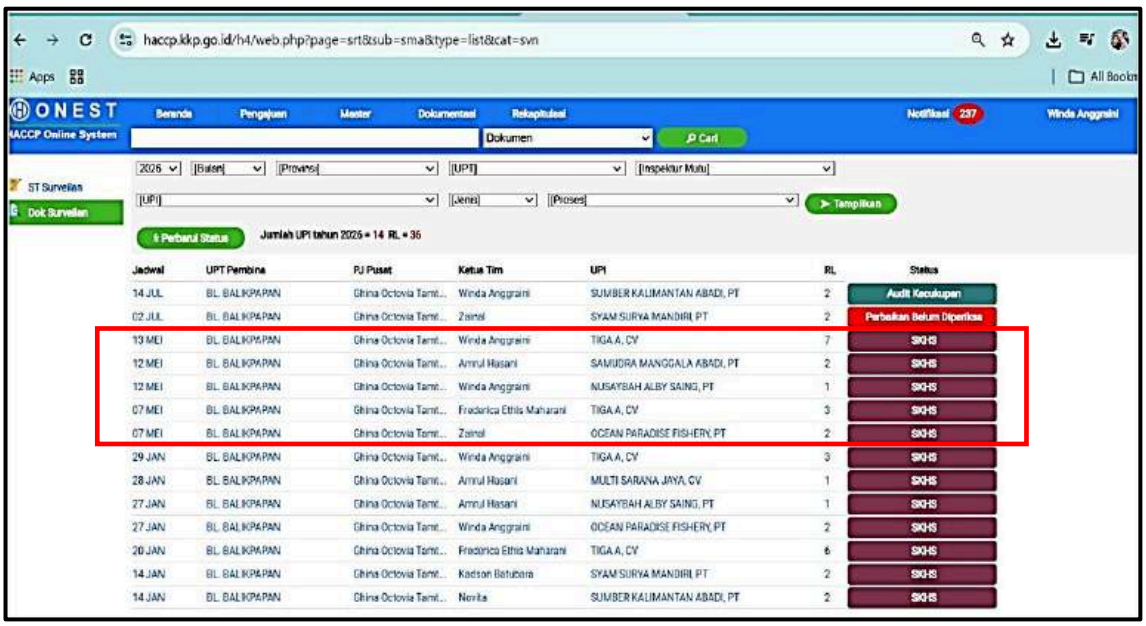

Gambar 9. Tangkap Layar Kegiatan Surveilen Penerapan HACCP di UPI

2. Pelaksanaan pengendalian penerapan jaminan mutu di Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan UMKM melalui kegiatan inspeksi penerapan Program Kelayakan Dasar untuk penerbitan SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan). Sertifikasi pelaksanaan GMP dan SSOP di UPI dan UMKM melalui inspeksi secara online (*remote inspection*).

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Inspeksi secara online yaitu pada UPI atas nama :
  - ✓ Siti Fatimah pada tanggal 05 Mei 2026 dengan 1 ruang lingkup produk yaitu Fish Amplang
  - ✓ Umiyatun pada tanggal 08 Mei 2026 dengan 1 ruang lingkup produk yaitu Fish Amplang
  - ✓ Nur Apni pada tanggal 21 Mei 2026 dengan 1 ruang lingkup produk yaitu Fish Pempek

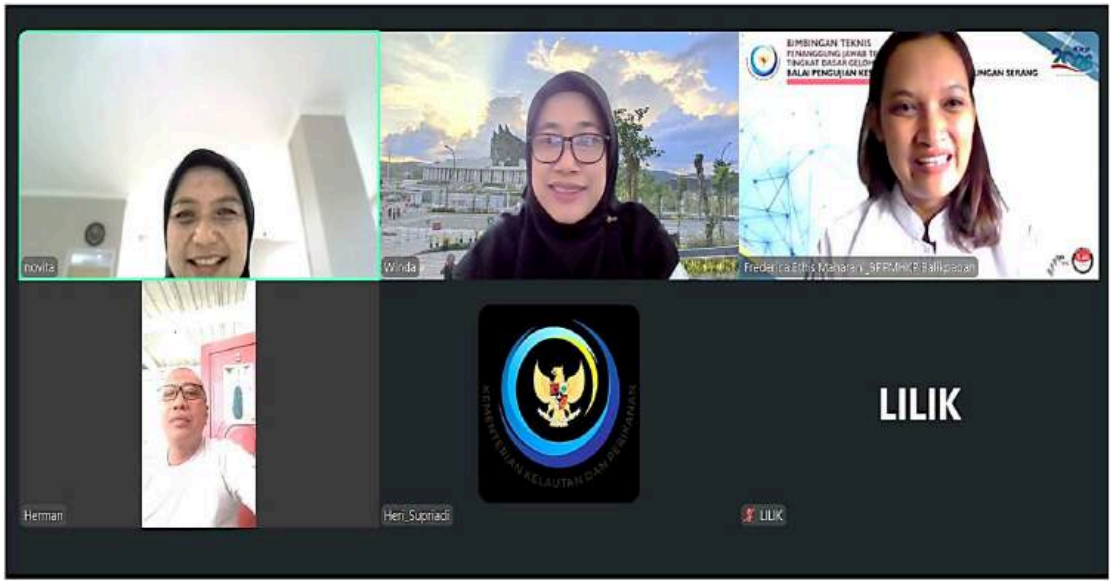

Gambar 10. Kegiatan Inspeksi Penerapan Kelayakan Dasar (SKP) di UMKM Secara *Online* (*Remote Inspection*)

3. Pelaksanaan Sosialisasi Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI), Bimbingan Teknis Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) dan Penyusunan Panduan CDIB pada tanggal 10 Juni 2026.
   - Kegiatan ini diselenggarakan oleh Balai PPMHKP Balikpapan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), dilakukan secara daring dan luring (via zoom), dihadiri oleh Inspektur Mutu lingkup Balai PPMHKP Balikpapan, Dinas Perikanan lingkup Kalimantan Timur serta pelaku usaha perikanan.
   - Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang prosedur Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) dan pelaksanaan Cara Distribusi Ikan Yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Baik (CDIB) di pelaku usaha perikanan serta menjadi sarana percepatan sertifikasi khususnya sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI)

Gambar 11. Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI), Bimbingan Teknis Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) dan Penyusunan Panduan CDIB Secara Daring dan Luring

Capaian indikator diperoleh dengan menghitung persentase tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP, HACCP dan SPDI. dibagi dengan jumlah dari unsur pembentuk. Realisasi terhadap IKU Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan TW II Tahun 2026 sebesar 82.92 % berdasarkan Surat Kepala Pusat Mutu Pasca Panen Nomor B.2537/BPPMHKP.4/RC.610/IV/2026 tanggal 13 Juli 2026 tentang Nilai Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Triwulan II dengan data sebagai berikut :

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Efektifitas pengendalian dan pengawasan HACCP di UPI (A) sebesar 90.83 %
- Efektifitas pengendalian dan pengawasan SKP di UPI dan UMKM (B) sebesar 88.22 %
- Efektifitas pengendalian dan pengawasan SPDI di pelaku usaha perikanan (C) sebesar 75 %
- Berdasarkan data efektifitas pengendalian dan pengawasan HACCP, SKP dan SPDI tersebut maka capaian untuk IKU Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan pada Triwulan II adalah sebesar 82.92 %

Capaian Indikator Kinerja ini sampai dengan Triwulan II atau Semester I tahun 2026 memiliki nilai capaian 83.13 % atau persentase capaian sebesar 115.46 %. Bila dibandingkan dengan nilai capaian Triwulan II Tahun 2025 sebesar 120 %, capaian Triwulan II tahun 2026 memiliki nilai capaian yang lebih rendah. Hal ini disebabkan karena perbedaan formula perhitungan terhadap nilai capaian pada triwulan berjalan.

Pencapaian nilai melebihi target kinerja sebesar 83.34 % tersebut disebabkan oleh meningkatnya tingkat kesadaran dan komitmen para pelaku usaha perikanan dalam penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta pemenuhan pasar dagang produk perikanan yang semakin kompetitif terutama untuk tujuan konsumen luar negeri (ekspor). Keberhasilan ini dapat tercapai dengan pelaksanaan pemberian layanan berupa edukasi kepada pelaku usaha baik melalui pendampingan untuk penjaminan produk dari hulu sampai hilir.

Realisasi anggaran lingkup Kegiatan Pengawasan Mutu Pasca Panen Triwulan II Tahun 2026 sebesar Rp. 15.116.561,- atau sebesar 26.23 % dari pagu anggaran setelah pemblokiran anggaran sebesar Rp. 57.631.000,-. Efisiensi pelaksanaan kegiatan validasi produk pada sektor produksi pasca panen didukung dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan jaminan mutu pada penerapan HACCP dan Kelayakan Dasar di Unit Pengolahan Ikan dan UMKM secara *online* (*remote* inspection).

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Sasaran Kegiatan 2 : Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan II Tahun 2026. Sasaran kegiatan 2 lingkup Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan II Tahun 2026 belum memiliki nilai capaian karena capaiannya dilakukan melalui hasil kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP berdasarkan implementasi SNI ISO / IEC 17020 : 2012, SNI ISO / IEC 17025 : 2017 dan penerapan Quality Manajemen System (QMS) di lingkup Balai PPMHKP Balikpapan.

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2026			Renstra 2026 - 2029		Kategori
		Realisasi Triwulan II	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	(%)	Target	(%)	
SK 2. Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Konsisten Sesuai Standar								
IKK. 3	Persentase implementasi metode terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	-	-	-	-	72	-	-

Tabel 5. Capaian Sasaran Kegiatan 2 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IKK. 3. Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Ditetapkan Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan

Nilai pemenuhan indikator kinerja ini merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap :

a. Laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 : 2017 serta dinyatakan dalam bentuk persentase berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.
b. Lembaga inspeksi dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17020 : 2012 dan dinyatakan dalam bentuk persentase berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa lembaga inspeksi telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki
c. Nilai kualitas pelaksanaan Quality Manajemen System (QMS) dari rata-rata penerapan sistem jaminan mutu

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri. ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perhitungan capaian indikator kinerja persentase implementasi metode terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan Tahun 2026 dilakukan secara tahunan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Pusat Manajemen Mutu BPPMHKP terhadap pelaksanaan kegiatan penerapan SNI ISO / IEC 17020 : 2012, SNI ISO / IEC 17025 : 2017 dan nilai kualitas penerapan QMS.

Sasaran Kegiatan 3 : Tatakelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Balai PPMHK Balikpapan

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan menjadi tolak ukur dalam keberhasilan program dan kegiatan Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan II Tahun 2026. Nilai capaian sasaran kegiatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan periode Triwulan II Tahun 2026 tersebut adalah 114.70 %. Indikator kinerja kegiatan yang memiliki nilai capaian pada Triwulan II untuk mengukur keberhasilan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan adalah :

1. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai PPMHKP Balikpapan
2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai PPMHKP Balikpapan
3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai PPMHKP Balikpapan
4. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Balai PPMHKP Balikpapan
5. Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup Balai PPMHKP Balikpapan

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2026			Renstra 2026 - 2029		Kategori
		Realisasi Triwulan II	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	(%)	Target	(%)	
	SK. 3. Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan							
IKK. 4	Indeks Professional ASN lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	85.01	75	83.57	111.43	82,5	101.30	Istimewa
IKK. 5	Nilai pembangunan integritas lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	-	-	-	-	77		
IKK. 6	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	-	-	-	-	86,2	-	-
IKK. 7	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	100	86	100	116,28	86	116,28	Istimewa
IKK. 8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	96.24	83	99.59	119.99	92.1	108.13	Istimewa
IKK. 9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	-	-	-	-	71.75	-	-
IKK. 10	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	100	77	100	120	77	120	Istimewa
IKK. 11	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Balai PPMHKP Balikpapan	95.87	89	94.11	105.74	89	105.74	Baik

Tabel 6. Capaian Sasaran Kegiatan 3 Berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IKK. 4. Indeks Profesional ASN Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian target IKU Indeks Profesionalitas ASN pada Triwulan II Tahun 2026 adalah :

1. Pengembangan Kompetensi (Diklat, Bimtek, Pelatihan)

- Mengikuti Bimtek sesuai kompetensinya.

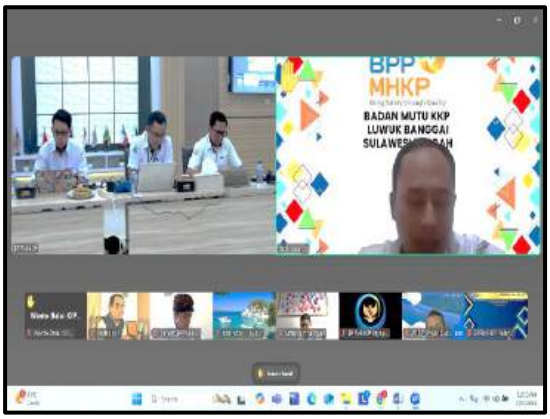

SERTIFIKAT
NOMOR 1382/BPPMHKP.1/TU.210/V/2026
Diberikan kepada
SUWANTO
Sebagai
Peserta
atas partisipasinya dalam kegiatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kinerja Organisasi yang diselenggarakan oleh Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada tanggal 11 Mei 2026 selama 4 (empat) Jam Pelajaran
Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Ditandatangani Secara Elektronik
Dr. Ir. Woro Nur Endang Sariati, MP

Gambar 12. Peningkatan Kompetensi Pegawai Dengan Mengikuti Kegiatan Bimtek Secara Online

2. Disiplin dan Perilaku Kerja

- Pengawasan kehadiran melalui aplikasi presensi elektronik (geotagging).
- Pembinaan kedisiplinan melalui apel pagi dan pengarahan rutin pimpinan.
- Adanya evaluasi terhadap pegawai yang terlambat masuk kerja, serta penegakan reward dan punishment bagi pegawai.

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 13. Kegiatan Apel Pagi dan Pengarahan Rutin Dari Pimpinan

Nilai capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Triwulan II atau Semester I Tahun 2026 adalah 83.57 atau prosentase capaian sebesar 111.43 % dari target semester I sebesar 75. Pencapaian ini disebabkan karena adanya beberapa faktor, diiantaranya :

1. Balai PPMHKP Balikpapan berhasil mencapai target Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) melalui komitmen yang kuat dalam peningkatan kompetensi, integritas, serta kinerja seluruh pegawai. Pencapaian ini merupakan hasil dari pelaksanaan strategi pembinaan SDM yang konsisten dan terukur.
2. Seluruh ASN di lingkungan Balai PPMHKP Balikpapan bertahap untuk memenuhi standar profesionalitas melalui partisipasi aktif dalam pelatihan, uji kompetensi, pengembangan jabatan fungsional, serta optimalisasi kinerja berbasis perencanaan dan evaluasi yang akuntabel. Selain itu, tingkat disiplin pegawai menunjukkan peningkatan signifikan seiring penerapan mekanisme pengawasan internal dan pembiasaan budaya kerja yang tertib dan produktif.
3. Adanya Training Need Analysis (TNA) yang disusun untuk semua pegawai, sehingga memudahkan untuk pengawasannya.
4. Semua pegawai berperan aktif untuk meningkatkan kompetensinya masing-masing, dengan meningkatkan Pendidikan, serta aktif mengikuti Pelatihan ataupun Bimtek.

Terkait Matrix Nine Grid Box Talenta, masih banyak Pegawai Balai PPMHKP Balikpapan belum dapat tercapai dan rata-rata di Grid Box 2 dan 5. Itu disebabkan karena pegawai belum mengikuti assessment dan uji kompetensi. Kedua kegiatan tersebut merupakan dasar dalam mengukur potensi dan kompetensi pegawai. Sehingga perlu adanya

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

rekapitulasi pegawai yang berada pada kuadran kurang dari 5 untuk dapat disusulkan mengikuti kegiatan uji kompetensi.

Untuk mendukung capaian indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran setelah efisiensi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 32.544.000.,-. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 realisasi anggaran untuk pencapaian IKU ini sebesar RP. 27.394.630,- atau sebesar 84.14 % dari pagu anggaran yang tersedia.

IKK. 5. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan fokus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang PEMBANGUNAN Integritas di Lingkungan KKP.

Nilai pembangunan integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jendral terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :

a. Pembangunan zona integritas (bobot 30 %)
b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15 %)
c. Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15 %)
d. Penanganan benturan kepentingan (bobot 15 %)
e. Pelaporan harta kekayaan (LHKAN) (bobot 15 %)
f. Pengendalian kecurangan (bobot 10%)

Perhitungan capaian indikator kinerja persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona itegritas lingkup Balai PPMHKP Balikpapan Tahun 2026 dilakukan per semester.

IKK. 6. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rekonsiliasi kinerja merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKj), Target Kiierja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek yaitu :

1. Aspek kepatuhan : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target IKU, Renaksi, LKJ / LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ / LCK TW III
2. Aspek kesesuaian : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data.
3. Aspek ketercapaian : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata- rata nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2024 pada aplikasi kinerjaku

Perhitungan capaian indikator kinerja nilai rekonsiliasi kinerja satker Balai PPMHKP Balikpapan Tahun 2026 dilakukan secara tahunan sehingga pada Triwulan II Tahun 2026 belum memiliki nilai capaian.

IKK. 7. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal Balai PPMHKP Balikpapan yang sudah ditindaklanjuti (proses dan / atau tuntas) yang menjadi objek pengawasan dengan pengukuran target komulatif tahunan sebesar 86 % pada Triwulan II Tahun 2026.

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai PPMHKP Balikpapan adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit Eselon I lingkup KKP sampai dengan waktu pengukuran. Pengecualian apabila tidak terdapat temuan dari Inspektorat Jenderal Mitra, maka capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Level II sesuai dengan *capture dashboard* pada Aplikasi SIDAK.

Selama Triwulan II Tahun 2026 tidak terdapat rekomendasi hasil pengawasan lingkup Balai PPMHKP Balikpapan dari Inspektorat Jendral KKP sehingga untuk nilai capaian diperoleh dari tangkap layar pada Aplikasi SIDAK dan berdasarkan Nota Dinas dari Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP Nomor 955/ITJ.0/TU.140/VII/2026 tanggal 10 Juli 2026 tentang Capaian IKU Perentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP Triwulan II Tahun 2026. Capaian indikator kinerja presentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai PPMHKP Balikpapan pada periode Triwulan II tahun 2024 adalah 100 % dari target sebesar 86 %. Apabila dibandingkan dengan dengan nilai capaian pada Triwulan II Tahun 2025, indikator kinerja ini memiliki nilai capaian yang sama yaitu 100 % dan bila dibandingkan dengan target RENSTRA 2026 – 2029 memiliki nilai persentase capaian sebesar 116.28 % dari target 86 % dengan kategori istimewa.

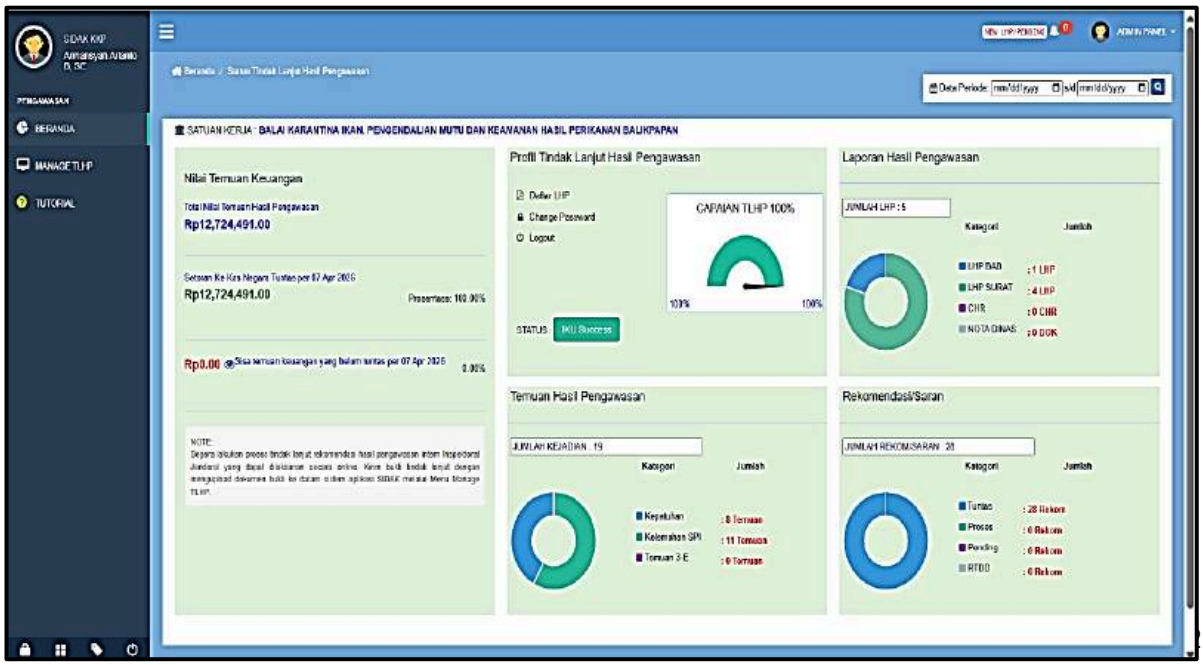

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 14. Tangkap Layar Aplikasi SIDAK Triwulan II Tahun 2026

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan di lingkup Balai PPMHKP Balikpapan telah dilakukan dengan cara peningkatan kinerja pegawai, penggunaan anggaran Triwulan II Tahun 2026 sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk mendukung capaian indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 14.671.000.,-. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 realisasi anggaran untuk pencapaian IKU ini sebesar RP. 14.660.145,- atau sebesar 99.93 % dari pagu anggaran yang tersedia.

IKK. 8. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai PPMHKP Balikpapan

IKPA adalah indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai ini diperoleh dari data input dan output satker didalam aplikasi MyIntress Kementerian Keuangan.

Pencapaian nilai IKPA berdasarkan ketaatan pada 8 indikator yaitu :

1. Revisi DIPA (bobot 10 %)
2. Deviasi RPD (bobot 15 %)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Penyerapan anggaran (bobot 20 %)
4. Belanja kontraktual (bobot 10 %)
5. Penyelesaian tagihan (bobot 10 %)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10 %)
7. Dispensasi SPM (pengurang nilai IKPA)
8. Capaian output (bobot 25 %)

Capaian nilai IKPA pada Triwulan II tahun 2026 sebesar 99,59 dari target 83 dengan rincian sebagai berikut :

1. Aspek kualitas perencanaan anggaran
   a. Revisi DIPA (10%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran Satker berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan oleh Satker dalam satu semester.

      Pada tahun 2026 tidak terdapat revisi yang mempengaruhi nilai IKPA sehingga capaiannya adalah :

      100 x 10% = 10

   b. Deviasi Halaman III DIPA (15%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran Satker berdasarkan rata-rata nilai kinerja bulanan Deviasi Halaman III DIPA. Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan pada setiap jenis belanja dan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja, berdasarkan pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA yang disampaikan oleh Satker paling lambat pada hari kerja kesepuluh awal triwulan. Rata-rata deviasi kumulatif diperoleh dari nilai aplikasi *MyIntress* Kementerian Keuangan sampai Juni 2026 sebesar 100 sehingga nilai deviasi halaman III DIPA sebagai berikut :

      Dengan demikian nilai Deviasi Halaman III DIPA adalah 100 x 15% = 15.

2. Aspek kualitas pelaksanaan anggaran
   a. Penyerapan Anggaran (20%) merupakan indikator kinerja yang digunakan mengukur kualitas pelaksanaan anggaran Satker kesesuaian eksekusi belanja dengan target penyerapan anggaran triwulanan, dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Nilai kinerja, diperoleh dari rasio antara penyerapan terhadap target penyerapan setiap triwulan. Berdasarkan nilai penyerapan yang tertera pada aplikasi *MyIntress* Kementerian Keuangan sampai Juni 2026 sebesar 99,71 maka diperoleh bobot sebagai berikut : 99,71 x 20% = 19,94

b. Belanja kontraktual (10%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur upaya akselerasi belanja kontraktual pada Satker. Tahun 2026 tidak terdapat belanja kontraktual.

c. Penyelesaian tagihan (10%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian SPM-LS kontraktual Satker, dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS kontraktual terhadap seluruh SPM-LS kontraktual yang diajukan ke KPPN mitra. Pada tahun 2026 tidak terdapat belanja kontraktual sehingga tidak ada nilai untuk penyelesaian tagihan.

d. Pengelolaan UP dan TUP (10%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP, Persentase GUP, dan Setoran TUP. Nilai pengelolaan UP dan TUP tahun 2026 adalah 97,31 x 10% = 9,73

e. Dispensasi SPM (0%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kepatuhan Satker dalam menyampaikan SPM sesuai dengan batas waktu penyampaian SPM diakhir tahun anggaran yang diatur dalam ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran, dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN mitra di tahun 2026. Pada tahun 2026 tidak terdapat dispensasi SPM sehingga nilai dispensasi SPM adalah 0.

3. Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran

Capaian output (25%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian data dan ketercapaian output pada Satker, dihitung berdasarkan komposit nilai kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (bobot 30%), dan (2) Komponen capaian RO (bobot 70%).

Sampai dengan tahun 2026, perhitungan capaian output adalah sebagai berikut :

- Ketepatan waktu : 100 x 30% = 30
- Capaian RO : 100 x 70% = 70

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Jumlah = 100

Dengan demikian nilai kinerja capaian output adalah 100 x 25% = 25%. Dari tiga aspek penilaian tersebut diperoleh nilai dengan rincian sebagai berikut :

Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan II TA 2026 berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Nomor 1873/SJ.2/TU.210/VII/2026 tanggal 13 Juli 2026 tentang Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2026 adalah sebesar 99,59 atau memiliki persentase capaian sebesar 119.99 %

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPb

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
33	06 Juni	103	032	649792	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BAUBAU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	98,85 20 19,77	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	99,24 10 9,92	99,05	100,00 25 25,00	100,00	79,69	80,00%	0,00	99,62
34	06 Juni	015	032	649699	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKALPINANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	98,70 20 19,74	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	98,72 10 9,87	99,36	100,00 25 25,00	100,00	99,61	100,00%	0,00	99,61
35	06 Juni	047	032	567610	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BALIKPAPAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,71 20 19,94	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	97,31 10 9,73	98,51	100,00 25 25,00	100,00	79,67	80,00%	0,00	99,59
36	06 Juni	179	032	440822	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,64 20 19,93	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	95,57 10 9,56	98,89	100,00 25 25,00	100,00	99,49	100,00%	0,00	99,49

Gambar 14. Capaian Nilai IKPA Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan II Tahun 2026

Capaian realisasi IKPA pada triwulan II tahun 2026 sebesar 99,59 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan capaian realisasi IKPA tahun triwulan II tahun 2025 sebesar 96,24 dan capaian realisasi IKPA triwulan II tahun 2024 sebesar 96,97.

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Untuk mendukung capaian indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran setelah efisiensi tahun 2026 sebesar Rp. 14.671.000.,-. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 realisasi anggaran untuk pencapaian IKU ini sebesar RP. 14.660.145,- atau sebesar 99.93 % dari pagu anggaran yang tersedia.

IKK. 9. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKIPM Balikpapan

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian / Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Kinerja anggaran mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor : 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing.

Target yang ditetapkan untuk nilai kinerja anggaran tahun 2026 adalah 71.75 sedangkan pengukuran capaiannya dilakukan tahunan pada aplikasi Online Monitoring SMART DJA sehingga pada Triwulan II tahun 2026 belum memiliki nilai capaian.

IKK. 10. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ Yang Diumumkan Pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Target yang ditetapkan untuk capaian indikator kinerja persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Balai PPMHKP Balikpapan adalah 77 % sedangkan pengukuran capaiannya dilakukan setiap triwulan. Capaian indikator ini pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 100 % atau 120 % dari target sebesar 77 % berdasarkan penyampaian Nota Dinas dari Kepala Biro Pengadaan Barang / Jasa Nomor B.736/SJ.7/PL.410/VII/2026 tanggal 9 Juli 2026 tentang Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan II tahun anggaran 2026.

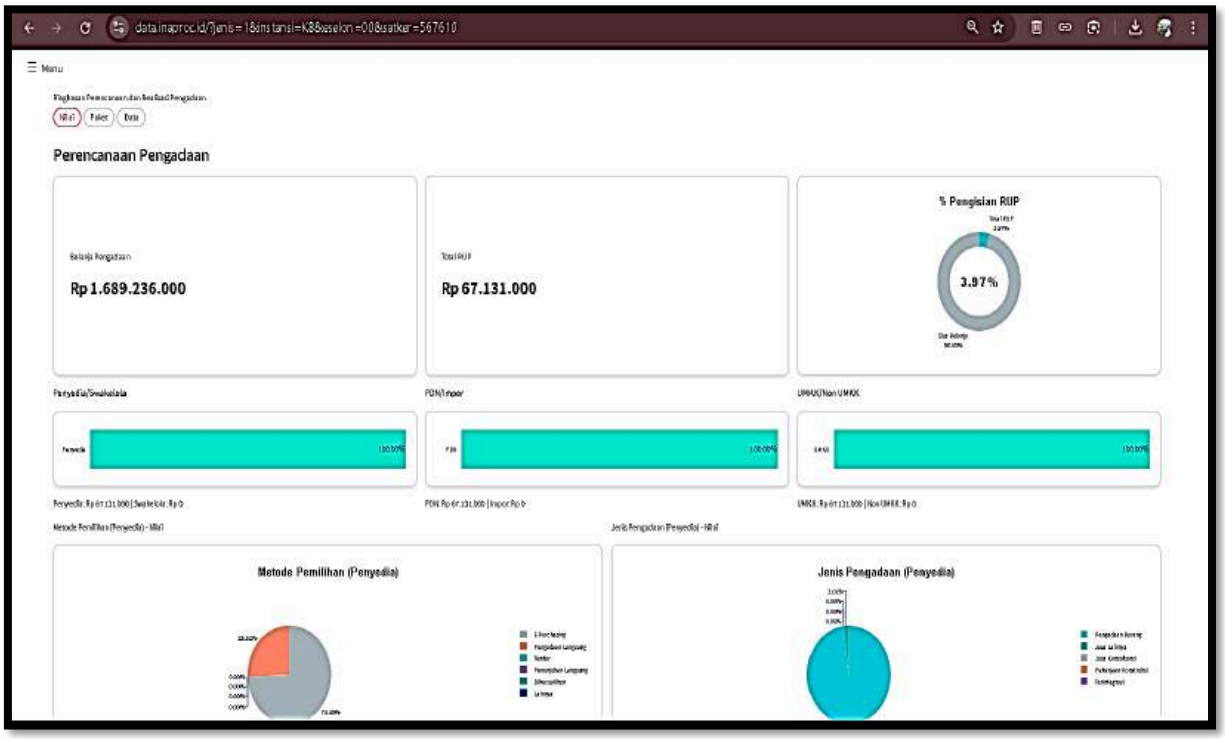

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

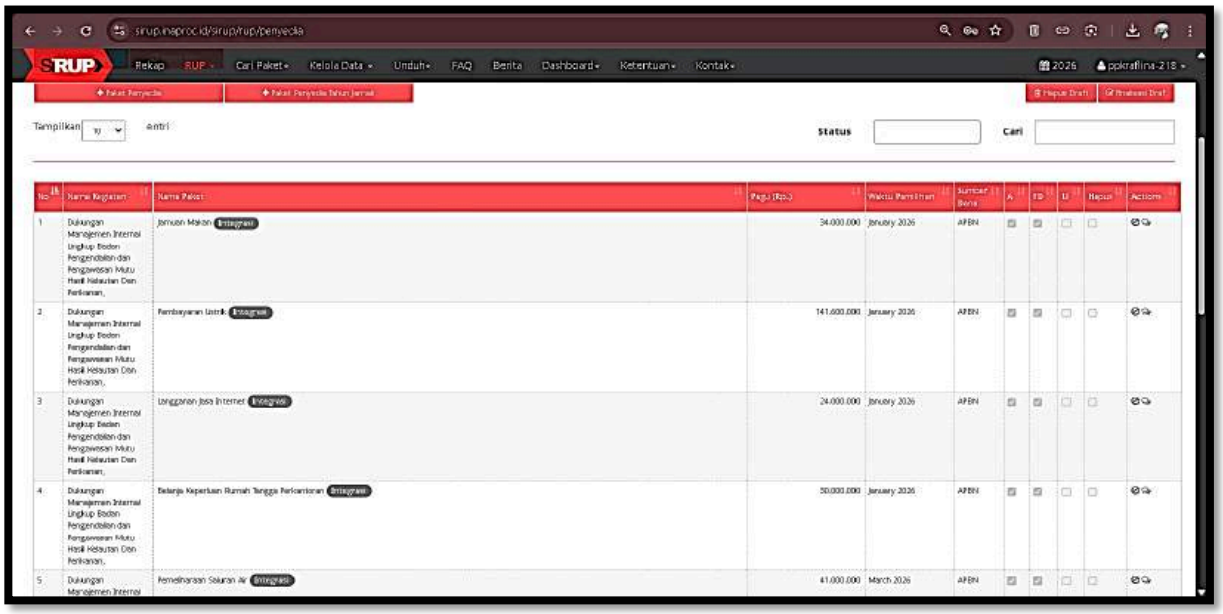

Gambar 15. Tangkap Layar Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

Pencapaian nilai kinerja tersebut diupayakan melalui revisi RUP pada SIRUP pasca efisiensi anggaran berdasarkan kertas kerja klarifikasi yang telah disusun, sehingga dapat mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada SIRUP melebihi 100 %. Data sesuai kertas kerja klarifikasi untuk nilai Pagu Terumumkan pasca efisiensi, setelah dilakukan penyesuaian oleh LKPP digunakan sebagai acuan untuk menjadi Pagu Pengadaan di dalam Statistik Moner SIRUP, sedangkan revisi RUP yang dilakukan UPT pada SIRUP akan membentuk data baru sebagai Pagu Terumumkan di dalam Statistik Moner SIRUP.

Pagu anggaran yang tersedia setelah efisiensi anggaran tahun 2026 untuk indikator kinerja ini sesuai RKAKL Balai PPMHKP Balikpapan adalah sebesar Rp. 75.840.000,-. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 realisasi anggaran untuk pencapaian IKU ini sebesar RP. 70.627.302,- atau sebesar 93.13 % dari pagu anggaran yang tersedia.

IKK. 11. Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan

Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup BKIPM menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat / pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: https://ptsp.kkp.go.id/skm/. Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing 47 UPT. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian pelayanan, biaya jasa pelayanan, produk pelayanan, kecepatan respon dari aplikasi sistem pelayanan, kemudahan dalam penggunaan fitur aplikasi sistem layanan, kualitas isi / konten aplikasi sistem layanan dan layanan konsultasi dan pengaduan. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari UPT lingkup BKIPM.

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “Nilai rata-rata tertimbang” masing- masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\textbf{Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang} = \frac{\textbf{Jumlah Bobot}}{\textbf{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

IKM	**=**	**Total dari Nilai Persepsi Per Unsur / Unsur Yang Terisi**	**X Nilai Penimbang Total**

Untuk memudahkan interpretasi penilaian SKM yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

SKM Unit Pelayanan x 25

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Nilai Persepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,532 - 4,00	88,31 -100,00	A	Sangat Baik

Tabel 7. Nilai Persepsi, Nilai Interval SKM, Nilai Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Berdasarkan Surat dari Sekretaris BPPMHKP Nomor 1955/BPPMHKP.1/HM.450/VII/2026 tentang Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPPMHKP Triwulan II Tahun 2026 tanggal 09 Juli 2026 diketahui bahwa Nilai SKM Balai PPMHKP Balikpapan mencapai mencapai 94.11.

No.	Unsur SKM	Nilai Rata-rata
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3.89
2	Kemudahan prosedur pelayanan	3.88
3	Kesesuaian jangka waktu penyelesaian pelayanan	3.95
4	Kesesuaian biaya jasa pelayanan	3.86
5	Kesesuaian produk pelayanan	3.91
6	Kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh / unggah) dari aplikasi sistem pelayanan	3.82
7	Kemudahan dalam penggunaan fitur aplikasi sistem layanan	3.84
8	Kualitas isi / konten aplikasi sistem layanan	4.00
9	Layanan konsultasi dan pengaduan	4.00
Rata-rata		**3.91**

Tabel 8. Nilai Rata-rata (NRR) Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan diperoleh hasil nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 94.11 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT BAIK, karena masih berada dalam Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Internal konversi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan 88.31 – 100.00. Capaian Indikator Kinerja survey kepuasan masyarakat lingkup Balai PPMHKP Balikpapan sampai dengan Triwulan II tahun 2026 sebesar 94.11 atau dengan persentase capaian sebesar 107.73 % dari target yang ditetapkan yaitu 89. Keberhasilan peningkatan pencapaian ini disebabkan peningkatan pelayanan publik dan pembenahan fasilitas layanan yang lebih memadai.

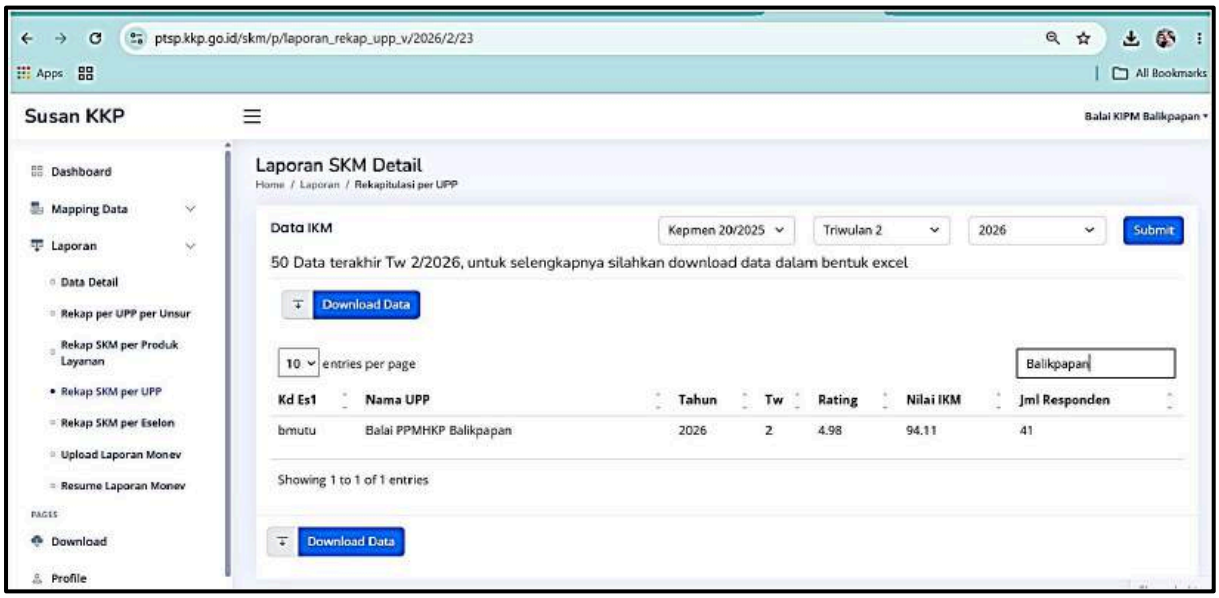

Gambar 16. Tangkap Layar Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan II Tahun 2026 Pada Website https://ptsp.kkp.go.id/skm

Berdasarkan Surat dari Sekretariat BPPMHKP Nomor 1955/BPPMHKP.1/HM.450/VII/2026 tanggal 09 Juli 2026 tentang Penyampaian Hasil Validasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPPMHKP Triwulan II Tahun 2026, Balai PPMHKP Balikpapan memperoleh nilai 94,11 dengan kategori mutu pelayanan Sangat Baik. Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Sampai dengan Triwulan II atau Semester I Tahun 2026 sebesar 95.88 % atau nilai pencapaiannya sebesar 107.73 %.

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Meskipun capaian indikator telah memenuhi target kinerja, terdapat tiga unsur pelayanan yang memperoleh nilai terendah, yaitu pada unsur kompetensi pelaksana dengan nilai 3.46, pada unsur perilaku pelaksana dengan nilai 3.61, dan pada unsur biaya / tarif dengan nilai 3.63. Adapun kondisi permasalahan / kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Pengguna layanan masih mengharapkan peningkatan kemampuan teknis, komunikasi, dan informasi pelayanan oleh petugas.
- Diperlukan penguatan budaya pelayanan prima dan konsistensi pelayanan kepada seluruh pengguna layanan.
- Informasi mengenai biaya dan tarif layanan masih perlu dipublikasikan secara lebih jelas dan mudah diakses masyarakat.

Rencana Tindak Lanjut Berdasarkan hasil evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan II yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kompetensi Pelaksana
   - Melaksanakan pelatihan pelayanan prima dan mengikuti Microlearning Pelayanan Prima melalui platform pembelajaran KKP.
   - Melaksanakan refreshment internal dan menguatkan pemahaman terhadap Standar Pelayanan, SOP, serta regulasi terbaru.
2. Peningkatan Perilaku Pelaksana
   - Melaksanakan morning briefing secara rutin.
   - Meningkatkan budaya kerja berorientasi pelayanan.
   - Memberikan pembinaan kepada petugas pelayanan terkait komunikasi efektif dan etika pelayanan.
3. Peningkatan Unsur Biaya/Tarif
   - Menempatkan infografis biaya layanan pada ruang pelayanan dan media digital.
   - Menyampaikan informasi biaya kepada pengguna layanan sebelum proses pelayanan dimulai.
   - Melakukan sosialisasi tarif layanan melalui website dan media sosial resmi.
4. Penguatan Sarana dan Prasarana
   - Mengusulkan pemenuhan fasilitas pelayanan disabilitas dan mengembangkan ruang pengaduan yang lebih representatif.
   - Melengkapi media informasi pelayanan.

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Penguatan Monitoring dan Evaluasi

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil SKM setiap triwulan dan menyusun rencana aksi perbaikan berdasarkan hasil survei.
- Melakukan monitoring terhadap efektivitas tindak lanjut yang telah dilaksanakan.

Sebagai tindak lanjut atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan I Tahun 2026, khususnya terhadap unsur-unsur yang memperoleh nilai terendah, Balai PPMHKP Balikpapan telah melaksanakan berbagai kegiatan perbaikan sebagai upaya mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik, yaitu :

- Melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai media memperoleh masukan dari pengguna layanan terhadap penyempurnaan standar pelayanan.

Gambar 17. Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP)

- Melaksanakan rapat evaluasi hasil SKM bersama seluruh unit pelayanan untuk mengidentifikasi akar penyebab rendahnya nilai pada beberapa unsur pelayanan.
- Melaksanakan refreshment dan microlearning pelayanan prima bagi Inspektur Mutu dan Petugas Administrasi melalui pembelajaran mandiri dan diskusi internal.
- Melaksanakan morning briefing secara rutin sebagai media penyampaian informasi pelayanan, evaluasi kinerja harian, serta penguatan budaya pelayanan prima.

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 18. Kegiatan *Morning Breafing* Secara Rutin

- Memberikan asistensi secara langsung kepada pengguna layanan terkait penggunaan aplikasi SIAPMUTU, OSS, dan pemahaman standar pelayanan.

Gambar 18. Pendampingan Secara Langsung Pada Pengguna Layanan

- Memperbarui media informasi pelayanan, termasuk publikasi persyaratan layanan, prosedur pelayanan, standar pelayanan, serta informasi biaya/tarif melalui media informasi dan kanal digital.

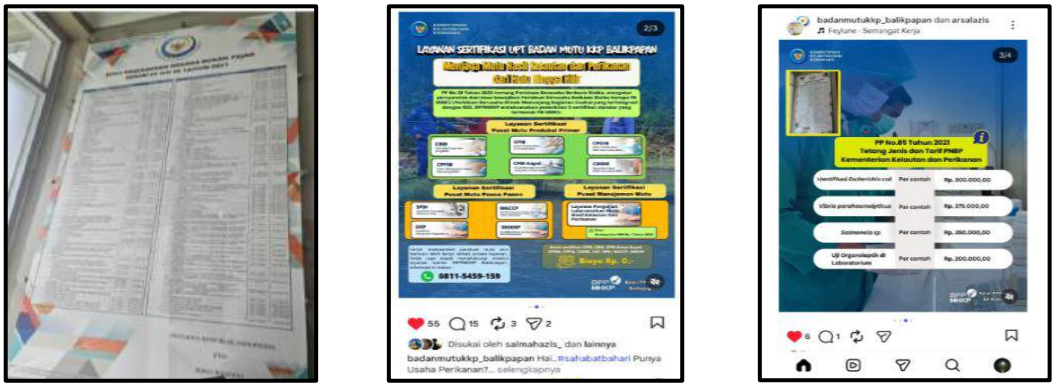

Gambar 19. Publikasi Standar Layanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pagu anggaran yang tersedia setelah efisiensi anggaran tahun 2026 untuk indikator kinerja ini adalah sebesar Rp. 2.293.000,-. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 realisasi anggaran untuk pencapaian IKU ini sebesar Rp. 414.000,- atau sebesar 18.05 % dari pagu anggaran yang tersedia.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Balai PPMHKP Balikpapan pada tahun anggaran 2026 setelah efisiensi anggaran sebesar Rp. 5.495.927.000,- serta pemblokiran anggaran sebesar Rp. 91.437.000,-. sehingga alokasi anggaran yang bisa digunakan setelah blokir adalah Rp. 5.404.490.000,-. Penyerapan anggaran Balai PPMHKP Balikpapan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 adalah Rp. 2.713.061.117,- atau sebesar 49.36 % dari pagu anggaran yang tersedia.

Anggaran ini digunakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja. Hal ini dibuktikan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 111,91 %, dimana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) ini merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan.

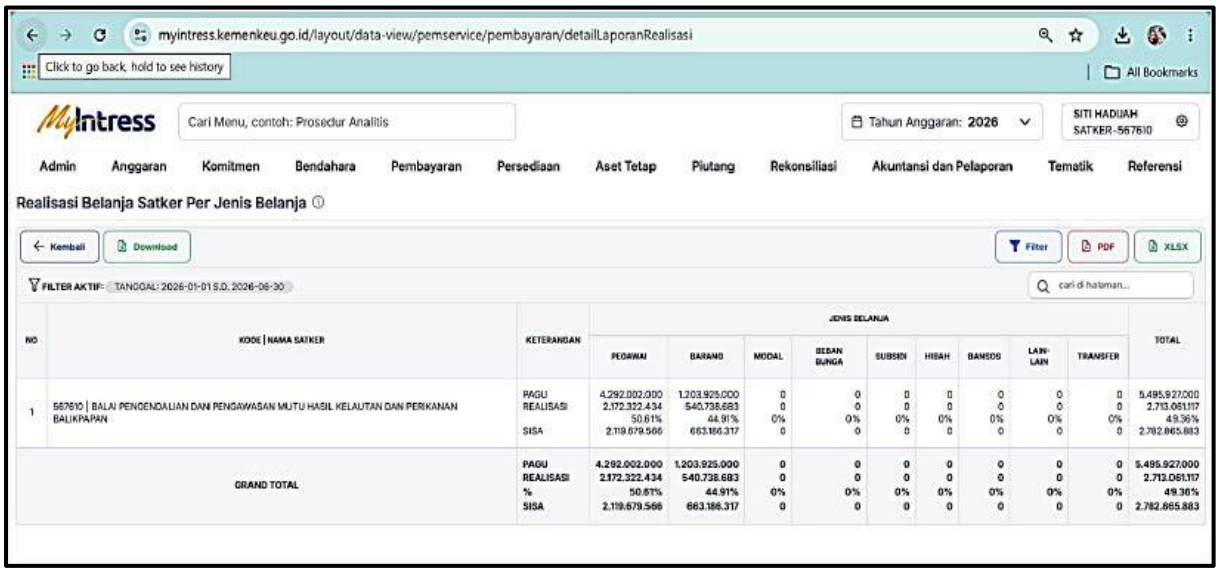

NO	KODE | NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA									TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAIN-LAIN	TRANSFER	
1	567610 | BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BALIKPAPAN	PAGU	4.292.002.000	1.203.925.000	0	0	0	0	0	0	0	5.495.927.000
		REALISASI	2.172.322.434	540.738.683	0	0	0	0	0	0	0	2.713.061.117
			50.61%	44.91%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	49.36%
		SISA	2.119.679.566	663.186.317	0	0	0	0	0	0	0	2.782.865.883
GRAND TOTAL		PAGU	4.292.002.000	1.203.925.000	0	0	0	0	0	0	0	5.495.927.000
		REALISASI	2.172.322.434	540.738.683	0	0	0	0	0	0	0	2.713.061.117
		%	50.61%	44.91%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	49.36%
		SISA	2.119.679.566	663.186.317	0	0	0	0	0	0	0	2.782.865.883

Gambar 20. Tangkap Layar Realisasi Anggaran Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan II Tahun 2026 Pada Website https://myintress.kemenkeu.go.id/

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	4.292.002.000	2.172.322.434	50.61
2	Belanja Barang	1.203.925.000	540.738.683	44.91
3	Belanja Modal	0	0	0
	Total	**5.495.927.000**	**2.713.061.117**	**49.36**

Tabel 9. Penyerapan Anggaran Per Jenis Belanja Triwulan II Tahun 2026

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	Pengendalian Mutu	117.702.000	18.006.561	15.30
2	Manajemen Mutu	86.000.000	11.027.991	12.82
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BPPMHKP	5.292.225.000	2.684.026.565	50.72
	Total	**5.495.927.000**	**2.713.061.117**	**49.36**

Tabel 10. Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kegiatan Triwulan II Tahun 2026

Berdasarkan capaian indikator kinerja kegiatan pada Triwulan II Tahun 2026, penyerapan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan telah tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pengukuran capaian indikator kinerja kegiatan Triwulan II Triwulan II Tahun 2026 telah tercapai dengan adanya dukungan Anggaran DIPA Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan II Tahun 2026.
2. Sebanyak 7 (lima) kegiatan yang merupakan target pada Triwulan II memiliki capaian melebihi target, dengan dukungan anggaran yang tersedia.
3. Capaian realisasi anggaran Triwulan II Tahun 2026 berdasarkan Aplikasi MyIntress adalah Rp. 2.713.061.117,- atau sebesar 49.36 % dari pagu anggaran Rp. 5.495.927.000,-.

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB. IV. PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan II Tahun 2026 menyajikan capaian sasaran strategis yang tercermin dalam capaian indikator kinerja Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan II Tahun 2026. Capaian tersebut dilakukan perbandingan terhadap target tahun berjalan, tahun sebelumnya dan juga target Renstra 2025 - 2029 sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam perencanaan program dan kegiatan berikutnya. Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan II Tahun 2026 dapat disimpulkan beberapa hal antara lain :

1. Nilai capaian indikator kinerja Balai PPMHKP Balikpapan periode Triwulan II Triwulan II Tahun 2026 adalah sebesar 111,91 % dengan kategori **ISTIMEWA** yang dapat dilihat pada aplikasi kinerjaku di https://kinerjaku.kkp.go.id/
2. Pencapaian kinerja Balai PPMHKP Balikpapan periode Triwulan II Triwulan II Tahun 2026 sangat baik dengan diperolehnya Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 111,91 % pada aplikasi kinerjaku.
3. Capaian Indikator Kinerja Triwulan II Triwulan II Tahun 2026, sebanyak 7 indikator kinerja capaiannya telah melebihi target.
4. Realisasi penyerapan anggaran Balai PPMHKP Balikpapan pada Triwulan II Triwulan II Tahun 2026 mencapai Rp. 2.713.061.117,- atau sebesar 49.36 % dari pagu anggaran Rp. 5.495.927.000,-.

4.2. REKOMENDASI

Berdasarkan analisis dan evaluasi kinerja Balai PPMHKP Balikpapan pada Triwulan II Tahun 2026 sebagai upaya untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan rencana aksi yang telah ditetapkan di awal Triwulan I Tahun 2026 untuk pencapaian kinerja sesuai target dan melakukan evaluasi

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

terhadap indikator kinerja yang untuk pencapaiannya dipengaruhi oleh faktor eksternal. Pelaksanaan kegiatan dan anggaran diintegrasikan dengan pemenuhan target kinerja, sehingga dapat menggambarkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran berbasis kinerja;

2. Melakukan perbaikan / tindak lanjut terhadap aspek-aspek yang dinilai kurang pada pelaksanaan kegiatan;
3. Pencapaian kinerja Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan II Tahun Anggaran 2026 yang tertuang dalam Laporan Kinerja dipublikasikan melalui website PPID Balai PPMHKP Balikpapan

3.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN SEBELUMNYA

1. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada stakeholder guna percepatan sertifikasi jaminan mutu
2. Telah dilakukan perbaikan pada aspek-aspek yang dinilai kurang terhadap hasil pelaksanaan kegiatan dan diinformasikan pada kegiatan apel pagi dan pengarahan oleh pimpinan secara rutin
3. Pencapaian kinerja Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan I Tahun Anggaran 2026 yang tertuang dalam Laporan Kinerja telah dipublikasikan melalui website PPID Balai PPMHKP Balikpapan sehingga dapat dengan mudah diakses.

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN

0542 - 7581284 bppmhkp.balikpapan@kkp.go.id www.kkp.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK)
BALAI PPMHKP BALIKPAPAN

NAMA INDIKATOR : PERSENTASE HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKTOR PRODUKSI PRIMER YANG MEMENUHI STANDAR MUTU DAN KEAMANAN PANGAN LINGKUP BALAI PPMHKP BALIKPAPAN
NAMA TIMJA : PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PRODUKSI PRIMER
PERIODE LAPORAN : TRIWULAN II / 2026

Nama Sasaran Kegiatan	**:**	**Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan**
Nama Indikator Kinerja	**:**	**Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan**

T / R	**Tahun 2026**							**Capaian Tahun 2026**	**Target Tahun 2026**
	Q1	**Q2**	**SM. 1**	**Q3**	**Q4**	**SM. 2**	**Tahunan**		
Target (%)	72	72	72						72 %
Realisasi (%)	74.20	74,20	74,20						
% Capaian	103.06	103,06	103,06						

Catatan :
Q1, Q2, Q3, Q4 : Capaian selama triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4
SM. 1 : Capaian Q1 + Capaian Q2
SM. 2 : Capaian Q3 + Capaian Q4
Tahunan : Capaian di akhir tahun 2024

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya ?)

Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produk Primer memiliki peran strategis dalam menjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan sejak tahap produksi hingga distribusi. Pada Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu tetap berjalan sesuai program kerja, khususnya melalui pelaksanaan sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di atas kapal. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi pencapaian target sertifikasi pada komoditas dan sektor lainnya.

Terdapat beberapa isu utama yaitu:.

Terdapat beberapa isu utama yaitu :

1. Migrasi Sistem OSS dari KBLI 2020 ke KBLI 2025.
   Pada Triwulan II Tahun 2026 terjadi proses migrasi sistem Online Single Submission (OSS) dari penggunaan KBLI Tahun 2020 menjadi KBLI Tahun 2025. Perubahan ini mengakibatkan penyesuaian data perizinan berusaha pada pelaku usaha sehingga beberapa proses pengajuan sertifikasi, khususnya CBIB dan CPIB Pembenihan, mengalami penundaan hingga sistem kembali berjalan normal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Persyaratan Pengujian Laboratorium pada Sertifikasi CPIB Pembenihan
   Dukungan fasilitas operasional Pelaksanaan sertifikasi CPIB Pembenihan masih mengalami kendala karena adanya persyaratan hasil uji logam berat dan uji mikrobiologi kualitas air. Persyaratan tersebut dinilai cukup memberatkan sebagian pelaku usaha, baik dari sisi biaya maupun akses terhadap laboratorium pengujian yang terakreditasi.
3. Pendampingan Pelaku Usaha yang Belum Optimal
   Pendampingan kepada pelaku usaha dalam memahami tata cara dan pemenuhan persyaratan pengajuan sertifikasi masih belum optimal. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelaku usaha belum memahami tahapan pengajuan sertifikasi secara menyeluruh, sehingga proses pengajuan dan penerbitan sertifikat belum dapat berjalan sesuai target.

Implikasi :

Kendala tersebut menyebabkan proses pengajuan dan penerbitan sertifikat pada beberapa skema sertifikasi belum berjalan secara optimal sehingga target sertifikasi Triwulan II Tahun 2026 belum sepenuhnya tercapai. Kondisi tersebut berdampak pada capaian indikator kinerja sektor produksi primer dan memerlukan koordinasi serta upaya perbaikan bersama agar target kinerja pada triwulan berikutnya dapat dicapai.

Deskripsi keberhasilan apabila tercapai target, jika tidak tercapai apa yang menjadi akar masalah (Mengapa hal tersebut terjadi ?)

1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar **volume atau jumlah** produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal **yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan** yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten
2. Capaian indikator dihitung berdasarkan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di sektor produksi primer dan penilaian tingkat efektifitas terhadap unit usaha untuk memastikan produk hasil perikanan yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan terhadap dimensi pengendalian mutu dan dimensi pengawasan mutu
3. Pada Triwulan II Tahun 2026, Balai PPMHKP Balikpapan telah melaksanakan kegiatan sertifikasi dan berhasil menerbitkan 2 (dua) Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di atas Kapal sebagai bentuk pengendalian mutu pada sektor perikanan tangkap.
4. Capaian indikator dihitung setiap triwulan
5. Realisasi terhadap IKU Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan TW II Tahun 2026 sebesar 74.20 % berdasarkan Surat Kepala Pusat Mutu Pasca Panen Nomor B.607/BPPMHKP.3/RC.610/VII/2026 tanggal 13 Juli 2026 tentang Capaian Indikator Kinerja “Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan” Triwulan II Tahun 2026 dengan data sebagai berikut :
   - Tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CBIB (A) sebesar 70 %
   - Tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB (B) sebesar 71 %
   - Tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPIB di Kapal (C) sebesar 90 %
   - Tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPPIB (D) sebesar 70 %

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CPOIB (E) sebesar 70 %
- Tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan CDOIB (F) sebesar 70 %

$$\% X = \frac{A + B + C + D + E + F}{xn}$$

$$= \frac{70 + 71 + 90 + 70 + 70 + 70}{6}$$

$$= 74.20\ \%$$

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto / dokumentasi

1. Melaksanakan Sertifikasi CPIB di Kapal pada KM. Sukses Bahagia II pada tanggal 6 Mei 2026 dan pada KM. Sukses Bahagia III tanggal 11 Juni 2026 di Kota Balikpapan.

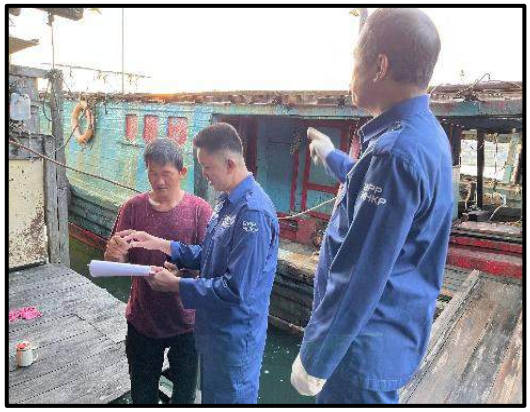

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Koordinasi dengan instansi terkait dalam mendukung penyelesaian kendala yang dihadapi pelaku usaha pada proses sertifikasi yaitu :
   - Satuan Pelayanan Balai Pengelolaan Kelautan Balikpapan, Satuan Pelayanan Pengelolaan Ruang Laut Balikpapan tanggal 24 Juni 2026 dan
   - Satuan Kerja PSDKP Balikpapan tanggal 25 Juni 2026 guna memastikan keselarasan pelaksanaan tugas dan fungsi serta mendukung efektivitas penyelenggaraan layanan

Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
1. Melaksanakan percepatan sertifikasi pada unit usaha yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. 2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam mendukung penyelesaian kendala yang dihadapi pelaku usaha pada proses sertifikasi. 3. Melaksanakan atau mengikuti pelatihan teknis secara berkala guna meningkatkan kompetensi petugas pengawas dan inspektur mutu dalam memenuhi standar mutu internasional yang terus berkembang.	Timja Pengendalian dan Pengawasan Produksi Primer

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Berdasarkan rekomendasi rencana aksi Triwulan I, pada Triwulan II telah dilakukan tindak lanjut berupa : • Peningkatan koordinasi dan sinergi lintas unit kerja melalui pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Pelayanan Balai Pengelolaan Kelautan Balikpapan, Satuan Pelayanan Pengelolaan Ruang Laut Balikpapan, dan Satuan Kerja PSDKP Balikpapan guna memastikan keselarasan pelaksanaan tugas dan fungsi serta mendukung efektivitas penyelenggaraan layanan • Keikutsertaan dalam pelatihan teknis bagi petugas pengawas dan inspektur mutu untuk peningkatan kompetensi telah dilaksanakan. • Rekomendasi terkait pelaksanaan sosialisasi perubahan kelembagaan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan serta pelaksanaan atau keikutsertaan dalam pelatihan teknis bagi petugas pengawas dan inspektur mutu belum dapat direalisasikan pada Triwulan II dan akan diupayakan pelaksanaannya pada periode berikutnya sesuai dengan rencana kerja, ketersediaan jadwal pelatihan.	Timja Pengendalian dan Pengawasan Produksi Primer

Balikpapan, 14 Juli 2026
Plh. Kepala Balai PPMHKP Balikpapan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BALIKPAPAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Frederica Ethis Maharani

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id EMAIL bppmhkp@kkp.go.id

Nomor : B. 607/BPPMHKP.3/RC.610/VII/2026 13 Juli 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Capaian Indikator Kinerja "Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan" Triwulan II Tahun 2026

Yth. (Daftar Terlampir)
di Tempat

Sehubungan dengan Penilaian Capaian Indikator Kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Triwulan II tahun 2026, dengan ini kami sampaikan nilai capaian Tingkat Efektifitas Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pusat Mutu Produksi Primer Triwulan II Tahun 2026 untuk digunakan sebagai data pendukung IKU UPT yaitu Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan. (sebagaimana rincian terlampir).

Demikian kami menyampaikan, atas perkenan dan dukungan baik yang diberikan, kami mengucapkan terimakasih.

Kepala Pusat Mutu Produksi Primer

Ditandatangani
Secara Elektronik

Muhammad Hatta Arisandi

Tembusan:
1. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
2. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Surat
Nomor : B. 607/BPPMHKP.3/RC.610/VII/2026
Tanggal : 13 Juli 2026

A. Daftar Nama Penerima

1. Kepala Balai Besar PPMHKP Surabaya I;
2. Kepala Balai PPMHKP Medan I;
3. Kepala Balai PPMHKP Tanjung Pinang;
4. Kepala Balai PPMHKP Lampung;
5. Kepala Balai PPMHKP Jakarta;
6. Kepala Balai PPMHKP Semarang;
7. Kepala Balai PPMHKP Surabaya II;
8. Kepala Balai PPMHKP Entikong;
9. Kepala Balai PPMHKP Balikpapan;
10. Kepala Balai PPMHKP Banjarbaru;
11. Kepala Balai PPMHKP Tarakan;
12. Kepala Balai PPMHKP Denpasar;
13. Kepala Balai PPMHKP Mataram;
14. Kepala Balai PPMHKP Makassar;
15. Kepala Balai PPMHKP Manado;
16. Kepala Balai PPMHKP Ambon;
17. Kepala Balai PPMHKP Jayapura;
18. Kepala Stasiun PPMHKP Banda Aceh;
19. Kepala Stasiun PPMHKP Medan II;
20. Kepala Stasiun PPMHKP Tanjung Balia Asahan;
21. Kepala Stasiun PPMHKP Padang;
22. Kepala Stasiun PPMHKP Pekanbaru;
23. Kepala Stasiun PPMHKP Jambi;
24. Kepala Stasiun PPMHKP Palembang;
25. Kepala Stasiun PPMHKP Bengkulu;
26. Kepala Stasiun PPMHKP Pangkalpinang;
27. Kepala Stasiun PPMHKP Batam;
28. Kepala Stasiun PPMHKP Merak;
29. Kepala Stasiun PPMHKP Bandung;
30. Kepala Stasiun PPMHKP Cirebon;
31. Kepala Stasiun PPMHKP Yogyakarta;
32. Kepala Stasiun PPMHKP Pontianak;
33. Kepala Stasiun PPMHKP Palangkaraya;
34. Kepala Stasiun PPMHKP Kupang;
35. Kepala Stasiun PPMHKP Bima;
36. Kepala Stasiun PPMHKP Mamuju;
37. Kepala Stasiun PPMHKP Palu;
38. Kepala Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai;
39. Kepala Stasiun PPMHKP Kendari;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

40. Kepala Stasiun PPMHKP Baubau;
41. Kepala Stasiun PPMHKP Gorontalo;
42. Kepala Stasiun PPMHKP Tahuna;
43. Kepala Stasiun PPMHKP Ternate;
44. Kepala Stasiun PPMHKP Sorong;
45. Kepala Stasiun PPMHKP Merauke

Kepala Pusat Mutu Produksi Primer

Ditandatangani
Secara Elektronik

Muhammad Hatta Arisandi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Nomor : B. 607/BPPMHKP.3/RC.610/VII/2026
Tanggal : 13 Juli 2026

A. Data Rekapitulasi Tingkat Efektifitas Sertifikasi Primer UPT lingkup BPPMHKP TW II 2026

No	Satuan Kerja	Target (%)	TE CBIB	TE CPIB	TE CDOIB-CPOIB	TE CPPIB	TE CPIB Kapal	Realisasi IKU UPT	% Capaian IKU UPT
1	Balai Besar PPMHKP Surabaya I	72,00	90,00	90,00	86,67	70,00	90,00	85,33	118,52%
2	Balai PPMHKP Medan I	72,00	75,00	70,00	80,00	93,33	70,00	77,67	107,87%
3	Balai PPMHKP Tanjung Pinang	72,00	95,83	70,00	70,00	70,00	85,00	78,17	108,56%
4	Balai PPMHKP Lampung	72,00	71,00	71,00	70,00	70,00	70,00	70,40	97,78%
5	Balai PPMHKP Jakarta	72,00	90,00	90,00	90,00	70,00	90,00	86,00	119,44%
6	Balai PPMHKP Semarang	72,00	90,00	88,33	70,00	70,00	70,00	77,67	107,87%
7	Balai PPMHKP Surabaya II	72,00	90,00	90,00	90,00	70,00	70,00	82,00	113,89%
8	Balai PPMHKP Entikong	72,00	85,00	65,00	65,00	65,00	65,00	69,00	95,83%
9	Balai PPMHHKP Balikpapan	72,00	70,00	71,00	70,00	70,00	90,00	74,20	103,06%
10	Balai PPMHKP Banjarbaru	72,00	71,00	71,00	70,00	70,00	70,00	70,40	97,78%
11	Balai PPMHKP Tarakan	72,00	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00	76,00	105,56%
12	Balai PPMHKP Denpasar	72,00	90,00	90,00	70,00	70,00	90,00	82,00	113,89%
13	Balai PPMHKP Mataram	72,00	89,44	71,00	70,00	70,00	70,00	74,09	102,90%
14	Balai PPMHKP Manado	72,00	70,00	71,00	70,00	73,33	88,33	74,53	103,52%
15	Balai PPMHKP Makassar	72,00	100,00	70,00	70,00	70,00	90,00	80,00	111,11%
16	Balai PPMHKP Ambon	72,00	70,00	71,00	70,00	70,00	88,33	73,87	102,59%
17	Balai PPMHKP Jayapura	72,00	85,00	85,00	65,00	65,00	83,00	76,60	106,39%
18	Stasiun PPMHKP Banda Aceh	72,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	97,22%
19	Stasiun PPMHKP Medan II	72,00	90,00	70,00	70,00	73,33	90,00	78,67	109,26%
20	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	72,00	90,00	70,00	70,00	70,00	70,00	74,00	102,78%
21	Stasiun PPMHKP Padang	72,00	70,00	70,00	65,00	65,00	65,00	67,00	93,06%
22	Stasiun PPMHKP Pekanbaru	72,00	75,83	66,00	65,00	65,00	65,00	67,37	93,56%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Satuan Kerja	Target (%)	TE CBIB	TE CPIB	TE CDOIB-CPOIB	TE CPPIB	TE CPIB Kapal	Realisasi IKU UPT	% Capaian IKU UPT
23	Stasiun PPMHKP Jambi	72,00	88,33	80,00	70,00	80,00	70,00	77,67	107,87%
24	Stasiun PPMHKP Palembang	72,00	88,33	70,00	70,00	70,00	66,67	73,00	101,39%
25	Stasiun PPMHKP Bengkulu	72,00	90,00	70,00	65,00	65,00	65,00	71,00	98,61%
26	Stasiun PPMHKP Pangkalpinang	72,00	90,00	70,00	70,00	70,00	70,00	74,00	102,78%
27	Stasiun PPMHKP Batam	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
28	Stasiun PPMHKP Merak	72,00	89,17	90,00	70,00	90,00	70,00	81,83	113,66%
29	Stasiun PPMHKP Bandung	72,00	83,89	66,00	65,00	65,00	65,00	68,98	95,80%
30	Stasiun PPMHKP Cirebon	72,00	90,00	70,00	70,00	70,00	65,00	73,00	101,39%
31	Stasiun PPMHKP Yogyakarta	72,00	100,00	70,00	70,00	70,00	87,50	79,50	110,42%
32	Stasiun PPMHKP Pontianak	72,00	72,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,40	97,78%
33	Stasiun PPMHKP Palangkaraya	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
34	Stasiun PPMHKP Kupang	72,00	90,00	71,00	70,00	70,00	70,00	74,20	103,06%
35	Stasiun PPMHKP Bima	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
36	Stasiun PPMHKP Mamuju	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
37	Stasiun PPMHKP Palu	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
38	Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai	72,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	97,22%
39	Stasiun PPMHKP Kendari	72,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	97,22%
40	Stasiun PPMHKP Baubau	72,00	77,00	70,00	70,00	70,00	90,00	75,40	104,72%
41	Stasiun PPMHKP Gorontalo	72,00	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	66,40	92,22%
42	Stasiun PPMHKP Tahuna	72,00	85,00	65,00	65,00	65,00	83,33	72,67	100,93%
43	Stasiun PPMHKP Ternate	72,00	83,33	65,00	65,00	65,00	85,00	72,67	100,93%
44	Stasiun PPMHKP Sorong	72,00	65,00	65,00	70,00	70,00	70,00	68,00	94,44%
45	Stasiun PPMHKP Merauke	72,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	90,28%
	Jumlah		3622,17	3237,33	3141,67	3135,00	3332,17	3293,67	
	%Realisasi IKU Primer		80,49	71,94	69,81	69,67	74,05	73,19	
	% Capaian IKU Primer		113,37	102,77	93,09	92,89	102,84	101,66	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Realisasi Indikator Kinerja Pusat Mutu Produksi Primer :
   Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan sebesar 73,19%

2. Capaian Indikator Kinerja Pusat Mutu Produksi Primer :
   Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan dengan target 72% adalah 101,65%

   Rumus (realisasi/target x 100%)= (73,19/72) x 100% = 101,65%

B. Link Drive

Sertifikasi CDOIB−CPOIB dan CPPIB

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mFm5vKwRPEJiVJM9yAYjitthzuRKi9N0/edit?gid=2020555697#gid=2020555697

Sertifikasi CPIB Kapal
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TNIUPD_Zudp61bfvNAdG0−wXvNfSoX−0/edit?usp=sharing&ouid=102833906237343655433&rtpof=true&sd=true

Sertifikasi CBIB – CPIB

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12Jr37pkKR62Y5NWFwiAbgrL1Xy-ieaqBEDhd42B_rhA/edit?usp=sharing

Manual IKU Pusat Mutu Produksi Primer 2026
https://drive.google.com/file/d/1zHOyWrDwH1−E3VDI3iI15DUm3Q8atCnV/view?usp=sharing

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK)
BALAI PPMHKP BALIKPAPAN

NAMA INDIKATOR : PERSENTASE HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKTOR PRODUKSI PASCA PANEN YANG MEMENUHI STANDAR MUTU DAN KEAMANAN PANGAN LINGKUP BALAI PPMHKP BALIKPAPAN
NAMA TIMJA : PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PASCA PANEN
PERIODE LAPORAN : TRIWULAN II / 2026

Nama Sasaran Kegiatan	**:**	**Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan**
Nama Indikator Kinerja	**:**	**Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan**

T / R	**Tahun 2025**							**Capaian Tahun 2025**	**Target Tahun 2025**
	Q1	**Q2**	**SM. 1**	**Q3**	**Q4**	**SM. 2**	**Tahunan**		
Target (%)	72	72	72						72
Realisasi (%)	83.34	83.13	83.13						
% Capaian	115.75	115.46	115.46						

Catatan :
Q1, Q2, Q3, Q4 : Capaian selama triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4
SM. 1 : Capaian Q1 + Capaian Q2
SM. 2 : Capaian Q3 + Capaian Q4
Tahunan : Capaian di akhir tahun 2024

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya ?)

- Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen adalah pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu terhadap unit usaha yang telah menerapkan program persyaratan dasar, manajemen keamanan pangan berbasis HACCP dan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
- Pengendalian mutu adalah semua kegiatan yang meliputi inspeksi, surveilen dan pengambilan contoh dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
- Pengawasan mutu adalah kegiatan untuk melihat konsistensi terhadap penerapan standar dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melalui kegiatan surveilen.
- Tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu adalah ukuran pelaksanaan sistem pengendalian dan pengawasan mutu yang dilakukan oleh pemerintah terhadap unit usaha untuk memastikan produk hasil perikanan yang dihasilkan memenuhi standar mutu dan keamanan pangan, ditetapkan melalui penilalian terhadap dimensi pengendalian mutu dan dimensi pengawasan mutu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Terdapat isu utama yaitu :

1. Sertifikasi HACCP pada pelaku saha merupakan bentuk kepatuhan terhadap persyaratan oleh UPI yang bersifat wajib (*mandatory*) dan mutlak apabila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanan
2. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi produk hasil kelautan dan perikanan dari hulu ke hilir wajib memperhatikan persyaratan dan KBLI yang sesuai dengan PP terbaru

Deskripsi keberhasilan apabila tercapai target, jika tidak tercapai apa yang menjadi akar masalah (Mengapa hal tersebut terjadi ?)

1. Capaian indikator diperoleh dengan menghitung persentase tingkat efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada unit usaha yang menerapkan SKP, HACCP dan SPDI. dibagi dengan jumlah dari unsur pembentuk
2. Capaian indikator dihitung setiap triwulan
3. Realisasi terhadap IKU Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan TW II Tahun 2026 sebesar 82.92 % berdasarkan Surat Kepala Pusat Mutu Pasca Panen Nomor B.2537/BPPMHKP.4/RC.610/VII/2026 tanggal 13 Juli 2026 tentang Nilai Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen Triwulan II dengan data sebagai berikut :
   - Efektifitas pengendalian dan pengawasan HACCP di UPI (**A**) sebesar 90.83 %
   - Efektifitas pengendalian dan pengawasan SKP di UPI dan UMKM (B) sebesar 88.22 %
   - Efektifitas pengendalian dan pengawasan SPDI di pelaku usaha perikanan (C) sebesar 75 %
   - Berdasarkan data efektifitas pengendalian dan pengawasan HACCP, SKP dan SPDI tersebut maka capaian untuk IKU Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Triwulan II adalah sebesar 82.92 %

$$\% X = \frac{A + B + C}{xn}$$

$$= \frac{90.83 + 88.22 + 75}{2}$$

$$= 82.92 \ \%$$

4. Nilai capaian sampai dengan Juni 2026 atau Semester I Tahun 2026 sebesar 83.13 % atau memiliki pencapaian sebesar 115.46 %

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto / dokumentasi

1. Melakukan pengendalian penerapan jaminan mutu di Unit Pengolahan Ikan (UPI) melalui kegiatan inspeksi dan surveilen penerapan HACCP.
   a. Kegiatan inspeksi dilakukan pada Bulan Mei 2026 pada 1 UPI sebanyak 2 ruang lingkup produk dan Bulan Juni 2026 pada 1 UPI sebanyak 3 ruang lingkup produk yaitu :
      - Tanggal 20 Mei 2026, dilakukan secara online (*Remote Inspection*) pada UPI PT. Ocean Paradise Fishery, dengan 2 ruang lingkup produk yaitu :
        1) Frozen Shrimp
        2) Frozen Demersal Fish

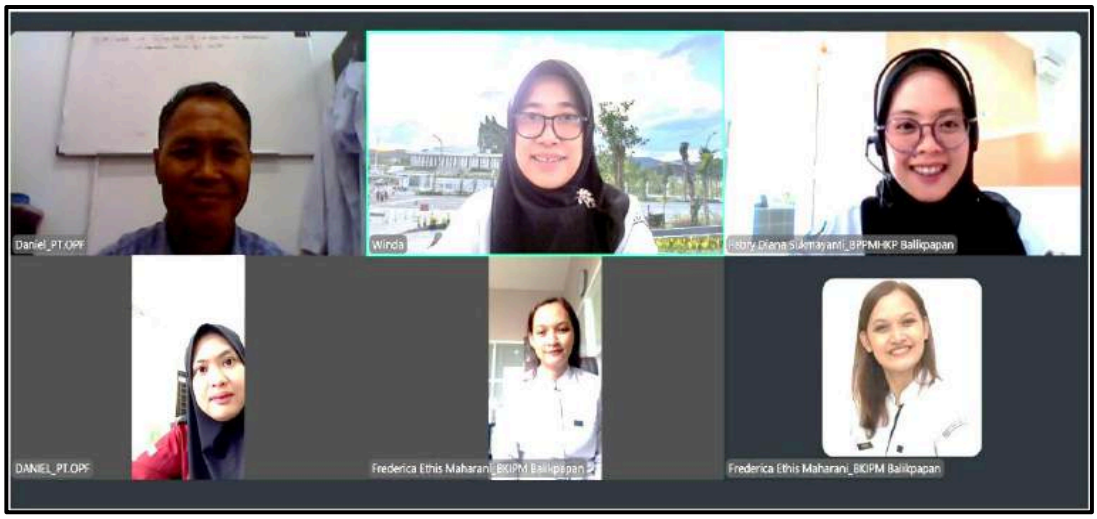

- Tanggal 24 Juni 2026, dilakukan secara *On-site* pada PT. Atlas Agung Abadi (Unit Manggar) dengan 3 ruang lingkup produk yaitu :
  1) Live Crab
  2) Live Eel
  3) Live Lobster

b. Pelaksanaan surveilen pada Bulan Mei 2026 telah dilakukan pada 5 Unit Pengolahan Ikan (UPI). Terdapat 2 UPI yang tidak dilakukan surveilen penerapan HACCP disebabkan tidak ada proses produksi yaitu PT. Borneo Ocean Nauly dengan ruang lingkup Dried Seaweed dan 1 UPI CV. Multi Sarana Jaya dengan ruang lingkup Dried Seaweed tidak dilakukan surveilen karena proses pengajuan sertifikasi HACCP. Adapun surveilen UPI telah dilakukan pada UPI sebagai berikut :
   1) PT. Ocean Paradise Fishery
   2) PT. Nusaybah Alby Saing
   3) CV. Tiga A (Unit Manggar)
   4) CV. Tiga A (Unit Kampung Baru)
   5) PT. Samudra Manggala Abadi

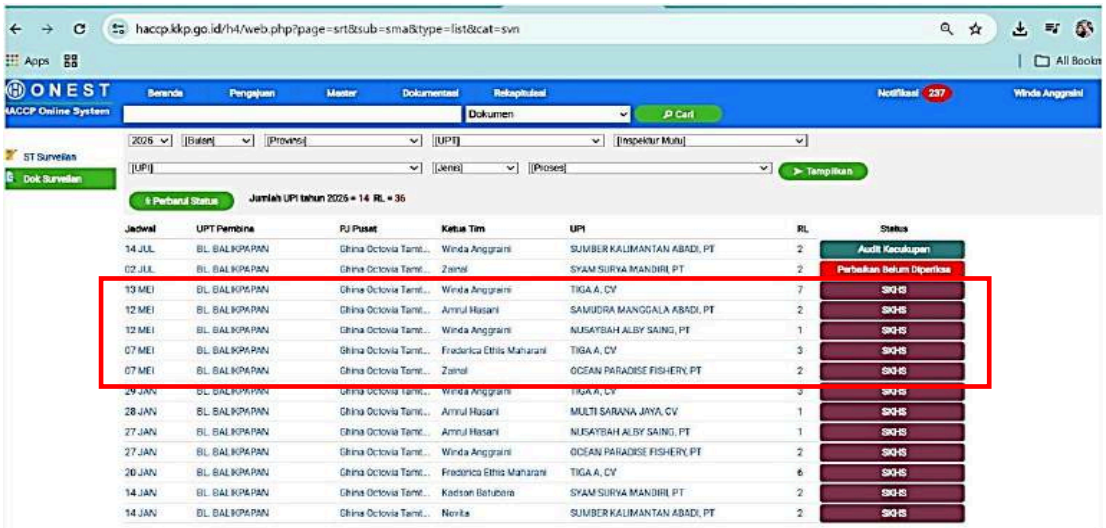

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Pelaksanaan sertifikasi pelaksanaan GMP dan SSOP di UPI dan UMKM melalui inspeksi secara langsung (*on* site) dan online (*remote inspection*)
   - Inspeksi secara online yaitu pada UPI atas nama :
     - ✓ Siti Fatimah pada tanggal 05 Mei 2026 dengan 1 ruang lingkup produk yaitu Fish Amplang
     - ✓ Umiyatun pada tanggal 08 Mei 2026 dengan 1 ruang lingkup produk yaitu Fish Amplang
     - ✓ Nur Apni pada tanggal 21 Mei 2026 dengan 1 ruang lingkup produk yaitu Fish Pempek

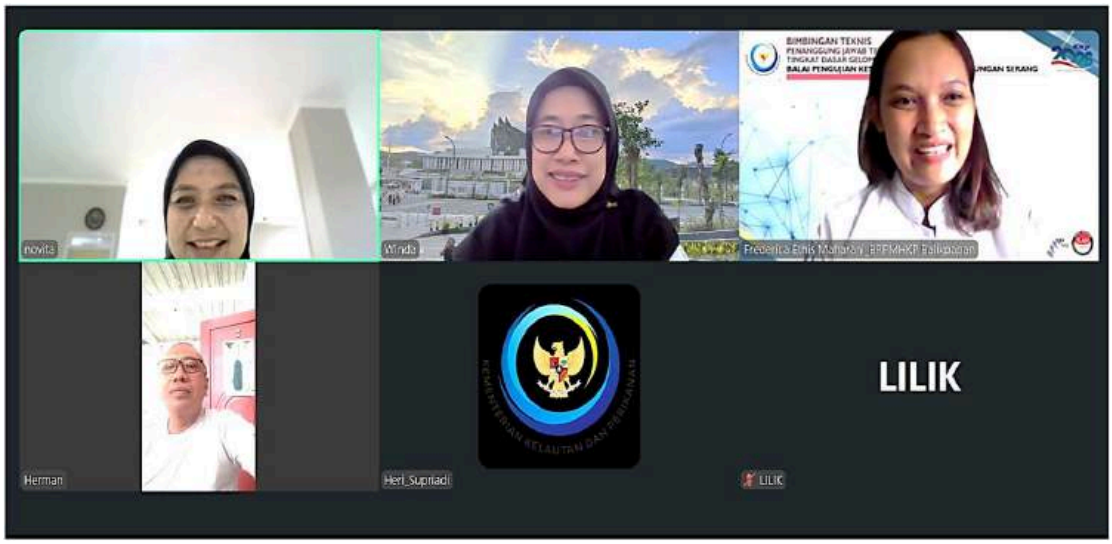

3. Pelaksanaan Sosialisasi Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI), Bimbingan Teknis Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) dan Penyusunan Panduan CDIB pada tanggal 10 Juni 2026.
   - Kegiatan ini diselenggarakan oleh Balai PPMHKP Balikpapan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), dilakukan secara daring dan luring (via zoom), dihadiri oleh Inspektur Mutu lingkup Balai PPMHKP Balikpapan, Dinas Perikanan lingkup Kalimantan Timur serta pelaku saha perikanan.

- Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang prosedur Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) dan pelaksanaan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) di pelaku usaha perikanan serta menjadi sarana percepatan sertifikasi khususnya sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI)

Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya	**Penanggung Jawab**
1. Melakukan koordinasi dengan pelaku usaha dan instansi teknis yang melakukan pembinaan jaminan mutu pada pelaku usaha perikanan sebagai kegiatan pendukung sertifikasi HACCP, SKP dan SPDI	Timja Pengendalian dan Pengawasan Pasca Panen

Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	**Penanggung Jawab**
1. Telah dilakukan koordinasi dengan pelakuu saha dan instansi terkait yang melakukan pembinaan untuk percepatan kegiatan sertifikasi 2. Inspektur Mutu Balai PPMHKP Balikpapan telah mengikuti kegiatan sosialisasi maupun pelatihan secara daring untuk meningkatkan kompetensi personil	Timja Pengendalian dan Pengawasan Pasca Panen

Balikpapan, 14 Juli 2026
Plh. Kepala Balai PPMHKP Balikpapan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BALIKPAPAN
REPUBLIK INDONESIA

Frederica Ethis Maharani

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id SUREL set.bppmhkp@kkp.go.id

Nomor : B.2537/BPPMHKP.4/RC.610/VII/2026 13 Juli 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Nilai Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pascapanen Triwulan II Tahun 2026

Yth. (Daftar Terlampir)

Dalam rangka pengukuran dan pelaporan kinerja di lingkungan BPPMHKP periode Triwulan II Tahun 2026, bersama ini terlampir disampaikan nilai pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pascapanen untuk digunakan sebagai data pengukuran IKU UPT, yaitu Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Mutu Pascapanen

Ditandatangani
Secara Elektronik

Catur Sarwanto

Tembusan:
Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran
Nomor : B.2537/BPPMHKP.4/RC.610/VII/2026
Tanggal : 13 Juli 2026

DAFTAR NAMA PEJABAT BPPMHKP

1. Kepala Balai Besar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya
2. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Medan I
3. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tanjung Pinang
4. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Lampung
5. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jakarta
6. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Semarang
7. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Surabaya II
8. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Entikong
9. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan
10. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Banjarbaru
11. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tarakan
12. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Denpasar
13. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mataram
14. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar
15. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Manado
16. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon
17. Kepala Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jayapura
18. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Banda Aceh

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

19. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Medan II
20. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tanjung Balai Asahan
21. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Padang
22. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pekanbaru
23. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Jambi
24. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palembang
25. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu
26. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pangkalpinang
27. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Batam
28. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merak
29. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bandung
30. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Cirebon
31. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Yogyakarta
32. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Pontianak
33. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palangkaraya
34. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kupang
35. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bima
36. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mamuju
37. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Palu
38. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Luwuk Banggai
39. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kendari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

40. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Baubau
41. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Gorontalo
42. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Tahuna
43. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ternate
44. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sorong
45. Kepala Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Merauke

Kepala Pusat Mutu Pascapanen

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ditandatangani Secara Elektronik

Catur Sarwanto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NILAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEKTOR PASCAPANEN
TRIWULAN 2 TAHUN 2026

No	UPT	Target	TE SKP	TE HACCP	TE SPDI	Nilai Capaian IKU UPT
1	Balai Besar PPMHKP Surabaya I	72%	86,95	93,62	87,50	90,56
2	Balai PPMHKP Ambon	72%	85,93	94,26	75,00	84,63
3	Balai PPMHKP Balikpapan	72%	88,22	90,83	75,00	82,92
4	Balai PPMHKP Banjarbaru	72%	95,74	97,50	86,70	92,10
5	Balai PPMHKP Denpasar	72%	91,42	86,42	75,00	80,71
6	Balai PPMHKP Entikong	72%	94,44	75,00	75,00	75,00
7	Balai PPMHKP Jakarta	72%	92,39	94,36	87,80	91,08
8	Balai PPMHKP Jayapura	72%	77,78	77,78	62,50	70,14
9	Balai PPMHKP Lampung	72%	83,34	91,67	75,00	83,34
10	Balai PPMHKP Makassar	72%	96,44	95,78	87,50	91,64
11	Balai PPMHKP Manado	72%	89,29	91,24	62,50	76,87
12	Balai PPMHKP Mataram	72%	98,34	98,34	75,00	86,67
13	Balai PPMHKP Medan I	72%	92,28	93,24	62,50	77,87
14	Balai PPMHKP Semarang	72%	90,25	93,34	87,50	90,42
15	Balai PPMHKP Surabaya II	72%	86,61	88,22	87,50	87,86
16	Balai PPMHKP Tanjungpinang	72%	97,22	95,00	75,00	85,00
17	Balai PPMHKP Tarakan	72%	89,22	70,00	75,00	72,50
18	Stasiun PPMHKP Aceh	72%	97,00	77,78	87,50	82,64
19	Stasiun PPMHKP Bandung	72%	88,15	90,93	87,50	89,21
20	Stasiun PPMHKP Batam	72%	77,78	98,34	62,50	80,42
21	Stasiun PPMHKP Bau-Bau	72%	75,54	54,43	75,00	64,72
22	Stasiun PPMHKP Bengkulu	72%	88,89	93,89	87,50	90,70
23	Stasiun PPMHKP Bima	72%	68,33	68,33	75,00	71,67
24	Stasiun PPMHKP Cirebon	72%	92,22	98,34	87,50	92,92
25	Stasiun PPMHKP Gorontalo	72%	89,77	70,33	75,00	72,67
26	Stasiun PPMHKP Jambi	72%	95,56	77,78	75,00	76,39
27	Stasiun PPMHKP Kendari	72%	74,08	65,18	75,00	70,09
28	Stasiun PPMHKP Kupang	72%	89,54	93,96	62,50	78,23
29	Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai	72%	86,86	66,68	75,00	70,84
30	Stasiun PPMHKP Mamuju	72%	77,78	77,78	87,50	82,64
31	Stasiun PPMHKP Medan II	72%	97,00	94,31	75,00	84,65
32	Stasiun PPMHKP Merak	72%	82,22	90,00	75,00	82,50
33	Stasiun PPMHKP Merauke	72%	54,43	54,43	62,50	58,47
34	Stasiun PPMHKP Padang	72%	88,38	88,10	62,50	75,30

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	UPT	Target	TE SKP	TE HACCP	TE SPDI	Nilai Capaian IKU UPT
35	Stasiun PPMHKP Palangkaraya	72%	77,78	77,78	75,00	76,39
36	Stasiun PPMHKP Palembang	72%	86,12	87,24	82,50	84,87
37	Stasiun PPMHKP Palu	72%	76,67	65,56	62,50	64,03
38	Stasiun PPMHKP Pangkalpinang	72%	97,22	96,67	62,50	79,58
39	Stasiun PPMHKP Pekanbaru	72%	96,11	77,78	62,50	70,14
40	Stasiun PPMHKP Pontianak	72%	95,93	77,78	75,00	76,39
41	Stasiun PPMHKP Sorong	72%	86,11	91,11	75,00	83,06
42	Stasiun PPMHKP Tahuna	72%	54,43	54,43	75,00	64,72
43	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	72%	93,67	93,33	75,00	84,17
44	Stasiun PPMHKP Ternate	72%	96,11	98,34	87,50	92,92
45	Stasiun PPMHKP Yogyakarta	72%	98,33	97,50	95,00	96,25

Kepala Pusat Mutu Pascapanen

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ditandatangani Secara Elektronik

Catur Sarwanto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK)
BALAI PPMHKP BALIKPAPAN

NAMA INDIKATOR : INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP UPT BALAI PPMHKP BALIKPAPAN
NAMA TIMJA : DUKUNGAN MANAJERIAL
PERIODE LAPORAN : TRIWULAN II / 2026

Nama Sasaran Kegiatan	**:**	**Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**
Nama Indikator Kinerja	**:**	**Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Balai PPMHKP Balikpapan**

T / R	**Tahun 2026**							**Capaian Tahun 2026**	**Target Tahun 2026**
	Q1	**Q2**	**SM. 1**	**Q3**	**Q4**	**SM. 2**	**Tahunan**		
Target (%)		75	75				82,5		82,5
Realisasi (%)		83,57	83,57						
Capaian (%)		111,4	111,43						

Catatan :
Q1, Q2, Q3, Q4 : Capaian selama triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4
SM. 1 : Capaian Q1 + Capaian Q2
SM. 2 : Capaian Q3 + Capaian Q4
Tahunan : Capaian di akhir tahun 2026

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya ?)

Indeks Profesionalitas ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana tingkat profesionalitas pegawai ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik, abdi negara, dan abdi masyarakat. Indeks Profesionalitas ASN Lingkuo UPT Balai PPMHKP Balikpapan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk Menilai kualitas sumber daya ASN secara objektif, Meningkatkan kinerja ASN melalui perbaikan dalam rekrutmen, pengembangan kompetensi, dan manajemen karier, Mendorong budaya kerja yang profesional dan berintegritas, Menyediakan data untuk perumusan kebijakan kepegawaian yang lebih tepat sasaran.

Berdasarkan kebijakan Badan Kepegawaian Negara (BKN), indeks ini biasanya diukur berdasarkan empat komponen utama:

1. Kualifikasi Pendidikan
   Menilai kesesuaian tingkat dan jurusan pendidikan ASN dengan jabatan yang diemban.
2. Kompetensi
   Meliputi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural yang dibutuhkan dalam jabatan ASN.
3. Kinerja
   Melihat hasil kerja ASN berdasarkan sistem penilaian kinerja yang berlaku (SKP – Sasaran Kinerja Pegawai).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Disiplin/Kepatuhan
   Mengukur kepatuhan ASN terhadap peraturan perundang-undangan, etika, dan tata tertib kedinasan.

Terdapat beberapa isu utama yaitu :

1. Rendahnya Nilai Kompetensi
   Skor kompetensi yang masih rendah, menandakan masih sedikit ASN yang mengikuti pelatihan teknis, fungsional, sertifikasi, atau workshop, serta rendahnya Matrix Nine Grid Box Talenta di beberapa pegawai.

2. Kinerja yang Perlu Perbaikan
   Skor kinerja relatif lebih baik dibanding dimensi lain, namun masih perlu didorong melalui sistem SKP yang lebih efektif, monitoring rutin, dan penguatan e-kinerja.

3. Kualifikasi Pendidikan Terbatas
   Mayoritas ASN masih berpendidikan SMA / D3 atau di bawahnya, dengan sedikit yang memiliki kualifikasi pendidikan lanjutan (S1/S2), sehingga skor di dimensi kualifikasi terbatas.

4. Kurangnya Disiplin
   Meski skor disiplin rendah relatif minor, inkonsistensi dalam catatan hukuman disiplin dan perilaku ASN tetap berpotensi menurunkan IPASN keseluruhan

Deskripsi keberhasilan apabila tercapai target, jika tidak tercapai apa yang menjadi akar masalah (Mengapa hal tersebut terjadi ?)

Target Indeks Profesionalitas ASN tahun 2026 adalah 82,5, dan target semester I adalah 75. untuk realisasi triwulan II ini 83,57 sehingga target tercapai. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor, diiantaranya :

1. Balai PPMHKP Balikpapan berhasil mencapai target Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) melalui komitmen yang kuat dalam peningkatan kompetensi, integritas, serta kinerja seluruh pegawai. Pencapaian ini merupakan hasil dari pelaksanaan strategi pembinaan SDM yang konsisten dan terukur.
2. Seluruh ASN di lingkungan Balai PPMHKP Balikpapan bertahap untuk memenuhi standar profesionalitas melalui partisipasi aktif dalam pelatihan, uji kompetensi, pengembangan jabatan fungsional, serta optimalisasi kinerja berbasis perencanaan dan evaluasi yang akuntabel. Selain itu, tingkat disiplin pegawai menunjukkan peningkatan signifikan seiring penerapan mekanisme pengawasan internal dan pembiasaan budaya kerja yang tertib dan produktif.
3. Adanya Training Need Analysis (TNA) yang disusun untuk semua pegawai, sehingga memudahkan untuk pengawasannya.
4. Semua pegawai berperan aktif untuk meningkatkan kompetensinya masing-masing, dengan meningkatkan Pendidikan, serta aktif mengikuti Pelatihan ataupun Bimtek.
5. Terkait Matrix Nine Grid Box Talenta, masih banyak Pegawai Balai PPMHKP Balikpapan belum dapat tercapai dan rata-rata di Grid Box 2 dan 5. Itu disebabkan karena pegawai belum mengikuti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

assessment dan uji kompetensi. Kedua kegiatan tersebut merupakan dasar dalam mengukur potensi dan kompetensi pegawai.

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto / dokumentasi

A. Kegiatan yang Mendukung Keberhasilan Pencapaian Indikator IP ASN

1. Pengembangan Kompetensi (Diklat, Bimtek, Pelatihan)

- Mengikuti Bimtek sesuai kompetensinya.

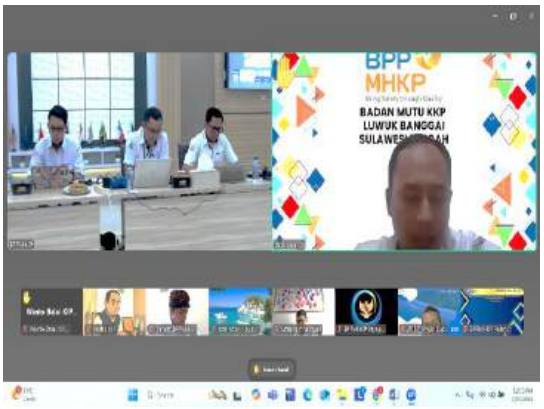

SERTIFIKAT
NOMOR 1382/BPPMHKP.1/TU.210/V/2026

Diberikan kepada

SUWANTO

Sebagai

Peserta

atas partisipasinya dalam kegiatan Penyelarasan dan Pengelolaan Kinerja Organisasi yang diselenggarakan oleh Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada tanggal 11 Mei 2026 selama 4 (empat) Jam Pelajaran

Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Ditandatangani Secara Elektronik

Dr. Ir. Woro Nur Endang Sariati, MP

- Penyusunan SKP Tahun 2026

2. Disiplin dan Perilaku Kerja

- Pengawasan kehadiran melalui aplikasi presensi elektronik (geotagging).
- Pembinaan kedisiplinan melalui apel pagi dan pengarahan rutin pimpinan.
- Adanya evaluasi terhadap pegawai yang terlambat masuk kerja, serta penegakan reward dan punishment bagi pegawai.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Pengusulan pegawai untuk mengikuti kegiatan uji kompetensi terkait : • Ijin Belajar (Peningkatan Kompetensi melalui Pendidikan) • Jabatan fungsional bagi yang belum JFT. • peningkatan Grid Box pada manajemen talenta pegawai.	Timja Dukungan Manajerial

Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Membuat rekapitulasi pegawai yang memiliki nilai kurang dari 5 pada kuadran manajemen talenta pegawai	Timja Dukungan Manajerial

Balikpapan, 14 Juli 2026
Plh. Kepala Balai PPMHKP Balikpapan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BALIKPAPAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Frederica Ethis Maharani

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

TANGKAP LAYAR IP ASN 2026 SATKER BALAI PPMHKP BALIKPAPAN TRIWULAN II TA. 2026

IP ASN 2026 Dashboard Eselon Pegawai FAQ Tahun 2026

Silakan ketik Nama Unit Kerj | Cari

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	80	22.62	90.48 %	27.93	69.83 %	25.62	85.4 %	5	100 %	81.18	TINGGI
2	PUSAT MANAJEMEN MUTU	32	23.12	92.48 %	30.03	75.08 %	25.31	84.37 %	5	100 %	83.47	TINGGI
3	PUSAT MUTU PRODUKSI PRIMER	32	22.97	91.88 %	32.03	80.08 %	25.94	86.47 %	5	100 %	85.94	TINGGI
4	PUSAT MUTU PASCAPANEN	35	22.43	89.72 %	30.51	76.28 %	25.86	86.2 %	5	100 %	83.8	TINGGI
5	BPPMHKP MAKASSAR	52	22.79	91.16 %	33.05	82.63 %	25.19	83.97 %	5	100 %	86.03	TINGGI
6	BPPMHKP DENPASAR	33	23.18	92.72 %	26.89	67.22 %	25.3	84.33 %	5	100 %	80.38	SEDANG
7	BPPMHKP SURABAYA I	60	22.67	90.68 %	29.53	73.83 %	25.08	83.6 %	5	100 %	82.28	TINGGI
8	BPPMHKP MEDAN I	28	22.5	90 %	30.79	76.97 %	25	83.33 %	5	100 %	83.29	TINGGI
9	BPPMHKP BALIKPAPAN	28	22.14	88.56 %	31.25	78.13 %	25.18	83.93 %	5	100 %	83.57	TINGGI
10	BPPMHKP JAYAPURA	16	22.5	90 %	29.42	73.55 %	25.31	84.37 %	5	100 %	82.23	TINGGI
11	BALAI KIPM JAKARTA II	60	22.08	88.32 %	26.35	65.88 %	25.17	83.9 %	5	100 %	78.6	SEDANG
12	BPPMHKP SURABAYA II	49	23.37	93.48 %	31.83	79.57 %	25.2	84 %	5	100 %	85.4	TINGGI
13	BPPMHKP MATARAM	28	23.39	93.56 %	29.41	73.52 %	26.07	86.9 %	5	100 %	83.88	TINGGI
14	BPPMHKP MANADO	28	22.68	90.72 %	28.46	71.15 %	26.43	88.1 %	4.86	97.2 %	82.43	TINGGI
15	BPPMHKP SEMARANG	43	23.6	94.4 %	29.07	72.67 %	25.12	83.73 %	5	100 %	82.79	TINGGI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama	NIP	Pangkat	Jabatan	Kinerja	Potensial	Nilai	Kuadra	Status UKOM	Berlaku
1	NOVITA S.St.Pi.	197911222006042011	Penata Tingkat I, III/d	IMUT AHLI MUDA	70	45	57.5	2	EXPIRED	2019-04-17
2	ARMANSYAH ARIANTO B.	198202232007011002	Penata Tingkat I, III/d	APK APBN AHLI MUDA	70	42	56	2	EXPIRED	2019-04-17
3	AMRUL HASANI SPi, M. Tr. Pi	198302062010011015	Penata Tingkat I, III/d	IMUT AHLI MUDA	70	43	56.5	2	EXPIRED	2020-09-06
4	ZAINAL S.Pi	198201312011011002	Penata, III/c	IMUT AHLI MUDA	66	42	54	2	MASIH	2026-10-28
5	HERI SUPRIADI	198001042003121005	Penata Muda Tk.I, III/b	ASISTEN IMUT MAHIR	70	43	56.5	2	EXPIRED	2019-04-17
6	SALMAH	197905152003122005	Penata Muda, III/a	PENATA LAKSANA B. TERAMPIL	70	40	55	2	EXPIRED	2019-04-17
7	SUWANTO	197802072007011004	Pengatur Tingkat I, II/d	PK APBN TERAMPIL	70	43	56.5	2	EXPIRED	2019-04-17
8	ERWIN NOER FAHLEFI S.Pi.	199009152024211005	Penata Muda, IX	IMUT AHLI PERTAMA	66	38	52	2	BELUM	
9	MARDIS AWALUDDIN S.H.	199412152025211044	Penata Muda, IX	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	66	38	52	2	BELUM	
10	SUHERMAN S.Pd.I.	198411062025211034	Penata Muda, IX	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	66	37	51.5	2	BELUM	
11	AKIL A.Md.Pi	198502232025211041	Pengatur, VII	PENGELOLA LAYANAN	66	36	51	2	BELUM	
12	WIDIARTI DIKA	198607142025212043	Pengatur Muda, V	OPERATOR LAYANAN	66	35	50.5	2	BELUM	
13	KASIYATI	199101232025212032	Pengatur Muda, V	PENGADMINISTRASI	66	35	50.5	2	BELUM	
14	UBIN MAHLUL AZMI	199102252025211028	Pengatur Muda, V	OPERATOR LAYANAN	66	35	50.5	2	BELUM	
15	AYU SABRINA	199601162025212037	Pengatur Muda, V	OPERATOR LAYANAN	66	35	50.5	2	BELUM	
16	ADHIWIRA NUGRAHA	199607082025211047	Pengatur Muda, V	OPERATOR LAYANAN	66	35	50.5	2	BELUM	
17	MOCHAMAD EKO Y.,	199706212025211023	Pengatur, VII	PENGELOLA LAYANAN	66	36	51	2	BELUM	
18	FRIZKA CHIKITA PATEH S.E.	199906042025212038	Penata Muda, IX	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	66	37	51.5	2	BELUM	
19	DANA KURNIAWAN A.Md.	198508292010121003	Penata, III/c	ARSIPARIS PENYELIA	66	65.92	65.96	5	MASIH	2027-02-27
20	TIKA WAHYU P., A.Md.	198912302010122002	Penata, III/c	ARSIPARIS PENYELIA	66	64.83	65.42	5	MASIH	2027-02-27
21	SITI HADIJAH	197906162002122002	Penata Muda Tk.I, III/b	BENDAHARA PENGELUARAN	70	61.75	65.88	5	MASIH	2026-12-09
22	ENDAH SINTA HERVINA	197510212005022001	Penata Muda, III/a	PK APBN TERAMPIL	70	65	67.5	5	MASIH	2026-12-09
23	FEBRY DIANA S., A.Md.	199602062025062001	Pengatur, II/c	ASISTEN IMUT TERAMPIL	66	78.88	72.44	5	MASIH	2028-02-25
24	FREDERIK SANDA	197302071997121001	Penata Tingkat I, III/d	PENGOLAH DATA LAPORAN	70	86	78	8	MASIH	2027-10-13
25	RAFLINA HERMAWAN A PI	197504172003122003	Penata Tingkat I, III/d	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	73	90.72	81.86	8	MASIH	2027-12-01
26	WINDA ANGGRAINI S.StPi	197910192003122005	Penata Tingkat I, III/d	IMUT AHLI MUDA	73	84.79	78.9	8	MASIH	2027-04-17
27	drh. FREDERICA ETHIS M.	198510282009122001	Penata Tingkat I, III/d	IMUT AHLI MUDA	69	85.26	77.13	8	MASIH	2027-12-01
28	EKO SULYSTIANTO S.Pi.,	197002111997031003	Pembina Utama Muda,	KEPALA BALAI PPMHKP	85	93.44	89.22	9	MASIH	2027-12-01

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK)
BALAI PPMHKP BALIKPAPAN

NAMA INDIKATOR : PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA
NAMA TIMJA : DUKUNGAN MANAJERIAL
PERIODE LAPORAN : TRIWULAN II / 2026

Nama Sasaran Kegiatan	**:**	**Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**
Nama Indikator Kinerja	**:**	**Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja**

T / R	**Tahun 2026**							**Capaian Tahun 2026**	**Target Tahun 2026**
	Q1	**Q2**	**SM. 1**	**Q3**	**Q4**	**SM. 2**	**Tahunan**		
Target (%)	86	86	86						86%
Realisasi (%)	100	100	100						
% Capaian	116,28	116,28	116,28						

Catatan :
Q1, Q2, Q3, Q4 : Capaian selama triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4
SM. 1 : Capaian Q1 + Capaian Q2
SM. 2 : Capaian Q3 + Capaian Q4
Tahunan : Capaian di akhir tahun 2024

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya ?)

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendukung kegiatan pengawasan dalam mengelola data pemantauan tindak lanjut secara real time antara Inspektorat Jenderal dengan satker yang diperiksa melalui Sistem Informasi Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (SIDAK) adalah aplikasi berbasis Web.

Modul Aplikasi SIDAK (SISTEM INFORMASI DATA TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAAN APIP KKP) dirancang dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam menjalankan aplikasi, serta membantu Inspektorat Jenderal dalam menjalankan tugasnya dengan lebih efektif.

Aplikasi SIDAK dapat diakses melalui url https://sidak.kkp.go.id Untuk akses yang optimal gunakan browser google chrome Saat mengakses url tersebut, Anda akan melihat langsung halaman login aplikasi

Terdapat beberapa isu utama yaitu :

1. Dokumen yang telah dirilis atau diupload pada aplikasi SIDAK bersifat RAHASIA, dimohon untuk tidak mempublikasikan dokumen ini secara publik.
2. Profiling User Management (Profil Pengguna Aplikasi SIDAK) sangat diperlukan untuk mengetahui akses pengguna aplikasi SIDAK. Dengan adanya profil pengguna akan sangat membantu admin dalam melihat pengguna sesuai dengan akses yang telah ditetapkan. Hal ini untuk menjaga agar akses LHP tetap terjaga keamanan dan kerahasiaannya. Dengan mengatahui data Pengguna, Admin dapat memetakan hak akses untuk setiap tingkatan unit kerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Deskripsi keberhasilan apabila tercapai target, jika tidak tercapai apa yang menjadi akar masalah (Mengapa hal tersebut terjadi ?)

1. Berdasarkan Surat Nota Dinas Nomor 955/ITJ.0/TU.140/VII/2026 dari Inspektorat Jenderal KKP tanggal 10 Juli 2026 hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode Triwulan II Tahun 2026 lingkup KKP sebesar 95,39% (tuntas 641 dari 672 rekomendasi)
2. Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pengawasan berfungsi untuk melihat data hasil laporan pengawasan yang telah dilklasifikasikan pada beberapa bentuk dokumen LHP yang resmi diterbitkan oleh Inspektorat Jenderal yaitu LHP bentuk BAB, Surat, Catatan Hasil Reviu ataupun Nota Dinas yang disampaikan kepada auditi dalam setiap kegiatan pengawasan.
3. Prosentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan berfungsi untuk menyajikan data prosentase tindak lanjut hasil pengawasan. Prosentase disajikan dalam diagram jarum jam yang merupakan capaian indikator kinerja TLHP. Jika capaianan melebihi target 80% akan memunculkan status SUKSES berwarna hijau sebaliknya jika kurang dari 80% akan memunculkan status FAILED berwarna merah.
4. Temuan Hasil Pengawasan berfungsi untuk melihat jumlah temuan/kejadian hasil pengawasan. Temuan hasil pengawasan diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok temuan yaitu Kepatuhan, Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, dan Efektifitas, Efisiensi dan Ekonomis
5. Jumlah Rekomendasi Pengawasan berfungsi untuk melihat jumlah rekomendasi/saran yang tertuang dalam laporan hasil pengawasan. Temuan hasil pengawasan diklasifikasikan ke dalam 4 kategori rekomendasi sesuai dengan status rakomendasi Tuntas, Proses, Pending, Temuan hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti (TPTD).
6. Nilai Temuan Keuangan berfungsi untuk melihat nilai temuan keuangan yang bersifat potensi kerugian keuangan negara yang berasal dari hasil kegiatan pengawasan. Pada fitur ini juga menampilkan nilai keuangan yang telah didindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Negara sehingga menggambarkan prosentase tindak lanjut temuan keuangan.
7. Capaian indikator dihitung setiap terdapat kegiatan pengawasan pada satker

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto / dokumentasi

Profil TLHP yang menampilkan profil temuan dengan status TUNTAS warna HIJAU, PROSES warna ORANGE, PENDING warna MERAH.

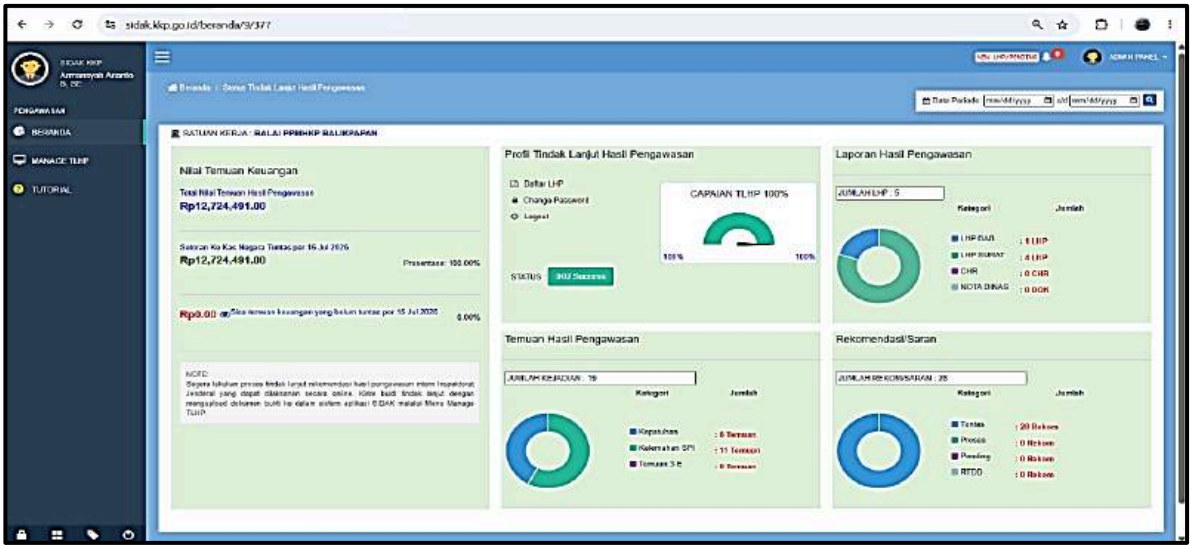

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
Memantau dan Menindak Lanjuti jika terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan pada aplikasi SIDAK	Timja Dukungan Manajerial

Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Tidak ada temuan BPK pada tahun anggaran 2026	Timja Dukungan Manajerial

Balikpapan, 14 Juli 2026
Plh. Kepala Balai PPMHKP Balikpapan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BALIKPAPAN
REPUBLIK INDONESIA

Frederica Ethis Maharani

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

TANGKAP LAYAR APLIKASI SIDAK SATKER BALAI PPMHKP BALIKPAPAN TRIWULAN II TA. 2026

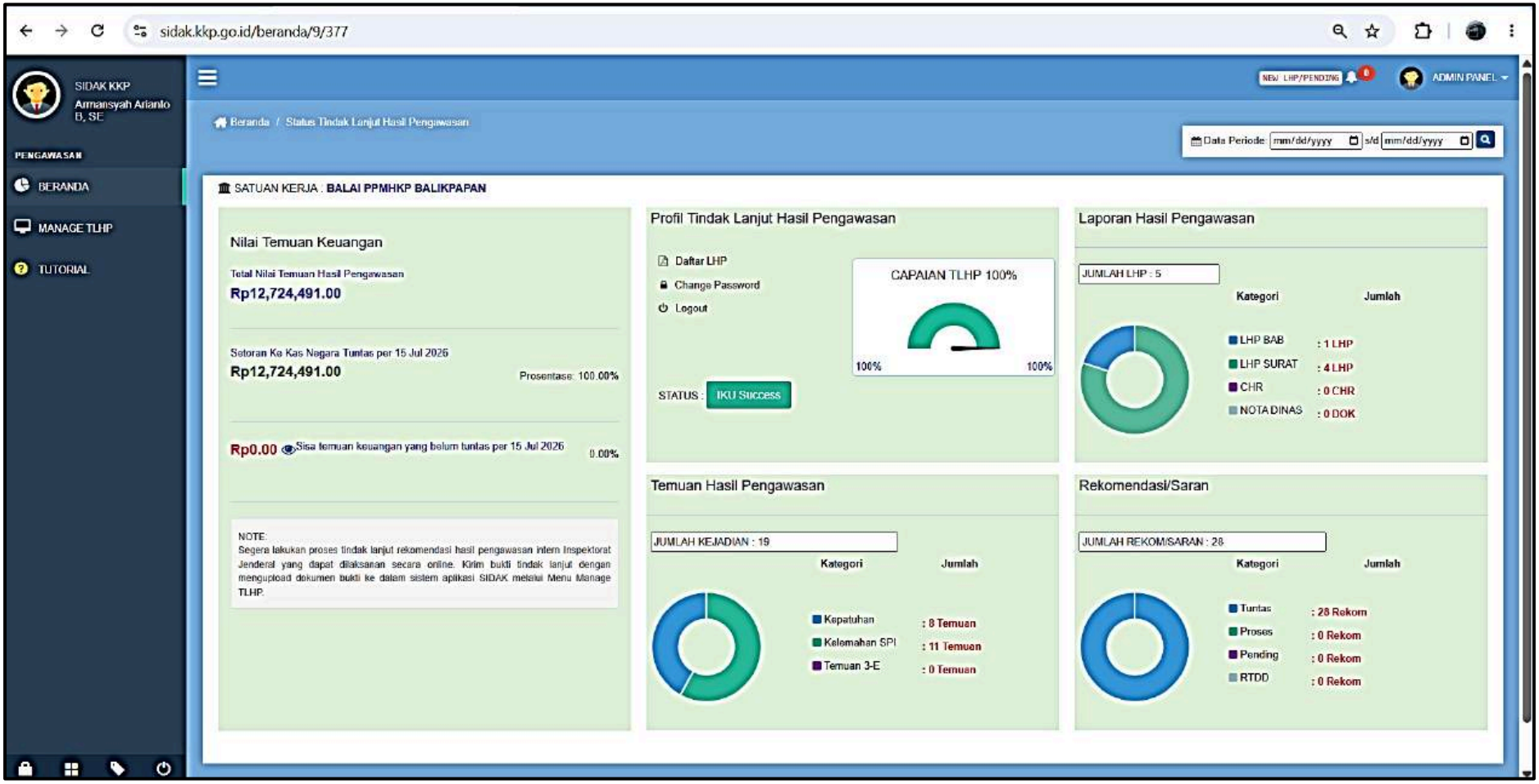

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 955/ITJ.0/TU.140/VII/2026

Yth. : 1. Para Kepala Biro Lingkup Sekretariat Jenderal
2. Para Kepala Pusat Lingkup Sekretariat Jenderal
3. Para Sekretaris Ditjen lingkup KKP
4. Para Sekretaris Badan lingkup KKP

Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Triwulan II Tahun 2026
Tanggal : 10 Juli 2026

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup KKP periode Triwulan II Tahun 2025, bersama ini disampaikan capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" sebagai berikut:

1. Capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2025 s.d. 31 Maret 2026 (Triwulan IV Tahun 2025 s.d.Triwulan I Tahun 2026) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon I sampai dengan 30 Juni Tahun 2026 (Triwulan II Tahun 2026).
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode Triwulan II Tahun 2026 lingkup KKP sebesar 95,39% (tuntas 641 dari 672 rekomendasi).
3. Rincian capaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dari masing-masing unit eselon I disampaikan pada lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani
Secara Elektronik

Febry Budianto

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Para Direktur Jenderal lingkup KKP
4. Para Kepala Badan lingkup KKP
5. Para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal KKP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran
Nomor : 955/ITJ.0/TU.140/VII/2026
Tanggal : 10 Juli 2026

Data Rekapitulasi Capaian IKU
"Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP" Periode Triwulan II Tahun 2026

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Sekretariat Jenderal	43	43	100,00	0	0,00
2	Ditjen PK	115	105	91,30	10	8,70
3	Ditjen PRL	13	13	100,00	0	0,00
4	Ditjen Perikanan Tangkap	115	99	86,09	16	13,91
5	Ditjen PSDKP	89	89	100,00	0	0,00
6	Ditjen Perikanan Budi Daya	170	165	97,06	5	2,94
7	BPPSDMKP	64	64	100,00	0	0,00
8	Ditjen PDSPKP	29	29	100,00	0	0,00
9	BPPMHKP	27	27	100,00	0	0,00
10	Inspektorat Jenderal	7	7	100,00	0	0,00
TOTAL		**672**	**641**	**95,39**	**31**	**4,61**

Ditandatangani
Secara Elektronik

Febry Budianto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK)
BALAI PPMHKP BALIKPAPAN

NAMA INDIKATOR : NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) LINGKUP BALAI PPMHKP BALIKPAPAN
NAMA TIMJA : DUKUNGAN MANAJERIAL
PERIODE LAPORAN : TRIWULAN II TAHUN 2026

Nama Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama Indikator Kinerja	:	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai PPMHKP Balikpapan

T / R	Tahun 2026							Capaian Tahun 2026	Target Tahun 2026
	Q1	Q2	SM. 1	Q3	Q4	SM. 2	Tahunan		
Target	-	83	83	-	92,1	92,1	92,1		92,1
Realisasi	-	99,59	99,59	-	-	-	-		
% Capaian	-	99,59	99,59	-	-	-	-		

Catatan :
Q1, Q2, Q3, Q4 : Capaian selama triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4
SM. 1 : Capaian Q1 + Capaian Q2
SM. 2 : Capaian Q3 + Capaian Q4
Tahunan : Capaian di akhir tahun 2024

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Pengukuran capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dilakukan atas penilaian dari berbagai aspek yaitu :

1. Kualitas perencanaan anggaran
   a. Revisi DIPA (10%)
   b. Deviasi Halaman III DIPA (15%)
2. Kualitas pelaksanaan anggaran
   a. Penyerapan Anggaran (20%)
   b. Belanja Kontraktual (10%)
   c. Penyelesaian Tagihan (10%)
   d. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
   e. Dispensasi SPM (menjadi pengurang nilai IKPA)
3. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran
   a. Capaian utput (25%)

Capaian nilai IKPA pada Triwulan II tahun 2026 sebesar 99,59 dari target 83 dengan rincian sebagai berikut :

1. Aspek kualitas perencanaan anggaran
   a. Revisi DIPA (10%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran Satker berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan oleh Satker dalam satu semester.
   Pada tahun 2026 tidak terdapat revisi yang mempengaruhi nilai IKPA sehingga capaiannya adalah :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

100 x 10% = 10

b. Deviasi Halaman III DIPA (15%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran Satker berdasarkan rata-rata nilai kinerja bulanan Deviasi Halaman III DIPA. Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan pada setiap jenis belanja dan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja, berdasarkan pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA yang disampaikan oleh Satker paling lambat pada hari kerja kesepuluh awal triwulan. Rata-rata deviasi kumulatif diperoleh dari nilai aplikasi *MyIntress* Kementerian Keuangan sampai Juni 2026 sebesar 100 sehingga nilai deviasi halaman III DIPA sebagai berikut :

Dengan demikian nilai Deviasi Halaman III DIPA adalah 100 x 15% = 15.

2. Aspek kualitas pelaksanaan anggaran

a. Penyerapan Anggaran (20%) merupakan indikator kinerja yang digunakan mengukur kualitas pelaksanaan anggaran Satker kesesuaian eksekusi belanja dengan target penyerapan anggaran triwulanan, dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Nilai kinerja, diperoleh dari rasio antara penyerapan terhadap target penyerapan setiap triwulan. Berdasarkan nilai penyerapan yang tertera pada aplikasi *MyIntress* Kementerian Keuangan sampai Juni 2026 sebesar 99,71 maka diperoleh bobot sebagai berikut : 99,71 x 20% = 19,94

b. Belanja kontraktual (10%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur upaya akselerasi belanja kontraktual pada Satker. Tahun 2026 tidak terdapat belanja kontraktual.

c. Penyelesaian tagihan (10%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian SPM-LS kontraktual Satker, dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS kontraktual terhadap seluruh SPM-LS kontraktual yang diajukan ke KPPN mitra. Pada tahun 2026 tidak terdapat belanja kontraktual sehingga tidak ada nilai untuk penyelesaian tagihan.

d. Pengelolaan UP dan TUP (10%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP, Persentase GUP, dan Setoran TUP. Nilai pengelolaan UP dan TUP tahun 2026 adalah 97,31 x 10% = 9,73

e. Dispensasi SPM (0%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kepatuhan Satker dalam menyampaikan SPM sesuai dengan batas waktu penyampaian SPM diakhir tahun anggaran yang diatur dalam ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran, dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN mitra di tahun 2026. Pada tahun 2026 tidak terdapat dispensasi SPM sehingga nilai dispensasi SPM adalah 0.

3. Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran

Capaian output (25%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian data dan ketercapaian output pada Satker, dihitung berdasarkan komposit nilai kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (bobot 30%), dan (2) Komponen capaian RO (bobot 70%).

Sampai dengan tahun 2026, perhitungan capaian output adalah sebagai berikut :

- Ketepatan waktu : 100 x 30% = 30

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Capaian RO : 100 x 70% = 70

Jumlah = 100

Dengan demikian nilai kinerja capaian output adalah 100 x 25% = 25%. Dari tiga aspek penilaian tersebut diperoleh nilai dengan rincian sebagai berikut :

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP Balikpapan Triwulan II TA 2026 sebesar 99,59.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPb

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
33	06 Juni	103	032	649792	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BAUBAU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	98,85 20 19,77	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	99,24 10 9,92	99,05	100,00 25 25,00	100,00	79,69	80,00%	0,00	99,62
34	06 Juni	015	032	649699	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKALPINANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	98,70 20 19,74	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	98,72 10 9,87	99,36	100,00 25 25,00	100,00	99,61	100,00%	0,00	99,61
35	06 Juni	047	032	567610	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BALIKPAPAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,71 20 19,94	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	97,31 10 9,73	98,51	100,00 25 25,00	100,00	79,67	80,00%	0,00	99,59
36	06 Juni	179	032	440822	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,64 20 19,93	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	95,57 10 9,56	98,89	100,00 25 25,00	100,00	99,49	100,00%	0,00	99,49

Terdapat beberapa isu utama yaitu :

1. Realisasi IKPA pada tahun 2026 Triwulan II sebesar 99,59 dengan target 83. Maka IKPA Balai PPMHKP Balikpapan telah melebihi target.
2. Perbandingan realisasi IKPA pada tahun 2026 sebesar 99,59, realisasi IKPA tahun 2025 sebesar 90,85, realisasi IKPA tahun 2024 sebesar 96,97, nilai capaian IKPA Balai PPMHKP Balikpapan mengalami peningkatan.
3. Capaian indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 14.671.000. Anggaran tersebut digunakan untuk Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi ke Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur dan Perjalanan Dinas Rekonsiliasi Laporang Keuangan/SAI.

Akar Masalah :

1. Pada triwulan II tahun 2026 ini tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan IKPA. Nilai pada setiap aspek mengalami peningkatan daripada tahun-tahun sebelumnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan /kegagalan pencapaian indikator disertakan foto/ dokumentasi

Dokumentasi kegiatan :

1. Mengikuti kegiatan FGD Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA yang diselenggarakan oleh KPPN Balikpapan melalui online pada tanggal 30 Juni 2026.

2. Rapat Rencana Kegiatan Penyerapan Anggaran 20 April 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya	Penanggung Jawab
• Menyusun Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA dengan cermat • Meningkatkan monitoring realisasi Rencana Penarikan Dana setiap bulannya • Menyampaikan UP tiap bulan tepat waktu • Menggunakan kartu kredit pemerintah (KKP) sesuai target	Timja Dukungan Manajerial

Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
✓ Melakukan briefing dengan penanggung jawab kegiatan untuk dapat melakukan kegiatan sesuai jadwal, diharapkan dari hal tersebut penyerapan anggaran yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar	Timja Dukungan Manajerial

Balikpapan, 14 Juli 2026
Kepala Subbagian Tata Usaha,

Frederica Ethis Maharani

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 1873/SJ.2/TU.210/VII/2026

Yth. : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Para Sekretaris Badan
4. Kepala Biro Perencanaan
5. Kepala Biro Umum
6. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
6. Kepala Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Hal : Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2026

Tanggal : 13 Juli 2026

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor 1820/SJ.1/RC.610/VII/2026 hal Penyampaian Pengingat Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Mandatory Triwulan II Tahun 2026, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penarikan data capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Triwulan II tahun 2026 berdasarkan aplikasi Myintress Kementerian Keuangan yang dilakukan pada tanggal 13 Juli 2026 pukul 11.35 WIB.

2. Capaian IKU IKPA KKP Triwulan II tahun 2026 sebesar 87,85 dari target nilai 83.

3. Terlampir kami sampaikan data capaian IKU IKPA level 0 (KKP), level 1 (Unit Eselon I) dan level 2 (Satker). Data tersebut dapat digunakan sebagai penetapan capaian nilai IKU IKPA Triwulan II tahun 2026 pada Unit Eselon I dan Satker di lingkungan KKP.

Mengingat pentingnya Nota Dinas ini, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menyampaikan Nota Dinas capaian IKPA ini kepada seluruh Satker lingkup Unit Kerja masing-masing.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Biro Keuangan dan BMN berkomitmen menjaga profesionalitas dan memberi pelayanan secara ***S**mart*, **A**kuntabel, **I**ntegritas, **L**oyalitas, dan **S**inergi (SAILS).

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Ditandatangani Secara Elektronik

Sutrisno Subagyo

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPb

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN KL

NO	Periode	Kode	Nama	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
1	06 Juni	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	99,03 10 9,90	68,76 15 10,31	83,90	67,08 20 13,42	100,00 10 10,00	99,91 10 9,99	96,80 10 9,68	90,95	98,19 25 24,55	98,19	87,85	100,00%	0,00	87,85

tanggal cetak : 13-07-26 11:35:06

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPb

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN ESELON 1

NO	Periode	Kode	Nama	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
1	06 Juni	03201	SEKRETARIAT JENDERAL	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	75,00 10 7,50	71,50 15 10,72	73,25	98,73 20 19,75	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,68	99,72 25 24,93	99,73	92,90	100,00%	0,00	92,90
2	06 Juni	03202	INSPEKTORAT JENDERAL	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,56 20 19,91	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	98,07 10 9,81	99,41	100,00 25 25,00	100,00	99,72	100,00%	0,00	99,72
3	06 Juni	03203	DITJEN PERIKANAN TANGKAP	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	61,11 15 9,17	80,56	30,07 20 6,01	100,00 10 10,00	99,83 10 9,98	97,74 10 9,77	81,91	92,56 25 23,14	92,56	78,08	100,00%	0,00	78,08
4	06 Juni	03204	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	61,30 15 9,20	80,65	66,02 20 13,20	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,49 10 9,95	91,38	99,16 25 24,79	99,16	87,14	100,00%	0,00	87,14
5	06 Juni	03205	DITJEN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	86,75 15 13,01	93,38	93,40 20 18,68	100,00 10 10,00	99,58 10 9,96	94,42 10 9,44	96,85	99,06 25 24,76	99,06	95,86	100,00%	0,00	95,86
6	06 Juni	03206	DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	78,17 20 15,63	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	94,54	100,00 25 25,00	100,00	95,63	100,00%	0,00	95,63
7	06 Juni	03207	DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	26,13 15 3,92	63,07	35,88 20 7,18	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	94,39 10 9,44	82,57	100,00 25 25,00	100,00	75,53	100,00%	0,00	75,53
8	06 Juni	03208	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	50,00 10 5,00	63,94 15 9,59	56,97	88,55 20 17,71	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	97,14	100,00 25 25,00	100,00	87,30	100,00%	0,00	87,30
9	06 Juni	03212	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	98,75 10 9,88	89,39 15 13,41	94,07	96,23 20 19,25	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	95,74 10 9,57	97,99	99,25 25 24,81	99,25	96,92	100,00%	0,00	96,92
10	06 Juni	03213	BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	68,67 15 10,30	84,34	73,19 20 14,64	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	96,96 10 9,70	92,54	97,43 25 24,36	97,43	88,99	100,00%	0,00	88,99

tanggal cetak : 13-07-26 11:36:11

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPb

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
1	06 Juni	037	032	225135	PANGKALAN PSDKP BENOA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	100,00	100,00%	0,00	100,00
2	06 Juni	037	032	403826	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	100,00	100,00%	0,00	100,00
3	06 Juni	023	032	403830	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	100,00	100,00%	0,00	100,00
4	06 Juni	086	032	445393	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	78,02 0 0,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	0,00 0 0,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	70,00	70,00%	0,00	100,00
5	06 Juni	024	032	649732	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN CIREBON	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	80,00	80,00%	0,00	100,00
6	06 Juni	008	032	477456	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	100,00	100,00%	0,00	100,00
7	06 Juni	039	032	499352	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL (BKKPN) KUPANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	100,00	100,00%	0,00	100,00
8	06 Juni	014	032	567481	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PALEMBANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	100,00	100,00%	0,00	100,00

tanggal cetak : 13-07-26 11:36:44

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPb

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
9	06 Juni	154	032	445394	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	100,00	100,00%	0,00	100,00
10	06 Juni	038	032	567758	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MATARAM	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	99,92 10 9,99	99,96	100,00 25 25,00	100,00	79,99	80,00%	0,00	99,99
11	06 Juni	072	032	239171	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,86 20 19,97	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,97	100,00 25 25,00	100,00	99,97	100,00%	0,00	99,97
12	06 Juni	012	032	649636	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAMBI	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	99,79 10 9,98	99,90	100,00 25 25,00	100,00	79,98	80,00%	0,00	99,97
13	06 Juni	021	032	403824	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	99,67 10 9,97	99,83	100,00 25 25,00	100,00	79,97	80,00%	0,00	99,96
14	06 Juni	017	032	649615	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN LAMPUNG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	99,69 10 9,97	99,85	100,00 25 25,00	100,00	79,97	80,00%	0,00	99,96
15	06 Juni	132	032	403827	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	99,96 10 10,00	99,98	99,86 25 24,96	99,86	79,96	80,00%	0,00	99,95
16	06 Juni	136	032	403828	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,68 20 19,94	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,92	100,00 25 25,00	100,00	99,94	100,00%	0,00	99,94

tanggal cetak : 13-07-26 11:36:44

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
17	06 Juni	034	032	427670	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,65 20 19,93	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,91	100,00 25 25,00	100,00	99,93	100,00%	0,00	99,93
18	06 Juni	180	032	403833	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,65 20 19,93	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	99,83	100,00 25 25,00	100,00	79,93	80,00%	0,00	99,91
19	06 Juni	014	032	403823	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,51 20 19,90	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,88	100,00 25 25,00	100,00	99,90	100,00%	0,00	99,90
20	06 Juni	030	032	649725	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN YOGYAKARTA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	99,11 10 9,91	99,55	100,00 25 25,00	100,00	79,91	80,00%	0,00	99,89
21	06 Juni	053	032	649771	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN LUWUK BANGGAI	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	100,00	99,65 25 24,91	99,65	79,91	80,00%	0,00	99,89
22	06 Juni	037	032	427624	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN DENPASAR	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,42 20 19,88	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,86	100,00 25 25,00	100,00	99,88	100,00%	0,00	99,88
23	06 Juni	123	032	649684	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MEDAN II	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,43 20 19,89	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	99,72	100,00 25 25,00	100,00	79,89	80,00%	0,00	99,86

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
24	06 Juni	023	032	403829	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,59 20 19,92	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	98,23 10 9,82	99,45	100,00 25 25,00	100,00	99,74	100,00%	0,00	99,74
25	06 Juni	175	032	622098	INSPEKTORAT JENDERAL	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,56 20 19,91	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	98,07 10 9,81	99,41	100,00 25 25,00	100,00	99,72	100,00%	0,00	99,72
26	06 Juni	134	032	239150	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	97,25 10 9,72	99,31	100,00 25 25,00	100,00	99,72	100,00%	0,00	99,72
27	06 Juni	061	032	215141	STASIUN PSDKP AMBON	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	98,57 20 19,71	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,64	100,00 25 25,00	100,00	99,71	100,00%	0,00	99,71
28	06 Juni	062	032	649767	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TERNATE	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,60 20 19,92	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	97,75 10 9,78	99,34	100,00 25 25,00	100,00	99,70	100,00%	0,00	99,70
29	06 Juni	175	032	403836	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	98,36 20 19,67	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,59	100,00 25 25,00	100,00	99,67	100,00%	0,00	99,67
30	06 Juni	045	032	649593	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BANJARBARU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	98,34 20 19,67	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,59	99,97 25 24,99	99,97	99,66	100,00%	0,00	99,66
31	06 Juni	055	032	403839	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	98,72 20 19,74	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,13 10 9,91	99,46	100,00 25 25,00	100,00	99,66	100,00%	0,00	99,66
32	06 Juni	094	032	239235	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	98,11 20 19,62	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,53	100,00 25 25,00	100,00	99,62	100,00%	0,00	99,62

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
33	06 Juni	103	032	649792	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BAUBAU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	98,85 20 19,77	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	99,24 10 9,92	99,05	100,00 25 25,00	100,00	79,69	80,00%	0,00	99,62
34	06 Juni	015	032	649699	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGKALPINANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	98,70 20 19,74	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	98,72 10 9,87	99,36	100,00 25 25,00	100,00	99,61	100,00%	0,00	99,61
35	06 Juni	047	032	567610	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BALIKPAPAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,71 20 19,94	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	97,31 10 9,73	98,51	100,00 25 25,00	100,00	79,67	80,00%	0,00	99,59
36	06 Juni	179	032	440822	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,64 20 19,93	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	95,57 10 9,56	98,80	100,00 25 25,00	100,00	99,49	100,00%	0,00	99,49
37	06 Juni	123	032	238741	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	98,97 20 19,79	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,74	98,57 25 24,64	98,57	99,44	100,00%	0,00	99,44
38	06 Juni	030	032	403834	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	98,77 20 19,75	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	97,97 10 9,80	98,37	100,00 25 25,00	100,00	79,55	80,00%	0,00	99,44
39	06 Juni	001	032	649589	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BANDA ACEH	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,79 20 19,96	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	95,80 10 9,58	97,80	100,00 25 25,00	100,00	79,54	80,00%	0,00	99,42

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
40	06 Juni	050	032	649678	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN GORONTALO	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	98,69 20 19,74	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	97,83 10 9,78	98,26	100,00 25 25,00	100,00	79,52	80,00%	0,00	99,40
41	06 Juni	093	032	239991	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	96,82 20 19,36	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,21	100,00 25 25,00	100,00	99,36	100,00%	0,00	99,36
42	06 Juni	061	032	622461	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	95,92 20 19,18	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	98,98	100,00 25 25,00	100,00	99,18	100,00%	0,00	99,18
43	06 Juni	134	032	649661	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SEMARANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	98,24 20 19,65	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	95,30 10 9,53	98,39	100,00 25 25,00	100,00	99,18	100,00%	0,00	99,18
44	06 Juni	039	032	649551	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	92,93 10 9,29	96,46	100,00 25 25,00	100,00	79,29	80,00%	0,00	99,12
45	06 Juni	100	032	238762	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,89 20 19,98	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	96,15 10 9,61	99,01	98,10 25 24,52	98,10	99,12	100,00%	0,00	99,12
46	06 Juni	123	032	427567	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MEDAN I	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	97,22 20 19,44	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	98,21 10 9,82	97,72	100,00 25 25,00	100,00	79,27	80,00%	0,00	99,08
47	06 Juni	021	032	403832	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	96,44 20 19,29	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	99,78 10 9,98	98,11	100,00 25 25,00	100,00	79,27	80,00%	0,00	99,08

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPb

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
48	06 Juni	025	032	403879	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN (POLTEK KP PANGANDARAN)	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	95,33 20 19,07	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	98,83	100,00 25 25,00	100,00	99,07	100,00%	0,00	99,07
49	06 Juni	062	032	427661	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	95,07 20 19,01	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,94 10 9,99	98,75	100,00 25 25,00	100,00	99,01	100,00%	0,00	99,01
50	06 Juni	050	032	310719	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	96,22 20 19,24	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	97,60 10 9,76	98,45	100,00 25 25,00	100,00	99,00	100,00%	0,00	99,00
51	06 Juni	130	032	031665	STASIUN PSDKP CILACAP	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	97,90 20 19,58	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	93,17 10 9,32	97,77	100,00 25 25,00	100,00	98,90	100,00%	0,00	98,90
52	06 Juni	010	032	531488	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	98,90 20 19,78	100,00 10 10,00	95,24 10 9,52	95,81 10 9,58	97,49	100,00 25 25,00	100,00	98,88	100,00%	0,00	98,88
53	06 Juni	175	032	403822	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	95,34 20 19,07	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	98,14 10 9,81	98,37	100,00 25 25,00	100,00	98,88	100,00%	0,00	98,88
54	06 Juni	010	032	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	97,98 20 19,60	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	92,40 10 9,24	97,60	100,00 25 25,00	100,00	98,84	100,00%	0,00	98,84
55	06 Juni	073	032	427692	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,63 20 19,93	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	88,25 10 8,82	96,97	100,00 25 25,00	100,00	98,75	100,00%	0,00	98,75
56	06 Juni	035	032	567350	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	94,06 15 14,11	97,03	92,76 0 0,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	0,00 0 0,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	69,11	70,00%	0,00	98,73
57	06 Juni	061	032	567720	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	93,46 20 18,69	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	98,37	100,00 25 25,00	100,00	98,69	100,00%	0,00	98,69

tanggal cetak : 13-07-26 11:36:44

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
58	06 Juni	107	032	239221	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	94,39 15 14,16	97,20	97,63 20 19,53	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,41	100,00 25 25,00	100,00	98,68	100,00%	0,00	98,68
59	06 Juni	118	032	237373	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	92,88 15 13,93	96,44	98,68 20 19,74	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,67	100,00 25 25,00	100,00	98,67	100,00%	0,00	98,67
60	06 Juni	132	032	440013	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA (POLTEK KP JEMBRANA)	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	94,09 15 14,11	97,05	98,26 20 19,65	100,00 10 10,00	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	99,42	100,00 25 25,00	100,00	88,77	90,00%	0,00	98,63
61	06 Juni	128	032	560393	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	94,85 15 14,23	97,43	96,95 20 19,39	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,24	100,00 25 25,00	100,00	98,62	100,00%	0,00	98,62
62	06 Juni	015	032	239214	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	94,50 15 14,18	97,25	97,09 20 19,42	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	98,43 10 9,84	98,88	99,99 25 25,00	99,99	98,43	100,00%	0,00	98,43
63	06 Juni	066	032	649711	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	92,65 15 13,90	96,33	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	98,21 10 9,82	99,11	100,00 25 25,00	100,00	78,72	80,00%	0,00	98,40
64	06 Juni	165	032	427542	BALAI BESAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SURABAYA I	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	94,47 15 14,17	97,24	97,44 20 19,49	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	98,72	100,00 25 25,00	100,00	78,66	80,00%	0,00	98,32
65	06 Juni	009	032	649640	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TANJUNG PINANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	92,66 15 13,90	96,33	98,00 20 19,60	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	99,73 10 9,97	99,24	100,00 25 25,00	100,00	88,47	90,00%	0,00	98,30

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
66	06 Juni	061	032	649750	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN AMBON	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	94,65 15 14,20	97,33	97,19 20 19,44	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	98,60	100,00 25 25,00	100,00	78,64	80,00%	0,00	98,29
67	06 Juni	042	032	567538	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	94,36 15 14,15	97,18	98,10 20 19,62	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	98,49 10 9,85	98,30	100,00 25 25,00	100,00	78,62	80,00%	0,00	98,28
68	06 Juni	175	032	403835	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	87,97 15 13,20	93,99	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,64 10 9,96	99,91	100,00 25 25,00	100,00	98,16	100,00%	0,00	98,16
69	06 Juni	179	032	238010	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	91,78 20 18,36	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	97,83 10 9,78	97,40	100,00 25 25,00	100,00	98,14	100,00%	0,00	98,14
70	06 Juni	137	032	427649	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BATAM	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	92,51 15 13,88	96,26	99,07 20 19,81	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	98,04 10 9,80	98,55	100,00 25 25,00	100,00	78,49	80,00%	0,00	98,12
71	06 Juni	137	032	567474	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	93,83 15 14,07	96,92	95,30 20 19,06	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,64 10 9,96	98,74	100,00 25 25,00	100,00	98,10	100,00%	0,00	98,10
72	06 Juni	084	032	622475	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,27 20 19,85	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,67 10 9,97	99,74	93,00 25 23,25	93,00	98,07	100,00%	0,00	98,07
73	06 Juni	106	032	560401	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	91,33 15 13,70	95,67	96,73 20 19,35	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,18	100,00 25 25,00	100,00	98,05	100,00%	0,00	98,05

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
74	06 Juni	076	032	649746	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BALAI ASAHAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	92,08 20 18,42	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	99,91 10 9,99	96,00	100,00 25 25,00	100,00	78,41	80,00%	0,00	98,01
75	06 Juni	049	032	567631	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MANADO	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	97,03 20 19,41	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	96,66 10 9,67	96,85	96,89 25 24,22	96,89	78,30	80,00%	0,00	97,87
76	06 Juni	048	032	649572	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TARAKAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	98,63 10 9,86	99,54	92,85 25 23,21	92,85	88,07	90,00%	0,00	97,86
77	06 Juni	179	032	239260	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	89,31 20 17,86	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,00 10 9,90	97,08	100,00 25 25,00	100,00	97,76	100,00%	0,00	97,76
78	06 Juni	043	032	649657	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PALANGKARAYA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	93,46 15 14,02	96,73	98,40 20 19,68	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	94,92 10 9,49	96,66	100,00 25 25,00	100,00	78,19	80,00%	0,00	97,74
79	06 Juni	103	032	403820	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	91,81 20 18,36	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	93,67 10 9,37	96,37	100,00 25 25,00	100,00	97,73	100,00%	0,00	97,73
80	06 Juni	103	032	352595	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN WAKATOBI (AK KP WAKATOBI)	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	92,58 15 13,89	96,29	96,92 20 19,38	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	98,72 10 9,87	97,82	100,00 25 25,00	100,00	78,14	80,00%	0,00	97,68
81	06 Juni	042	032	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	88,94 15 13,34	94,47	99,29 20 19,86	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	98,35 10 9,84	98,82	100,00 25 25,00	100,00	78,03	80,00%	0,00	97,54

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPb

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
82	06 Juni	020	032	239146	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	93,62 15 14,04	96,81	92,71 20 18,54	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,59 10 9,96	98,08	100,00 25 25,00	100,00	97,54	100,00%	0,00	97,54
83	06 Juni	071	032	649814	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BIMA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	93,60 20 18,72	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	93,06 10 9,31	93,33	100,00 25 25,00	100,00	78,03	80,00%	0,00	97,53
84	06 Juni	137	032	325156	PANGKALAN PSDKP BATAM	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	91,32 15 13,70	95,66	97,54 20 19,51	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,39	96,96 25 24,24	96,96	97,45	100,00%	0,00	97,45
85	06 Juni	010	032	567432	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PADANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	91,98 15 13,80	95,99	96,66 20 19,33	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	98,13 10 9,81	97,40	99,61 25 24,90	99,61	77,84	80,00%	0,00	97,31
86	06 Juni	038	032	567762	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	86,69 15 13,00	93,35	96,47 20 19,29	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,12	100,00 25 25,00	100,00	97,30	100,00%	0,00	97,30
87	06 Juni	175	032	403821	PUSAT PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	93,67 20 18,73	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,40 10 9,94	98,27	93,87 25 23,47	93,87	97,14	100,00%	0,00	97,14
88	06 Juni	001	032	427551	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	97,07 20 19,41	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	82,74 10 8,27	89,91	100,00 25 25,00	100,00	77,69	80,00%	0,00	97,11
89	06 Juni	060	032	567694	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN KENDARI	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	97,17 20 19,43	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	96,99 10 9,70	97,08	94,08 25 23,52	94,08	77,65	80,00%	0,00	97,07
90	06 Juni	123	032	427655	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	93,66 15 14,05	96,83	89,75 20 17,95	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	97,44	100,00 25 25,00	100,00	97,00	100,00%	0,00	97,00

tanggal cetak : 13-07-26 11:36:44

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
91	06 Juni	135	032	649788	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN SURABAYA II	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	86,30 15 12,95	93,15	98,28 20 19,66	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	99,14	100,00 25 25,00	100,00	77,60	80,00%	0,00	97,00
92	06 Juni	008	032	567453	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PEKANBARU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	86,45 15 12,97	93,23	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	89,42 10 8,94	97,36	100,00 25 25,00	100,00	96,91	100,00%	0,00	96,91
93	06 Juni	020	032	567800	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	79,29 15 11,89	89,65	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	96,89	100,00%	0,00	96,89
94	06 Juni	175	032	537611	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	94,29 15 14,14	97,15	91,58 20 18,32	98,67 10 9,87	100,00 10 10,00	94,07 10 9,41	96,08	100,00 25 25,00	100,00	96,73	100,00%	0,00	96,73
95	06 Juni	175	032	440816	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	82,09 15 12,31	91,05	99,52 20 19,90	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	94,64 10 9,46	98,54	100,00 25 25,00	100,00	96,68	100,00%	0,00	96,68
96	06 Juni	048	032	355105	STASIUN PSDKP TARAKAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	87,82 15 13,17	93,91	99,18 20 19,84	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	86,17 10 8,62	96,34	100,00 25 25,00	100,00	96,63	100,00%	0,00	96,63
97	06 Juni	175	032	427686	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BBP3KP)	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	91,82 15 13,77	95,91	89,10 20 17,82	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	97,28	100,00 25 25,00	100,00	96,59	100,00%	0,00	96,59
98	06 Juni	042	032	440847	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	90,84 15 13,63	95,42	98,22 20 19,64	100,00 10 10,00	92,31 10 9,23	97,53 10 9,75	97,01	96,81 25 24,20	96,82	96,46	100,00%	0,00	96,46
99	06 Juni	064	032	250263	STASIUN PSDKP BIAK	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	77,37 15 11,61	88,69	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	97,45 10 9,75	99,36	100,00 25 25,00	100,00	96,35	100,00%	0,00	96,35

tanggal cetak : 13-07-26 11:36:44

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPb

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
100	06 Juni	051	032	649601	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN PALU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	88,85 15 13,33	94,43	99,37 20 19,87	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	88,26 10 8,83	93,82	99,84 25 24,96	99,84	76,99	80,00%	0,00	96,23

tanggal cetak : 13-07-26 11:36:44

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPb

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
101	06 Juni	084	032	440853	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	94,91 15 14,24	97,46	94,28 20 18,86	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	80,57 10 8,06	93,71	100,00 25 25,00	100,00	96,15	100,00%	0,00	96,15
102	06 Juni	061	032	238755	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	85,90 20 17,18	100,00 10 10,00	0,00 0 0,00	92,79 10 9,28	92,90	100,00 25 25,00	100,00	86,46	90,00%	0,00	96,07
103	06 Juni	037	032	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	93,81 15 14,07	96,91	97,99 20 19,60	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	81,74 10 8,17	89,87	100,00 25 25,00	100,00	76,84	80,00%	0,00	96,05
104	06 Juni	175	032	626402	SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	75,00 15 11,25	87,50	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	97,92 10 9,79	99,48	100,00 25 25,00	100,00	96,04	100,00%	0,00	96,04
105	06 Juni	167	032	649568	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN ENTIKONG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	84,23 15 12,63	92,12	96,18 20 19,24	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	98,62 10 9,86	97,40	100,00 25 25,00	100,00	76,73	80,00%	0,00	95,92
106	06 Juni	001	032	567385	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	83,35 15 12,50	91,68	90,60 20 18,12	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,94 10 9,99	97,64	100,00 25 25,00	100,00	95,62	100,00%	0,00	95,62
107	06 Juni	017	032	652009	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	89,38 15 13,41	94,69	85,55 20 17,11	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	96,39	100,00 25 25,00	100,00	95,52	100,00%	0,00	95,52
108	06 Juni	179	032	538911	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	78,78 20 15,76	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	96,01 10 9,60	93,70	100,00 25 25,00	100,00	95,36	100,00%	0,00	95,36
109	06 Juni	017	032	427706	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	91,81 15 13,77	95,91	85,67 20 17,13	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	96,42	97,52 25 24,38	97,52	95,28	100,00%	0,00	95,28

tanggal cetak : 13-07-26 11:36:46

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPb

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
110	06 Juni	175	032	622131	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	76,41 20 15,28	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	94,10	100,00 25 25,00	100,00	95,28	100,00%	0,00	95,28
111	06 Juni	012	032	237657	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	89,84 15 13,48	94,92	88,33 20 17,67	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	88,91 10 8,89	94,31	100,00 25 25,00	100,00	95,03	100,00%	0,00	95,03
112	06 Juni	010	032	427573	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	89,67 15 13,45	94,84	89,15 20 17,83	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	85,70 10 8,57	93,71	100,00 25 25,00	100,00	94,85	100,00%	0,00	94,85
113	06 Juni	016	032	649622	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	71,90 15 10,79	85,95	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	100,00 10 10,00	94,86 10 9,49	98,29	100,00 25 25,00	100,00	85,27	90,00%	0,00	94,75
114	06 Juni	129	032	239192	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	75,36 15 11,30	87,68	99,59 0 0,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	0,00 0 0,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	66,30	70,00%	0,00	94,72
115	06 Juni	175	032	449520	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	81,12 15 12,17	90,56	87,96 20 17,59	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,37 10 9,94	96,83	100,00 25 25,00	100,00	94,70	100,00%	0,00	94,70
116	06 Juni	039	032	403838	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	80,95 15 12,14	90,48	88,08 20 17,62	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	97,76 10 9,78	96,46	100,00 25 25,00	100,00	94,53	100,00%	0,00	94,53
117	06 Juni	063	032	567812	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAYAPURA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	68,47 15 10,27	84,24	95,31 20 19,06	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	98,83	100,00 25 25,00	100,00	94,33	100,00%	0,00	94,33

tanggal cetak : 13-07-26 11:36:46

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
118	06 Juni	178	032	645691	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAMUJU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	76,61 15 11,49	88,31	95,87 20 19,17	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	96,54 10 9,65	96,20	100,00 25 25,00	100,00	75,32	80,00%	0,00	94,15
119	06 Juni	136	032	567680	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	94,52 15 14,18	97,26	77,49 20 15,50	100,00 10 10,00	0,00 0 0,00	99,73 10 9,97	92,41	100,00 25 25,00	100,00	84,65	90,00%	0,00	94,05
120	06 Juni	068	032	649704	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAUKE	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	88,37 15 13,26	94,19	100,00 20 20,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	79,60 10 7,96	89,80	93,36 25 23,34	93,36	74,55	80,00%	0,00	93,19
121	06 Juni	175	032	427511	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN (POLTEK AUP) JAKARTA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	68,07 15 10,21	84,04	100,00 20 20,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	77,66 10 7,77	94,42	100,00 25 25,00	100,00	92,98	100,00%	0,00	92,98
122	06 Juni	132	032	632004	BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	65,54 20 13,11	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,45 10 9,95	91,25	98,87 25 24,72	98,87	92,77	100,00%	0,00	92,77
123	06 Juni	022	032	645693	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BANDUNG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	92,43 15 13,86	96,22	94,52 20 18,90	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	99,28 10 9,93	96,90	83,98 25 20,99	83,98	73,69	80,00%	0,00	92,11
124	06 Juni	128	032	238734	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	67,55 15 10,13	83,78	84,59 20 16,92	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,55 10 9,96	96,04	100,00 25 25,00	100,00	92,01	100,00%	0,00	92,01
125	06 Juni	039	032	245160	STASIUN PSDKP KUPANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	82,62 15 12,39	91,31	72,35 20 14,47	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	93,09	100,00 25 25,00	100,00	91,86	100,00%	0,00	91,86
126	06 Juni	083	032	170445	STASIUN PSDKP TAHUNA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	90,47 15 13,57	95,24	75,71 20 15,14	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	93,93	92,36 25 23,09	92,36	91,80	100,00%	0,00	91,80

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
127	06 Juni	045	032	567584	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	91,92 15 13,79	95,96	68,95 20 13,79	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	92,24	95,74 25 23,93	95,74	91,51	100,00%	0,00	91,51
128	06 Juni	123	032	440831	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	83,53 15 12,53	91,77	76,74 20 15,35	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	88,29 10 8,83	91,26	98,04 25 24,51	98,04	91,22	100,00%	0,00	91,22
129	06 Juni	083	032	649800	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	92,50 20 18,50	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	62,22 10 6,22	77,36	92,47 25 23,12	92,48	72,84	80,00%	0,00	91,05
130	06 Juni	118	032	239188	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	69,81 15 10,47	84,91	80,72 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	80,72	100,00 25 25,00	100,00	45,47	50,00%	0,00	90,94
131	06 Juni	066	032	634146	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	90,50 15 13,57	95,25	98,78 20 19,76	100,00 10 10,00	0,00 0 0,00	54,96 10 5,50	84,58	91,67 25 22,92	91,67	81,74	90,00%	0,00	90,83
132	06 Juni	021	032	653526	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	50,00 10 5,00	83,42 15 12,51	66,71	93,09 20 18,62	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	96,78 10 9,68	97,47	100,00 25 25,00	100,00	90,81	100,00%	0,00	90,81
133	06 Juni	001	032	065135	PANGKALAN PSDKP LAMPULO	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	89,44 15 13,42	94,72	68,54 20 13,71	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	84,52 10 8,45	88,27	100,00 25 25,00	100,00	90,58	100,00%	0,00	90,58
134	06 Juni	175	032	622081	BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	50,00 10 5,00	70,65 15 10,60	60,33	99,38 20 19,88	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,85	100,00 25 25,00	100,00	90,47	100,00%	0,00	90,47
135	06 Juni	061	032	427618	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	89,71 15 13,46	94,86	89,94 20 17,99	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	82,59 10 8,26	86,27	89,49 25 22,37	89,49	72,08	80,00%	0,00	90,10
136	06 Juni	175	032	660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	66,72 15 10,01	83,36	57,92 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	57,92	98,70 25 24,68	98,71	44,68	50,00%	0,00	89,37

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
137	06 Juni	165	032	622035	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	50,00 10 5,00	76,85 15 11,53	63,43	96,21 0 0,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	0,00 0 0,00	100,00	100,00 25 25,00	100,00	61,53	70,00%	0,00	87,90
138	06 Juni	120	032	403875	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI (POLTEK KP DUMAI)	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	73,06 15 10,96	86,53	62,65 20 12,53	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	91,38 10 9,14	88,51	100,00 25 25,00	100,00	87,63	100,00%	0,00	87,63
139	06 Juni	175	032	691706	DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	50,00 10 5,00	63,94 15 9,59	56,97	88,55 20 17,71	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	97,14	100,00 25 25,00	100,00	87,30	100,00%	0,00	87,30
140	06 Juni	020	032	649688	STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MERAK	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	68,04 15 10,21	84,02	83,95 20 16,79	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	96,56 10 9,66	90,26	88,72 25 22,18	88,72	68,83	80,00%	0,00	86,04
141	06 Juni	086	032	403837	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	76,45 15 11,47	88,23	48,97 20 9,79	93,33 10 9,33	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	85,58	100,00 25 25,00	100,00	85,59	100,00%	0,00	85,59
142	06 Juni	175	032	691629	PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	63,78 15 9,57	81,89	58,69 20 11,74	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	89,51 10 8,95	87,05	100,00 25 25,00	100,00	85,26	100,00%	0,00	85,26
143	06 Juni	066	032	427630	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	74,25 15 11,14	87,13	45,61 20 9,12	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	98,14 10 9,81	85,94	100,00 25 25,00	100,00	85,07	100,00%	0,00	85,07
144	06 Juni	175	032	649682	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	72,87 15 10,93	86,44	96,89 20 19,38	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	86,53 10 8,65	91,71	76,19 25 19,05	76,19	68,01	80,00%	0,00	85,01

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
145	06 Juni	136	032	427598	BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN MAKASSAR	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	66,41 15 9,96	83,21	47,43 20 9,49	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	92,69 10 9,27	85,03	95,59 25 23,90	95,59	82,61	100,00%	0,00	82,61
146	06 Juni	042	032	427582	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	87,50 15 13,13	93,75	23,33 20 4,67	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	97,59 10 9,76	80,23	100,00 25 25,00	100,00	82,55	100,00%	0,00	82,55
147	06 Juni	024	032	622482	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	86,28 15 12,94	93,14	22,74 20 4,55	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	95,32 10 9,53	79,52	100,00 25 25,00	100,00	82,02	100,00%	0,00	82,02
148	06 Juni	175	032	632462	SETDITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	46,56 15 6,98	73,28	50,93 20 10,19	96,21 10 9,62	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	86,79	97,44 25 24,36	97,44	81,15	100,00%	0,00	81,15
149	06 Juni	175	032	662897	BALAI UJI STANDAR PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN JAKARTA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	59,51 15 8,93	79,76	38,47 20 7,69	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	93,95 10 9,39	83,10	100,00 25 25,00	100,00	81,02	100,00%	0,00	81,02
150	06 Juni	175	032	440807	SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	58,21 15 8,73	79,11	41,68 20 8,34	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	97,66 10 9,77	84,84	91,53 25 22,88	91,53	79,72	100,00%	0,00	79,72
151	06 Juni	179	032	633707	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	72,07 15 10,81	86,04	18,11 20 3,62	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	98,73 10 9,87	79,21	100,00 25 25,00	100,00	79,31	100,00%	0,00	79,31
152	06 Juni	130	032	518117	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	71,45 15 10,72	85,73	15,02 20 3,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,14 10 9,91	78,54	100,00 25 25,00	100,00	78,64	100,00%	0,00	78,64
153	06 Juni	132	032	633693	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	81,30 15 12,20	90,65	5,40 20 1,08	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	76,35	100,00 25 25,00	100,00	78,28	100,00%	0,00	78,28

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPb

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
154	06 Juni	175	032	238720	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	62,10 15 9,31	81,05	35,74 20 7,15	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	83,94	83,85 25 20,96	83,85	77,43	100,00%	0,00	77,43
155	06 Juni	060	032	537695	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	68,46 15 10,27	84,23	34,86 20 6,97	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	96,24 10 9,62	82,77	64,03 25 16,01	64,03	72,87	100,00%	0,00	72,87
156	06 Juni	066	032	477440	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	0,00 20 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00	100,00 25 25,00	100,00	50,00	70,00%	0,00	71,43
157	06 Juni	175	032	622145	SEKRETARIAT DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	21,75 15 3,26	60,88	23,05 20 4,61	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	82,28 10 8,23	76,33	100,00 25 25,00	100,00	71,10	100,00%	0,00	71,10
158	06 Juni	136	032	477431	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	50,00 15 7,50	75,00	0,00 20 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00	100,00 25 25,00	100,00	42,50	70,00%	0,00	60,71
159	06 Juni	010	032	499346	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL) PADANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	33,33 15 5,00	66,67	0,00 20 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00	100,00 25 25,00	100,00	40,00	70,00%	0,00	57,14
160	06 Juni	020	032	290145	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	33,33 15 5,00	66,67	0,00 20 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00 0 0,00	0,00	100,00 25 25,00	100,00	40,00	70,00%	0,00	57,14

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK)
BALAI PPMHKP BALIKPAPAN

NAMA INDIKATOR : PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN PBJ YANG DIUMUMKAN PADA SIRUP LINGKUP BALAI PPMHKP BALIKPAPAN
NAMA TIMJA : DUKUNGAN MANAJERIAL
PERIODE LAPORAN : TRIWULAN II / 2026

Nama Sasaran Kegiatan	**:**	**Tatakelola Pemerintahan Yang Efektif dan Akuntabel Lingkup BPPMHKP**
Nama Indikator Kinerja	**:**	**Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Balai PPMHKP Balikpapan**

T / R	**Tahun 2026**							**Capaian**	**Target**
	Q1	**Q2**	**SM. 1**	**Q3**	**Q4**	**SM. 2**	**Tahunan**	**Tahun 2026**	**Tahun 2027**
Target	77	77	77						77
Realisasi	100	100	100						
% Capaian	120	120	120						

Catatan :
Q1, Q2, Q3, Q4 : Capaian selama triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4
SM. 1 : Capaian Q1 + Capaian Q2
SM. 2 : Capaian Q3 + Capaian Q4
Tahunan : Capaian di akhir tahun 2026

Isu Utama dan Implikasinya

Indikator kinerja ini merupakan suatu ukuran yang menggambarkan capaian IKU untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Identifikasi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja sebagai data dukung pembentuk nilai pagu pengadaan yang selanjutnya dilakukan proses revisi RUP pada aplikasi SIRUP berdasarkan dokumen kertas kerja bertujuan untuk mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada aplikasi SIRUP melebihi atau kurang dari 100%. Data yang terbentuk pada dokumen kertas kerja untuk nilai Pagu Terumumkan merupakan nilai yang sama dengan nilai yang tercantum dalam rekap RUP Terumumkan pada aplikasi SIRUP.

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%. Maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini. Dari hasil perhitungan dan olah data, berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa nomor B.736/SJ.7/PL.410/VII/2026 Tanggal 09 Juli 2026 capaian persentase RUP Terumumkan Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan II tahun 2026 sebesar 100,00%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Deskripsi keberhasilan apabila tercapai target, jika tidak tercapai apa yang menjadi akar masalah (Mengapa hal tersebut terjadi ?)

Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan II tahun 2026 yaitu sebesar 100,00% (sesuai Nota Dinas. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa KKP) dari target Triwulan II tahun 2026 pada sebesar 77%. Capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP ini diperoleh dari perhitungan berikut:

Formulasi pengukuran/penilaian :

$$\frac{Nilai\ Rencana\ Umum\ PBJ\ yang\ diumumkan\ pada\ aplikasi\ SIRUP}{Pagu\ Pengadaan\ Barang/Jasa} x\ 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%. Maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator.

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup UPT Balai PPMHKP Balikpapan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

$$\frac{726{,}519{,}000}{726{,}519{,}000} x\ 100\% = 100\%$$

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan / kegagalan pencapaian indikator disertakan foto / dokumentasi

Dari hasil perhitungan dan olah data, berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa nomor B.736/SJ.7/PL.410/VII/2026 Tanggal 09 Juli 2026 capaian persentase RUP Terumumkan Balai PPMHKP Balikpapan Triwulan II tahun 2026 sebesar 100,00%

(13) Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan – 47 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP						
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	13	BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	427588	BALAI BESAR KIPM DAN KHP MAKASSAR	18,787,046,000		18,787,046,000	18,787,046,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
2	567610	BALAI KIPM DAN KHP BALIKPAPAN	726,519,000		726,519,000	726,519,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
3	649615	BALAI KIPM DAN KHP LAMPUNG	1,029,385,000		1,029,385,000	1,029,385,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
4	649750	BALAI KIPM DAN KHP AMBON	1,339,462,000		1,339,462,000	1,339,462,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
5	649593	BALAI KIPM DAN KHP BANJARMASIN	1,057,310,000		1,057,310,000	1,057,310,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
6	427624	BALAI KIPM DAN KHP DENPASAR	2,030,406,000		2,030,406,000	2,030,406,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
7	649568	BALAI KIPM DAN KHP ENTIKONG	526,628,000		526,628,000	526,628,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
8	649682	BALAI KIPM DAN KHP JAKARTA II	2,027,441,000		2,027,441,000	2,027,441,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
9	567812	BALAI KIPM DAN KHP JAYAPURA	942,893,000		942,893,000	942,893,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
10	567631	BALAI KIPM DAN KHP MANADO	1,141,041,000		1,141,041,000	1,141,041,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
11	567758	BALAI KIPM DAN KHP MATARAM	922,433,000		922,433,000	922,433,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
12	427567	BALAI KIPM DAN KHP MEDAN I	1,263,624,000		1,263,624,000	1,263,624,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
13	649661	BALAI KIPM DAN KHP SEMARANG	1,433,853,000		1,433,853,000	1,433,853,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
14	427542	BALAI KIPM DAN KHP SURABAYA I	2,131,730,000		2,131,730,000	2,131,730,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
15	649788	BALAI KIPM DAN KHP SURABAYA II	909,530,000	2,380,979,000	3,290,509,000	3,290,509,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Rekomendasi Reaksi untuk Tahun berikutnya	Penanggung Jawab
Koordinasi dengan satker/UPT BPPMHKP yang lain sehingga dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara optimal	Timja Dukungan Manajerial

Hasil TL Rekomendasi Renaksi TW sebelumnya	Penanggung Jawab
-	Timja Dukungan Manajerial

Balikpapan, 14 Juli 2026
Plh. Kepala Balai PPMHKP Balikpapan

Frederica Ethis Maharani

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR B.736/SJ.7/PL.410/VII/2026

Yth. : 1. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
10. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
11. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan

Dari : Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa
Hal : Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 2 Tahun Anggaran 2026
Lampiran : Satu berkas
Tanggal : 9 Juli 2026

Sehubungan dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengumuman RUP dalam aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) merupakan kewajiban Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Hasil rekapitulasi Capaian IKU Persentase RUP Terumumkan dari 156 (seratus lima puluh enam) Satuan Kerja Pengelola DIPA Aktif sesuai pagu anggaran yang tersedia lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026 periode Triwulan 2 sampai dengan waktu *cut off* tanggal 9 Juli 2026 pukul 12:00 WIB sebesar **99,94%**. (daftar rekapitulasi terampir);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara berkenan untuk melakukan perbaikan/penyesuaian data sesuai ketersediaan anggaran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani
Secara Elektronik

Teguh Wibowo

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 1

Nomor : B.736/SJ.7/PL.410/VII/2026
Tanggal : 9 Juli 2026

REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN TERUMUMKAN TRIWULAN 2 TAHUN ANGGARAN 2026 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode E1	Nama Unit Eselon I	∑ Satker	Persentase RUP Terumumkan					Capaian IKU TW II - TA. 2026		
				∑ Pagu Pengadaan	∑ Pagu Terumumkan	∑ Selisih Terumumkan	% RUP Terumumkan	Keterangan	Target Score IKU TW II	Capaian Score IKU TW II	Keterangan
1	06	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2	90,098,492,000	90,098,492,000	0	100.00	**SESUAI**	77.00	**100.00**	Capaian Sesuai Target Maksimal
2	08	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	1	40,528,993,000	40,528,993,000	0	100.00	**SESUAI**	75.00	**100.00**	Capaian Sesuai Target Maksimal
3	07	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	5	1,179,150,929,000	1,179,089,911,000	61,018,000	99.99	**KURANG Terumumkan**	76.00	**99.99**	Capaian melebihi Target
4	03	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	24	6,538,648,319,000	6,539,057,155,000	(408,836,000)	100.01	**LEBIH Terumumkan**	77.00	**99.99**	Capaian melebihi Target
5	01	Sekretariat Jenderal	3	274,871,947,000	274,960,715,000	(88,768,000)	100.03	**LEBIH Terumumkan**	85.00	**99.97**	Capaian melebihi Target
6	12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	42	1,044,582,048,000	1,044,261,636,000	320,412,000	99.97	**KURANG Terumumkan**	77.00	**99.97**	Capaian melebihi Target
7	04	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16	1,971,753,400,000	1,966,947,970,304	4,805,429,696	99.76	**KURANG Terumumkan**	77.00	**99.76**	Capaian melebihi Target
8	05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15	1,616,878,809,000	1,612,951,093,400	3,927,715,600	99.76	**KURANG Terumumkan**	77.00	**99.76**	Capaian melebihi Target
9	13	Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	47	180,543,219,000	181,335,346,000	(792,127,000)	100.44	**LEBIH Terumumkan**	77.00	**99.56**	Capaian melebihi Target
10	02	Inspektorat Jenderal	1	13,030,248,000	13,093,680,000	(63,432,000)	100.49	**LEBIH Terumumkan**	77.00	**99.51**	Capaian melebihi Target
TOTAL			**156**	**12,950,086,404,000**	**12,942,324,991,704**	**7,761,412,296**	**99.94**	**LEBIH Terumumkan**	**SKOR ITKP**	**5.00**	Persentase RUP **: ≥90% - <110%**

Ditandatangani
Secara Elektronik

Teguh Wibowo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 2

Nomor : B.736/SJ.7/PL.410/VII/2026
Tanggal : 9 Juli 2026

REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN TERUMUMKAN TRIWULAN 2 TAHUN ANGGARAN 2026 PER SATUAN KERJA

(06) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan – 2 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP			STATISTIK MONER			
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	06	DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	427686	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN HASIL PERIKANAN	7,259,474,000		7,259,474,000	7,259,474,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
2	622131	SETDITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	82,839,018,000		82,839,018,000	82,839,018,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
TOTAL			90,098,492,000	-	90,098,492,000	90,098,492,000	-	100.00%	Capaian IKU : 100.00

(08) Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut – 1 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP						
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	07	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN							
1	691706	DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG LAUT	40,493,593,000	35,400,000	40,528,993,000	40,528,993,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
TOTAL			40,493,593,000	35,400,000	40,528,993,000	40,528,993,000	-	100.00%	Capaian IKU : 100.00

(07) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan – 5 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP						
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	07	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN							
1	499352	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL BKKPN KUPANG	6,000,697,000		6,000,697,000	6,000,697,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
2	477419	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	3,035,086,000		3,035,086,000	3,035,086,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
3	477425	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	2,736,010,000		2,736,010,000	2,736,010,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
4	477456	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	2,970,613,000		2,970,613,000	2,970,613,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
5	622145	SETDITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT	1,164,347,505,000		1,164,347,505,000	1,164,408,523,000	(61,018,000)	99.99%	KURANG TERUMUMKAN
TOTAL			1,179,089,911,000	-	1,179,089,911,000	1,179,150,929,000	(61,018,000)	99.99%	Capaian IKU : 99.99

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(03) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap – 24 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP						
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	03	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP							
1	239150	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN SEMARANG	4,274,143,000		4,274,143,000	4,274,143,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
2	622461	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	2,888,215,000		2,888,215,000	2,888,215,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
3	427692	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	5,680,809,000		5,680,809,000	5,680,809,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
4	239146	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	4,975,769,000		4,975,769,000	4,975,769,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
5	622482	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	76,503,097,000		76,503,097,000	76,503,097,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
6	310719	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	3,847,978,000		3,847,978,000	3,847,978,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
7	239171	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	2,624,978,000		2,624,978,000	2,624,978,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
8	560393	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	4,966,852,000		4,966,852,000	4,966,852,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
9	239991	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	2,173,989,000		2,173,989,000	2,173,989,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
10	633693	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	277,757,594,000		277,757,594,000	277,757,594,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
11	427670	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	2,946,640,000		2,946,640,000	2,946,640,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
12	560401	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	3,330,894,000		3,330,894,000	3,536,779,000	(205,885,000)	94.18%	TERUMUMKAN 100%
13	239214	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	3,192,527,000		3,192,527,000	2,793,060,000	399,467,000	114.30%	TERUMUMKAN 100%
14	239221	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	1,805,286,000		1,805,286,000	1,805,286,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
15	427661	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	4,335,453,000		4,335,453,000	4,335,453,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
16	622475	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	2,124,978,000		2,124,978,000	2,124,978,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
17	239235	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	2,040,222,000		2,040,222,000	2,040,222,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
18	427655	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	8,432,114,000		8,432,114,000	8,432,114,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
19	633707	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	367,160,664,000		367,160,664,000	367,160,664,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
20	531488	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	1,676,910,000		1,676,910,000	1,676,910,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
21	518117	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	106,649,870,000		106,649,870,000	106,421,616,000	228,254,000	100.21%	TERUMUMKAN 100%
22	537695	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	43,621,978,000		43,621,978,000	43,634,978,000	(13,000,000)	99.97%	TERUMUMKAN 100%
23	537611	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	29,534,148,000		29,534,148,000	29,534,148,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
24	238720	SETDITJEN PERIKANAN TANGKAP	5,576,512,047,000		5,576,512,047,000	5,576,512,047,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
TOTAL			6,539,057,155,000	-	6,539,057,155,000	6,538,648,319,000	408,836,000	100.01%	Capaian IKU : 99.99

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(01) Sekretariat Jenderal – 3 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP						
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	01	SEKRETARIAT JENDERAL							
1	632004	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	13,716,776,000		13,716,776,000	13,716,776,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
2	622081	BIRO UMUM SETJEN KKP	251,689,866,000	1,085,000,000	252,774,866,000	252,774,866,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
3	660056	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	8,469,073,000		8,469,073,000	8,380,305,000	88,768,000	101.06%	LEBIH TERUMUMKAN
TOTAL			273,875,715,000	1,085,000,000	274,960,715,000	274,871,947,000	88,768,000	100.03%	Capaian IKU : 99.97

(12) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan – 42 Satker

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP						
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	12	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	352595	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	791,179,000		791,179,000	791,179,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
2	403827	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN BBRBLPP	6,529,483,000		6,529,483,000	6,529,483,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
3	403835	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN BBRP2BKP	3,136,163,000		3,136,163,000	3,136,163,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
4	403836	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN BBRSEKP	1,109,213,000		1,109,213,000	1,109,213,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
5	238755	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	13,754,039,000		13,754,039,000	13,754,039,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
6	238762	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	3,541,150,000		3,541,150,000	3,541,150,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
7	239260	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	12,257,656,000		12,257,656,000	12,257,656,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
8	238741	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	4,417,477,000		4,417,477,000	4,417,477,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
9	239188	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	34,574,253,000		34,574,253,000	34,574,253,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
10	653526	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	3,109,166,000		3,109,166,000	3,109,166,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
11	403830	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS BRBIH	2,603,171,000		2,603,171,000	2,603,171,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
12	403832	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN BRPI	2,868,683,000		2,868,683,000	2,868,683,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
13	403824	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN BRPSDI	1,736,888,000		1,736,888,000	1,736,888,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
14	403828	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN BRPBAP3	4,919,286,000		4,919,286,000	4,919,286,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
15	403829	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN BRPBATPP	5,139,080,000		5,139,080,000	6,146,393,000	(1,007,313,000)	83.61%	KURANG TERUMUMKAN
16	403822	BALAI RISET PERIKANAN LAUT BRPL	904,237,000		904,237,000	904,237,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
17	403823	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN BRPPUPP	6,112,923,000		6,112,923,000	6,112,923,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP						
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	12	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN							
18	403820	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN LPTK	1,287,784,000		1,287,784,000	1,287,784,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
19	403833	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT LRBRL	1,105,425,000		1,105,425,000	1,105,425,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
20	403834	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	835,677,000		835,677,000	835,677,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
21	403826	LOKA RISET PERIKANAN TUNA LRPT	1,682,185,000		1,682,185,000	1,682,185,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
22	403817	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR LRSDKP	1,739,060,000		1,739,060,000	1,739,060,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
23	427511	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN	57,281,778,000		57,281,778,000	57,281,778,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
24	238010	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	2,633,984,000		2,633,984,000	2,633,984,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
25	403839	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	2,723,973,000		2,723,973,000	2,723,973,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
26	403875	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI	12,461,790,000		12,461,790,000	12,461,790,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
27	440013	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA	2,064,018,000		2,064,018,000	2,064,018,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
28	403837	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	25,349,816,000		25,349,816,000	25,349,816,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
29	403838	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	1,640,748,000		1,640,748,000	1,640,748,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
30	403879	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN	2,467,483,000		2,467,483,000	2,467,483,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
31	622035	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	16,713,583,000		16,713,583,000	16,713,583,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
32	634146	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	2,709,753,000		2,709,753,000	2,747,126,000	(37,373,000)	98.64%	KURANG TERUMUMKAN
33	403821	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	5,838,732,000		5,838,732,000	5,838,732,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
34	652009	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	5,240,629,000		5,240,629,000	4,764,876,000	475,753,000	109.98%	LEBIH TERUMUMKAN
35	427551	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	2,241,459,000		2,241,459,000	2,216,403,000	25,056,000	101.13%	LEBIH TERUMUMKAN
36	427573	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	4,035,922,000	25,900,000	4,061,822,000	4,061,822,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
37	427582	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	1,375,951,000		1,375,951,000	1,375,951,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
38	427630	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	1,326,290,000		1,326,290,000	1,102,825,000	223,465,000	120.26%	LEBIH TERUMUMKAN
39	237373	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	2,366,032,000		2,366,032,000	2,366,032,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
40	427618	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	1,852,257,000		1,852,257,000	1,852,257,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
41	626402	SEKRETARIAT BADAN RISET PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN	777,685,374,000		777,685,374,000	777,685,374,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
42	389090	PUSAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA KELUTAN DAN PERIKANAN	2,071,986,000		2,071,986,000	2,071,986,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
TOTAL			1,044,235,736,000	25,900,000	1,044,261,636,000	1,044,582,048,000	(320,412,000)	99.97%	Capaian IKU : 99.97

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(04) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya – 16 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP						
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	04	DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA							
1	239192	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	34,210,072,000		34,210,072,000	33,793,812,000	416,260,000	101.23%	LEBIH TERUMUMKAN
2	238734	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	26,278,799,000		26,278,799,000	26,278,799,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
3	427706	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	17,815,644,000		17,815,644,000	17,815,644,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
4	445393	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG	140,988,207,000		140,988,207,000	140,988,207,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
5	567800	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	3,287,862,000		3,287,862,000	3,287,862,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
6	567350	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	48,342,980,000	712,340,000	49,055,320,000	49,055,320,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
7	567680	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	15,769,606,000		15,769,606,000	15,769,606,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
8	567385	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	10,567,720,000		10,567,720,000	10,567,720,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
9	567584	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	16,416,369,000		16,416,369,000	16,416,369,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
10	237657	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	19,225,478,000		19,225,478,000	19,225,478,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
11	538911	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	11,923,306,000		11,923,306,000	11,923,306,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
12	567720	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	14,325,630,000		14,325,630,000	14,325,630,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
13	567474	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	9,238,563,000		9,238,563,000	9,238,563,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
14	567762	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	13,441,592,000		13,441,592,000	13,441,592,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
15	445394	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	6,052,853,000	69,361,000	6,122,214,000	6,122,214,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
16	632462	SETDITJEN PERIKANAN BUDI DAYA	1,570,143,034,304	8,138,554,000	1,578,281,588,304	1,583,503,278,000	(5,221,689,696)	99.67%	KURANG TERUMUMKAN
TOTAL			1,958,027,715,304	8,920,255,000	1,966,947,970,304	1,971,753,400,000	(4,805,429,696)	99.76%	Capaian IKU : 99.76

(03) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan – 15 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP						
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	05	DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	440822	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	20,336,525,000		20,336,525,000	20,336,525,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
2	440816	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	14,138,759,000		14,138,759,000	13,244,623,000	894,136,000	106.75%	LEBIH TERUMUMKAN
3	440853	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	21,094,321,000		21,094,321,000	21,094,321,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
4	325156	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM	18,809,471,000		18,809,471,000	18,809,471,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
5	225135	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BENOA	15,234,749,000		15,234,749,000	15,234,749,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
6	065135	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO	21,461,321,000		21,461,321,000	21,461,321,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
7	449520	SETDITJEN PENGAWASAN SDKP	1,408,211,201,400	296,000,000	1,408,507,201,400	1,413,260,698,000	(4,753,496,600)	99.66%	KURANG TERUMUMKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP						
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	05	DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							
8	440831	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	16,703,883,000	148,800,000	16,852,683,000	16,852,683,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
9	440847	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	18,599,397,000		18,599,397,000	18,599,397,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
10	215141	STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON	9,715,404,000		9,715,404,000	9,715,404,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
11	250263	STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK	7,494,664,000		7,494,664,000	7,617,665,000	(123,001,000)	98.39%	KURANG TERUMUMKAN
12	031665	STASIUN PENGAWASAN SDKP CILACAP	15,532,133,000		15,532,133,000	15,477,487,000	54,646,000	100.35%	LEBIH TERUMUMKAN
13	245160	STASIUN PENGAWASAN SDKP KUPANG	8,923,976,000		8,923,976,000	8,923,976,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
14	170445	STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA	9,681,302,000		9,681,302,000	9,681,302,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
15	355105	STASIUN PENGAWASAN SDKP TARAKAN	6,569,187,000		6,569,187,000	6,569,187,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
TOTAL			1,612,506,293,400	444,800,000	1,612,951,093,400	1,616,878,809,000	(3,927,715,600)	99.76%	Capaian IKU : 99.76

(13) Badan Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan – 47 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP						
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	13	BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	427598	BALAI BESAR KIPM DAN KHP MAKASSAR	18,787,046,000		18,787,046,000	18,787,046,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
2	567610	BALAI KIPM DAN KHP BALIKPAPAN	726,519,000		726,519,000	726,519,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
3	649615	BALAI KIPM DAN KHP LAMPUNG	1,029,385,000		1,029,385,000	1,029,385,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
4	649750	BALAI KIPM DAN KHP AMBON	1,339,462,000		1,339,462,000	1,339,462,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
5	649593	BALAI KIPM DAN KHP BANJARMASIN	1,057,310,000		1,057,310,000	1,057,310,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
6	427624	BALAI KIPM DAN KHP DENPASAR	2,030,406,000		2,030,406,000	2,030,406,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
7	649568	BALAI KIPM DAN KHP ENTIKONG	526,628,000		526,628,000	526,628,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
8	649682	BALAI KIPM DAN KHP JAKARTA II	2,027,441,000		2,027,441,000	2,027,441,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
9	567812	BALAI KIPM DAN KHP JAYAPURA	942,893,000		942,893,000	942,893,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
10	567631	BALAI KIPM DAN KHP MANADO	1,141,041,000		1,141,041,000	1,141,041,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
11	567758	BALAI KIPM DAN KHP MATARAM	922,433,000		922,433,000	922,433,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
12	427567	BALAI KIPM DAN KHP MEDAN I	1,263,624,000		1,263,624,000	1,263,624,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
13	649661	BALAI KIPM DAN KHP SEMARANG	1,433,853,000		1,433,853,000	1,433,853,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
14	427542	BALAI KIPM DAN KHP SURABAYA I	2,131,730,000		2,131,730,000	2,131,730,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
15	649788	BALAI KIPM DAN KHP SURABAYA II	909,530,000	2,380,979,000	3,290,509,000	3,290,509,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP						
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	13	BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN							
16	649640	BALAI KIPM DAN KHP TANJUNG PINANG	388,074,000		388,074,000	388,074,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
17	649572	BALAI KIPM DAN KHP TARAKAN	872,480,000		872,480,000	872,480,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
18	662897	BALAI UJI STANDAR KIPM DAN KHP	23,377,763,000		23,377,763,000	23,377,763,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
19	440807	SEKRETARIAT BADAN KIPM DAN KHP	100,174,507,000		100,174,507,000	99,351,660,000	822,847,000	100.83%	LEBIH TERUMUMKAN
20	567694	STASIUN KIPM DAN KHP KENDARI	228,306,000		228,306,000	228,306,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
21	645691	STASIUN KIPM DAN KHP MAMUJU	132,060,000		132,060,000	132,060,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
22	649711	STASIUN KIPM DAN KHP SORONG	264,756,000		264,756,000	264,756,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
23	649589	STASIUN KIPM DAN KHP ACEH	1,094,470,000		1,094,470,000	1,094,470,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
24	645693	STASIUN KIPM DAN KHP BANDUNG	753,105,000		753,105,000	753,105,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
25	427649	STASIUN KIPM DAN KHP BATAM	737,668,000		737,668,000	768,388,000	(30,720,000)	96.00%	KURANG TERUMUMKAN
26	649792	STASIUN KIPM DAN KHP BAUBAU	160,800,000		160,800,000	160,800,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
27	649622	STASIUN KIPM DAN KHP BENGKULU	574,268,000		574,268,000	574,268,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
28	649814	STASIUN KIPM DAN KHP BIMA	784,570,000		784,570,000	784,570,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
29	649732	STASIUN KIPM DAN KHP CIREBON	758,484,000		758,484,000	758,484,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
30	649678	STASIUN KIPM DAN KHP GORONTALO	493,789,000		493,789,000	493,789,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
31	649636	STASIUN KIPM DAN KHP JAMBI	195,176,000		195,176,000	195,176,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
32	649551	STASIUN KIPM DAN KHP KUPANG	380,500,000		380,500,000	380,500,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
33	649771	STASIUN KIPM DAN KHP LUWUK BANGGAI	171,170,000		171,170,000	171,170,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
34	649684	STASIUN KIPM DAN KHP MEDAN II	978,651,000		978,651,000	978,651,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
35	649688	STASIUN KIPM DAN KHP MERAK	996,270,000		996,270,000	996,270,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
36	649704	STASIUN KIPM DAN KHP MERAUKE	903,509,000		903,509,000	903,509,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
37	567432	STASIUN KIPM DAN KHP PADANG	748,892,000		748,892,000	748,892,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
38	649657	STASIUN KIPM DAN KHP PALANGKARAYA	853,490,000		853,490,000	853,490,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
39	567481	STASIUN KIPM DAN KHP PALEMBANG	390,073,000		390,073,000	390,073,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
40	649601	STASIUN KIPM DAN KHP PALU	397,648,000		397,648,000	397,648,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
41	649699	STASIUN KIPM DAN KHP PANGKAL PINANG	1,284,545,000		1,284,545,000	1,284,545,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
42	567453	STASIUN KIPM DAN KHP PEKANBARU	754,512,000		754,512,000	754,512,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
43	567538	STASIUN KIPM DAN KHP PONTIANAK	833,020,000		833,020,000	833,020,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP						
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	13	BADAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN							
44	649800	STASIUN KIPM DAN KHP TAHUNA	444,470,000		444,470,000	444,470,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
45	649746	STASIUN KIPM DAN KHP TANJUNG BALAI ASAHAN	656,615,000	69,720,000	726,335,000	726,335,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
46	649767	STASIUN KIPM DAN KHP TERNATE	705,319,000		705,319,000	705,319,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
47	649725	STASIUN KIPM DAN KHP YOGYAKARTA	1,126,386,000		1,126,386,000	1,126,386,000	0	100.00%	TERUMUMKAN 100%
TOTAL			178,884,647,000	2,450,699,000	181,335,346,000	180,543,219,000	792,127,000	100.44%	Capaian IKU : 99.56

(02) Inspektorat Jenderal – 1 Satker.

No	Kode E1 / Satker	Nama Satker	CETAKAN PAKET RUP						
			PENYEDIA	SWAKELOLA	TOTAL	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih	% RUP TERUMUMKAN	Keterangan
	02	INSPEKTORAT JENDERAL							
1	622098	INSPEKTORAT JENDERAL	13,093,680,000		13,093,680,000	13,030,248,000	63,432,000	100.49%	LEBIH TERUMUMKAN
TOTAL			13,093,680,000	-	13,093,680,000	13,030,248,000	63,432,000	100.49%	Capaian IKU : 99.51

Ditandatangani
Secara Elektronik

Teguh Wibowo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK)
BALAI PPMHKP BALIKPAPAN

NAMA INDIKATOR : SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT LINGKUP BALAI PPMHKP BALIKPAPAN
NAMA TIMJA : DUKUNGAN MANAJERIAL
PERIODE LAPORAN : TRIWULAN II / 2026

Nama Sasaran Kegiatan	**:**	**Tatakelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel lingkup Balai PPMHKP Balikpapan**
Nama Indikator Kinerja	**:**	**Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Balai PPMHKP Balikpapan**

T / R	Tahun 2026							Capaian Tahun 2026	Target Tahun 2026
	Q1	Q2	SM. 1	Q3	Q4	SM. 2	Tahunan		
Target	3,50	89	89				89		89
Realisasi	3,91	95.88	95.88						
% Capaian	111,71	107.73	107.73						

Catatan :
Q1, Q2, Q3, Q4 : Capaian selama triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4
SM. 1 : Capaian Q1 + Capaian Q2
SM. 2 : Capaian Q3 + Capaian Q4
Tahunan : Capaian di akhir tahun 2024

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya ?)

Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan salah satu instrumen evaluasi untuk menilai persepsi pengguna layanan terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Balai PPMHKP Balikpapan. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa nilai IKM yang diperoleh adalah 94.11, yang termasuk dalam kategori Sangat Baik. Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum pelayanan yang diberikan telah memenuhi harapan masyarakat dan pengguna layanan.

Meskipun demikian, hasil survei juga mengidentifikasi beberapa aspek yang masih memerlukan perhatian dan perbaikan agar kualitas pelayanan dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Beberapa unsur pelayanan memperoleh nilai yang relatif lebih rendah dibandingkan unsur lainnya, yaitu Kompetensi Pelaksana (3,46), Perilaku Pelaksana (3,61), serta Biaya/Tarif (3,63). Nilai tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam peningkatan kompetensi petugas, kualitas interaksi pelayanan, serta penyampaian informasi mengenai biaya dan tarif layanan agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

Apabila berbagai isu tersebut tidak segera ditindaklanjuti, maka berpotensi menurunkan tingkat kepuasan masyarakat pada periode berikutnya, mengurangi kepercayaan pengguna layanan, serta memengaruhi pencapaian target kinerja organisasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.

Terdapat beberapa isu utama yaitu :

1. Perubahan organisasi

   Perubahan struktur organisasi sebagai tindak lanjut penyesuaian regulasi menyebabkan adanya perubahan pembagian tugas, mekanisme serta penyesuaian standar pelayanan. Kondisi tersebut membutuhkan proses adaptasi bagi seluruh pegawai agar pelayanan tetap berjalan efektif dan konsisten.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Implikasi :

- Penyesuaian Standar Pelayanan dan SOP.
- Adaptasi pegawai terhadap tugas dan mekanisme kerja baru dan melakukan sosialisasi internal agar kualitas pelayanan tetap terjaga

2. Tugas dan Fungsi yang diampu

Balai PPMHKP Balikpapan melaksanakan berbagai layanan pengujian laboratorium, inspeksi mutu, sertifikasi, pengendalian keamanan hasil perikanan, pelayanan informasi, serta pelayanan administrasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Bertambahnya kompleksitas layanan memerlukan peningkatan kompetensi petugas dan koordinasi lintas fungsi.

Implikasi :

Dibutuhkan peningkatan kompetensi teknis dan pelayanan prima.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Jumlah inspektur mutu/ petugas pelayanan masih belum sepenuhnya sebanding dengan volume layanan yang terus meningkat. Selain itu, peningkatan kapasitas inspektur mutu/ petugas pelayanan masih perlu dilakukan secara berkelanjutan, khususnya dalam komunikasi pelayanan, pelayanan prima, dan penguasaan aplikasi layanan.

Implikasi :

- Waktu pelayanan dapat dipengaruhi apabila terjadi peningkatan jumlah permohonan.
- Perlu peningkatan kompetensi secara berkala.

4. Sarana dan Prasarana belum memadai

Masih terdapat kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana, baik pada laboratorium pengujian maupun fasilitas pelayanan publik. Beberapa fasilitas yang masih memerlukan penyempurnaan antara lain ruang pengaduan yang lebih representatif, fasilitas bagi penyandang disabilitas, media informasi pelayanan, serta kelengkapan peralatan laboratorium untuk mendukung kualitas pelayanan.

Implikasi:

- Aksesibilitas bagi kelompok rentan masih perlu ditingkatkan.
- Dukungan terhadap pelayanan laboratorium belum sepenuhnya optimal.

5. Anggaran pelaksanaan kegiatan belum optimal

Pelaksanaan efisiensi anggaran berdampak pada terbatasnya pelaksanaan beberapa kegiatan pendukung peningkatan kualitas pelayanan, seperti pengembangan sarana pelayanan, peningkatan kompetensi SDM, publikasi informasi layanan, dan penguatan inovasi pelayanan.

Implikasi :

- Prioritas kegiatan difokuskan pada pelayanan inti.
- Optimalisasi sumber daya yang tersedia menjadi sangat penting

.

Isu-isu tersebut menegaskan pentingnya penyelenggaraan SKM secara berkala untuk mengidentifikasi kesenjangan antara harapan dan kenyataan layanan, serta sebagai dasar dalam penyusunan strategi perbaikan berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan /kegagalan pencapaian indikator disertakan foto/ dokumentasi
Berdasarkan Surat dari Sekretariat BPPMHKP Nomor 1955/BPPMHKP.1/HM.450/VII/2026 tanggal 09 Juli 2026 tentang Penyampaian Hasil Validasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPPMHKP Triwulan II Tahun 2026, Balai PPMHKP Balikpapan memperoleh nilai 94,11 dengan kategori mutu pelayanan Sangat Baik. Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Sampai dengan Triwulan II atau Semester I Tahun 2026 sebesar 95.88 % atau nilai pencapaiannya sebesar 107.73 %. Meskipun capaian indikator telah memenuhi target kinerja, terdapat tiga unsur pelayanan yang memperoleh nilai terendah, yaitu pada unsur kompetensi pelaksana dengan nilai 3.46; pada unsur perilaku pelaksana dengan nilai 3.61; dan pada unsur biaya /tarif dengan nilai 3.63. Adapun kondisi permasalahan/ kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut : • Pengguna layanan masih mengharapkan peningkatan kemampuan teknis, komunikasi, dan informasi pelayanan oleh petugas. • Diperlukan penguatan budaya pelayanan prima dan konsistensi pelayanan kepada seluruh pengguna layanan. • Informasi mengenai biaya dan tarif layanan masih perlu dipublikasikan secara lebih jelas dan mudah diakses masyarakat. Rencana Tindak Lanjut Berdasarkan hasil evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan II yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Kompetensi Pelaksana • Melaksanakan pelatihan pelayanan prima dan mengikuti Microlearning Pelayanan Prima melalui platform pembelajaran KKP. • Melaksanakan refreshment internal dan menguatkan pemahaman terhadap Standar Pelayanan, SOP, serta regulasi terbaru. 2. Peningkatan Perilaku Pelaksana • Melaksanakan morning briefing secara rutin. • Meningkatkan budaya kerja berorientasi pelayanan. • Memberikan pembinaan kepada petugas pelayanan terkait komunikasi efektif dan etika pelayanan. 3. Peningkatan Unsur Biaya/Tarif • Menempatkan infografis biaya layanan pada ruang pelayanan dan media digital. • Menyampaikan informasi biaya kepada pengguna layanan sebelum proses pelayanan dimulai. • Melakukan sosialisasi tarif layanan melalui website dan media sosial resmi. 4. Penguatan Sarana dan Prasarana • Mengusulkan pemenuhan fasilitas pelayanan disabilitas dan mengembangkan ruang pengaduan yang lebih representatif. • Melengkapi media informasi pelayanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

5. Penguatan Monitoring dan Evaluasi

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil SKM setiap triwulan dan menyusun rencana aksi perbaikan berdasarkan hasil survei.
- Melakukan monitoring terhadap efektivitas tindak lanjut yang telah dilaksanakan.

Sebagai tindak lanjut atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan I Tahun 2026, khususnya terhadap unsur-unsur yang memperoleh nilai terendah, Balai PPMHKP Balikpapan telah melaksanakan berbagai kegiatan perbaikan sebagai upaya mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik, yaitu :

- Melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai media memperoleh masukan dari pengguna layanan terhadap penyempurnaan standar pelayanan.
- Melaksanakan rapat evaluasi hasil SKM bersama seluruh unit pelayanan untuk mengidentifikasi akar penyebab rendahnya nilai pada beberapa unsur pelayanan.
- Melaksanakan morning briefing secara rutin sebagai media penyampaian informasi pelayanan, evaluasi kinerja harian, serta penguatan budaya pelayanan prima.
- Melaksanakan refreshment dan microlearning pelayanan prima bagi Inspektur Mutu dan Petugas Administrasi melalui pembelajaran mandiri dan diskusi internal.
- Memberikan asistensi secara langsung kepada pengguna layanan terkait penggunaan aplikasi SIAPMUTU, OSS, dan pemahaman standar pelayanan.
- Memperbarui media informasi pelayanan, termasuk publikasi persyaratan layanan, prosedur pelayanan, standar pelayanan, serta informasi biaya/tarif melalui media informasi dan kanal digital.

Dokumentasi kegiatan :

Ket : Melaksanakan morning briefing secara rutin sebagai media penyampaian informasi pelayanan, evaluasi kinerja harian, serta penguatan budaya pelayanan prima.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Ket : Melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai media memperoleh masukan dari pengguna layanan terhadap penyempurnaan standar pelayanan.

Ket : Memberikan asistensi secara langsung kepada pengguna layanan terkait penggunaan aplikasi SIAPMUTU, OSS, dan pemahaman standar pelayanan

Ket : Melakukan pembaruan dan penyebarluasan informasi tarif PNBP sesuai ketentuan yang berlaku melalui media informasi di ruang pelayanan, website, media sosial, serta media digital lainnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Ket : Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Balai PPMHKP Balikpapan memperoleh Nilai Survey Kepuasan Masyarakat sebesar 94,11 dengan kategori Sangat Baik. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan telah memenuhi harapan bagi pengguna layanan dan mencerminkan komitmen organisasi dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan berkualitas.

Meskipun demikian, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan peningkatan, khususnya pada unsur Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, dan Biaya/Tarif. Selain itu, beberapa faktor internal seperti perubahan organisasi, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, serta efisiensi anggaran turut menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Melalui pelaksanaan berbagai rencana tindak lanjut, diharapkan kualitas pelayanan publik di Balai PPMHKP Balikpapan dapat terus meningkat, mempertahankan tingkat kepuasan masyarakat, serta mendukung tercapainya sasaran kinerja organisasi secara optimal pada triwulan berikutnya.

Rekomendasi rencana aksi untuk triwulan berikutnya	**Penanggung Jawab**
• Pendampingan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat secara langsung • Penentuan standar layanan • Refreshment petugas pelayanan publik	Timja Dukungan Manajerial

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Hasil TL rekomendasi rencana aksi triwulan sebelumnya	Penanggung Jawab
Hasil rekomendasi triwulan I tahun 2026 telah ditindaklanjuti sebesar 100 %	Timja Dukungan Manajerial

Balikpapan, 14 Juli 2026
Plh. Kepala Balai PPMHKP Balikpapan

Frederica Ethis Maharani

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bppmhkp@kkp.go.id

Nomor	:	1955/BPPMHKP.1/HM.450/VII/2026	09 Juli 2026
Sifat	:	Biasa	
Lampiran	:	1 berkas	
Hal	:	Penyampaian Hasil Validasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPPMHKP Triwulan II Tahun 2026	

Yth. (Daftar Terlampir)
Di tempat

Sehubungan dengan berakhirnya periode Triwulan II tahun 2026 telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna jasa layanan pada Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OP) BPPMHKP dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Target nilai SKM yang ditetapkan pada Triwulan II tahun 2026 adalah 89 sebagaimana telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2026 masing-masing OP lingkup BPPMHKP. Sebagai pedoman perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan pada periode berikutnya, berikut adalah capaian hasil validasi SKM berdasarkan Nota Dinas Nomor 2290/SJ.8/TU.140/VII/2026 perihal Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kementerian Kelautan dan Perikanan periode Triwulan II Tahun 2026 oleh Kepala Pusat Data dan Informasi.

1. Nilai rata-rata SKM yang didapatkan dari seluruh OP BPPMHKP pada Triwulan II Tahun 2026 adalah **96,67** dengan rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat **3,87** dan mutu pelayanan diperoleh "**A**" kategori "**Sangat Baik**". Jumlah responden yang diperoleh sebanyak 3.001 (tiga ribu satu) responden yang melakukan survei.
2. Jumlah OP BPPMHKP yang mendapatkan nilai SKM kategori **"Sangat Baik"** tercatat sebanyak 47 (empat puluh tujuh) atau seluruh OP lingkup BPPMHKP.
3. Hasil SKM berdasarkan rekap per produk layanan mendapatkan kategori **"Sangat Baik"** tercatat sebanyak 13 (tiga belas) produk layanan atau seluruh produk layanan lingkup BPPMHKP.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Rekapitulasi per unsur layanan didapatkan rincian nilai sebagai berikut:

Unsur Layanan	Nilai SKM	Indeks
Unsur 1 : Persyaratan Pelayanan	97,11	3,88
Unsur 2 : Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	96,77	3,87
Unsur 3 : Waktu Penyelesaian Pelayanan	96,79	3,87
Unsur 4 : Biaya/Tarif Pelayanan	96,62	3,86
Unsur 5 : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	96,90	3,88
Unsur 6 : Kompetensi Pelaksana	96,03	3,84
Unsur 7 : Perilaku Pelaksana	96,11	3,84
Unsur 8 : Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	96,90	3,88
Unsur 9 : Sarana dan Prasarana	96,77	3,87

Nilai terendah ada pada 3 (tiga) unsur yakni U6 (Kompetensi Pelaksana), U7 (Perilaku Pelaksana) dan U4 (Biaya/Tarif Pelayanan).

5. Berdasarkan hasil validasi tersebut mohon kepada kepala OP untuk dapat memberikan perhatian lebih pada produk layanan dan unsur layanan yang mempunyai nilai rendah, serta kritik dan saran dalam melakukan tindak lanjut perbaikan pada aspek-aspek yang dapat meningkatkan kinerja setiap unsur pelayanan pada seluruh jenis layanan yang diampu oleh OP masing-masing.

6. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh OP lingkup BPPMHKP yang telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan baik dan penuh tanggung jawab. Partisipasi aktif serta komitmen yang telah ditunjukkan dalam penyelenggaraan survei ini menjadi kontribusi penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan PPMHKP
Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan,

Ditandatangani Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

Tembusan:
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Surat Dinas
Nomor : 1955/BPPMHKP.1/HM.450/VII/2026
Tanggal : 09 Juli 2026

Kepala Unit Kerja lingkup Badan PPMHKP

1. Kepala Pusat Manajemen Mutu
2. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer
3. Kepala Pusat Mutu Pascapanen
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP

a.n. Kepala Badan PPMHKP
Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan,

Ditandatangani Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik (OP) lingkup BPPMHKP Triwulan II Tahun 2026

NO	OP	INDEKS DAN NILAI PER-UNSUR LAYANAN									INDEKS	NILAI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	Metode SKM
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9						
1	Stasiun PPMHKP Palu	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik	27	Online
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
2	Stasiun PPMHKP Tanjung Balai Asahan	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik	11	Online
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
3	Stasiun PPMHKP Tahuna	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik	2	Online
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
4	Balai PPMHKP Banjarbaru	3,99	4,00	3,99	4,00	4,00	4,00	3,99	3,99	3,99	4,00	99,90	A	Sangat Baik	142	Online
		99,82	100,00	99,82	100,00	100,00	100,00	99,82	99,82	99,82						
5	Stasiun PPMHKP Merak	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,96	4,00	4,00	4,00	4,00	99,90	A	Sangat Baik	27	Online
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,07	100,00	100,00	100,00						
6	Stasiun PPMHKP Gorontalo	4,00	3,98	3,98	3,98	4,00	3,98	4,00	3,98	3,98	3,99	99,72	A	Sangat Baik	59	Online
		100,00	99,58	99,58	99,58	100,00	99,58	100,00	99,58	99,58						
7	Balai PPMHKP Jayapura	3,88	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,99	99,65	A	Sangat Baik	8	Online
		96,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
8	Stasiun PPMHKP Pangkal Pinang	4,00	3,98	3,98	3,97	3,98	3,98	3,98	3,98	3,97	3,98	99,57	A	Sangat Baik	64	Online
		100,00	99,61	99,61	99,22	99,61	99,61	99,61	99,61	99,22						
9	Stasiun PPMHKP Ternate	3,96	3,98	3,98	3,98	3,98	3,96	3,96	3,96	3,96	3,97	99,25	A	Sangat Baik	52	Online
		99,04	99,52	99,52	99,52	99,52	99,04	99,04	99,04	99,04						
10	Balai PPMHKP Surabaya II	4,00	3,99	3,99	3,99	3,99	3,90	3,85	3,99	3,99	3,97	99,16	A	Sangat Baik	119	Online
		100,00	99,79	99,79	99,79	99,79	97,48	96,22	99,79	99,79						
11	Balai PPMHKP Makassar	3,96	3,97	3,97	3,96	3,97	3,95	3,96	3,96	3,96	3,96	99,08	A	Sangat Baik	363	Online
		99,04	99,24	99,17	99,10	99,24	98,83	99,10	99,04	98,97						
12	Balai PPMHKP Ambon	3,97	3,97	3,93	3,97	3,96	3,95	3,96	3,97	3,96	3,96	99,00	A	Sangat Baik	100	Online
		99,25	99,25	98,25	99,25	99,00	98,75	99,00	99,25	99,00						
13	Stasiun PPMHKP Pekanbaru	3,97	3,96	3,97	3,94	3,96	3,94	3,94	3,95	3,96	3,95	98,86	A	Sangat Baik	234	Online
		99,15	98,93	99,25	98,50	98,93	98,50	98,61	98,82	99,04						
14	Stasiun PPMHKP Pontianak	4,00	4,00	3,99	4,00	4,00	3,89	3,88	3,89	3,89	3,95	98,72	A	Sangat Baik	74	Online
		100,00	100,00	99,66	100,00	100,00	97,30	96,96	97,30	97,30						
15	Balai PPMHKP	3,92	3,92	3,86	3,92	3,94	3,93	3,91	3,94	3,95	3,92	98,00	A	Sangat Baik	111	Online

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	Tanjung Pinang	97,97	97,97	96,62	97,97	98,42	98,20	97,75	98,42	98,65						
16	Stasiun PPMHKP Yogyakarta	3,96	3,92	3,96	3,88	3,96	3,85	3,88	3,92	3,88	3,91	97,86	A	Sangat Baik	26	Online
		99,04	98,08	99,04	97,12	99,04	96,15	97,12	98,08	97,12						
17	Stasiun PPMHKP Luwuk Banggai	3,93	4,00	3,87	3,87	3,93	3,93	3,87	3,93	3,87	3,91	97,78	A	Sangat Baik	15	Online
		98,33	100,00	96,67	96,67	98,33	98,33	96,67	98,33	96,67						
18	Stasiun PPMHKP Cirebon	3,93	3,92	3,93	3,94	3,91	3,83	3,86	3,90	3,90	3,90	97,56	A	Sangat Baik	115	Online
		98,26	98,04	98,26	98,48	97,83	95,65	96,52	97,39	97,61						
19	Stasiun PPMHKP Medan II	3,91	3,92	3,89	3,92	3,92	3,88	3,88	3,92	3,88	3,90	97,53	A	Sangat Baik	64	Online
		97,66	98,05	97,27	98,05	98,05	96,88	96,88	98,05	96,88						
20	Stasiun PPMHKP Bengkulu	3,91	3,83	3,91	3,87	3,91	3,91	3,91	3,96	3,87	3,90	97,46	A	Sangat Baik	23	Online
		97,83	95,65	97,83	96,74	97,83	97,83	97,83	98,91	96,74						
21	Stasiun PPMHKP Bima	4,00	4,00	4,00	3,50	3,83	3,83	4,00	4,00	3,83	3,89	97,22	A	Sangat Baik	6	Online
		100,00	100,00	100,00	87,50	95,83	95,83	100,00	100,00	95,83						
22	Stasiun PPMHKP Sorong	3,90	3,94	3,81	3,87	3,84	3,84	3,87	3,87	3,90	3,87	96,77	A	Sangat Baik	31	Online
		97,58	98,39	95,16	96,77	95,97	95,97	96,77	96,77	97,58						
23	Balai PPMHKP Mataram	3,84	3,84	3,87	3,90	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	96,68	A	Sangat Baik	31	Online
		95,97	95,97	96,77	97,58	96,77	96,77	96,77	96,77	96,77						
24	Stasiun PPMHKP Kendari	3,96	3,89	3,89	3,71	3,86	3,86	3,82	3,82	3,93	3,86	96,53	A	Sangat Baik	28	Online
		99,11	97,32	97,32	92,86	96,43	96,43	95,54	95,54	98,21						
25	Stasiun PPMHKP Aceh	3,90	3,80	3,80	3,90	3,90	3,80	3,80	3,90	3,80	3,84	96,11	A	Sangat Baik	10	Online
		97,50	95,00	95,00	97,50	97,50	95,00	95,00	97,50	95,00						
26	Balai PPMHKP Denpasar	3,87	3,83	3,81	3,82	3,81	3,84	3,84	3,83	3,86	3,83	95,87	A	Sangat Baik	154	Online
		96,75	95,78	95,13	95,62	95,29	95,94	96,10	95,78	96,43						
27	Stasiun PPMHKP Bandung	3,83	3,92	3,92	3,83	3,75	3,83	3,75	3,83	3,83	3,83	95,83	A	Sangat Baik	12	Online
		95,83	97,92	97,92	95,83	93,75	95,83	93,75	95,83	95,83						
28	Balai PPMHKP Medan I	3,87	3,85	3,85	3,87	3,85	3,81	3,83	3,83	3,70	3,83	95,70	A	Sangat Baik	53	Online
		96,70	96,23	96,23	96,70	96,23	95,28	95,75	95,75	92,45						
29	Stasiun PPMHKP Bau-Bau	3,72	3,83	3,72	3,78	3,83	3,83	3,94	3,83	3,89	3,82	95,52	A	Sangat Baik	18	Online
		93,06	95,83	93,06	94,44	95,83	95,83	98,61	95,83	97,22						
30	Stasiun PPMHKP Kupang	3,83	3,80	3,80	3,78	3,82	3,83	3,83	3,82	3,82	3,81	95,35	A	Sangat Baik	157	Online
		95,70	95,06	95,06	94,59	95,38	95,70	95,86	95,38	95,38						
31	Stasiun PPMHKP Padang	4,00	4,00	3,75	4,00	4,00	3,75	3,50	3,50	3,75	3,81	95,14	A	Sangat Baik	4	Online
		100,00	100,00	93,75	100,00	100,00	93,75	87,50	87,50	93,75						
32	Balai PPMHKP	3,82	3,81	3,78	3,78	3,81	3,78	3,77	3,81	3,80	3,80	94,93	A	Sangat Baik	74	Online

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	Jakarta	95,61	95,27	94,59	94,59	95,27	94,59	94,26	95,27	94,93						
33	Balai PPMHKP Semarang	3,78	3,78	3,83	3,82	3,83	3,70	3,75	3,82	3,82	3,79	94,74	A	Sangat Baik	76	Online
		94,41	94,41	95,72	95,39	95,72	92,43	93,75	95,39	95,39						
34	Balai PPMHKP Balikpapan	3,78	3,63	3,90	3,61	3,85	3,46	3,63	4,00	4,00	3,76	94,11	A	Sangat Baik	41	Online
		94,51	90,85	97,56	90,24	96,34	86,59	90,85	100,00	100,00						
35	Balai UJi Standar PPMHKP Jakarta	3,80	3,78	3,72	3,73	3,77	3,72	3,73	3,77	3,78	3,76	93,88	A	Sangat Baik	74	Online
		94,93	94,59	92,91	93,24	94,26	92,91	93,24	94,26	94,59						
36	Stasiun PPMHKP Palembang	3,78	3,72	3,72	3,69	3,75	3,75	3,78	3,81	3,67	3,74	93,52	A	Sangat Baik	36	Online
		94,44	93,06	93,06	92,36	93,75	93,75	94,44	95,14	91,67						
37	Balai PPMHKP Lampung	3,83	3,76	3,65	3,65	3,76	3,74	3,72	3,76	3,72	3,73	93,30	A	Sangat Baik	46	Online
		95,65	94,02	91,30	91,30	94,02	93,48	92,93	94,02	92,93						
38	Balai PPMHKP Entikong	3,78	3,69	3,77	3,64	3,71	3,71	3,68	3,73	3,79	3,72	93,06	A	Sangat Baik	90	Online
		94,44	92,22	94,17	91,11	92,78	92,78	91,94	93,33	94,72						
39	Balai PPMHKP Manado	3,71	3,79	3,64	3,71	3,71	3,68	3,79	3,75	3,68	3,72	92,96	A	Sangat Baik	28	Online
		92,86	94,64	91,07	92,86	92,86	91,96	94,64	93,75	91,96						
40	Balai Besar PPMHKP Surabaya I	3,71	3,73	3,76	3,70	3,70	3,68	3,66	3,72	3,72	3,71	92,70	A	Sangat Baik	182	Online
		92,72	93,13	94,09	92,58	92,45	91,90	91,48	92,99	92,99						
41	Stasiun PPMHKP Mamuju	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,83	3,67	3,67	3,69	92,13	A	Sangat Baik	6	Online
		91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	91,67	95,83	91,67	91,67						
42	Pusat Manajemen Mutu	3,72	3,67	3,56	3,67	3,78	3,56	3,50	3,78	3,67	3,65	91,36	A	Sangat Baik	18	Online
		93,06	91,67	88,89	91,67	94,44	88,89	87,50	94,44	91,67						
43	Stasiun PPMHKP Jambi	3,73	3,64	3,73	3,91	3,61	3,52	3,45	3,70	3,61	3,65	91,33	A	Sangat Baik	33	Online
		93,18	90,91	93,18	97,73	90,15	87,88	86,36	92,42	90,15						
44	Balai PPMHKP Tarakan	3,66	3,69	3,66	3,69	3,66	3,59	3,63	3,63	3,61	3,64	91,10	A	Sangat Baik	64	Online
		91,41	92,19	91,41	92,19	91,41	89,84	90,63	90,63	90,23						
45	Stasiun PPMHKP Palangkaraya	3,65	3,69	3,58	3,58	3,69	3,62	3,62	3,54	3,65	3,62	90,60	A	Sangat Baik	26	Online
		91,35	92,31	89,42	89,42	92,31	90,38	90,38	88,46	91,35						
46	Stasiun PPMHKP Batam	3,70	3,46	3,71	3,71	3,64	3,54	3,48	3,71	3,64	3,62	90,58	A	Sangat Baik	56	Online
		92,41	86,61	92,86	92,86	91,07	88,39	87,05	92,86	91,07						
47	Stasiun PPMHKP Merauke	3,55	3,55	3,55	3,64	3,73	3,64	3,55	3,64	3,64	3,61	90,15	A	Sangat Baik	11	Online
		88,64	88,64	88,64	90,91	93,18	90,91	88,64	90,91	90,91						

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Rekapitulasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Produk Layanan lingkup BPPMHKP Triwulan II Tahun 2026

NO	PRODUK LAYANAN	JUMLAH RESPONDEN	INDEKS DAN NILAI PER-UNSUR LAYANAN									INDEKS	NILAI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9				
1	Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)	1	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	A	Sangat Baik
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
2	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	2129	3,91	3,90	3,91	3,90	3,90	3,88	3,88	3,90	3,91	3,90	97,48	A	Sangat Baik
			97,84	97,48	97,72	97,52	97,58	96,94	97,01	97,57	97,64				
3	Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	8	4,00	4,00	3,88	3,88	4,00	3,75	3,75	3,88	3,88	3,89	97,22	A	Sangat Baik
			100,00	100,00	96,88	96,88	100,00	93,75	93,75	96,88	96,88				
4	Bahan acuan yang disertai dengan *Certificate of Analysis* (CoA)	13	3,92	3,92	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	4,00	3,85	3,88	97,01	A	Sangat Baik
			98,08	98,08	96,15	96,15	96,15	96,15	96,15	100,00	96,15				
5	Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)	50	3,84	3,82	3,80	3,80	3,84	3,88	3,88	3,86	3,82	3,84	95,94	A	Sangat Baik
			96,00	95,50	95,00	95,00	96,00	97,00	97,00	96,50	95,50				
6	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)	104	3,88	3,85	3,83	3,85	3,85	3,81	3,78	3,87	3,83	3,84	95,89	A	Sangat Baik
			96,88	96,15	95,67	96,15	96,15	95,19	94,47	96,63	95,67				
7	Laporan hasil uji mutu produk perikanan	366	3,82	3,83	3,80	3,78	3,83	3,78	3,79	3,82	3,81	3,81	95,15	A	Sangat Baik
			95,56	95,77	94,95	94,60	95,77	94,40	94,67	95,49	95,15				
8	Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)	5	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	95,00	A	Sangat Baik
			95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00				
9	Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/*Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP)	200	3,80	3,81	3,78	3,77	3,82	3,75	3,76	3,83	3,81	3,79	94,75	A	Sangat Baik
			95,00	95,13	94,50	94,25	95,38	93,75	93,88	95,75	95,13				
10	Sertifikat Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB)	79	3,72	3,65	3,73	3,71	3,68	3,58	3,62	3,66	3,63	3,67	91,63	A	Sangat Baik
			93,04	91,14	93,35	92,72	92,09	89,56	90,51	91,46	90,82				
11	Sertifikat pengesahan nomor registrasi (*approval number*)	18	3,72	3,67	3,56	3,67	3,78	3,56	3,50	3,78	3,67	3,65	91,36	A	Sangat Baik
			93,06	91,67	88,89	91,67	94,44	88,89	87,50	94,44	91,67				
12	Sertifikat keikutsertaan dan *final report*	17	3,76	3,71	3,59	3,65	3,65	3,59	3,59	3,65	3,65	3,65	91,18	A	Sangat Baik
			94,12	92,65	89,71	91,18	91,18	89,71	89,71	91,18	91,18				
13	Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)	11	3,64	3,45	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	88,64	A	Sangat Baik
			90,91	86,36	88,64	88,64	88,64	88,64	88,64	88,64	88,64				
Seluruh Layanan BPPMHKP		**3001**	**3,88**	**3,87**	**3,87**	**3,86**	**3,88**	**3,84**	**3,84**	**3,88**	**3,87**	**96,67**	**3,87**	**A**	**Sangat Baik**
			97,11	**96,77**	**96,79**	**96,62**	**96,90**	**96,03**	**96,11**	**96,90**	**96,77**				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN

MONITORING EVALUASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

TRIWULAN II

2026

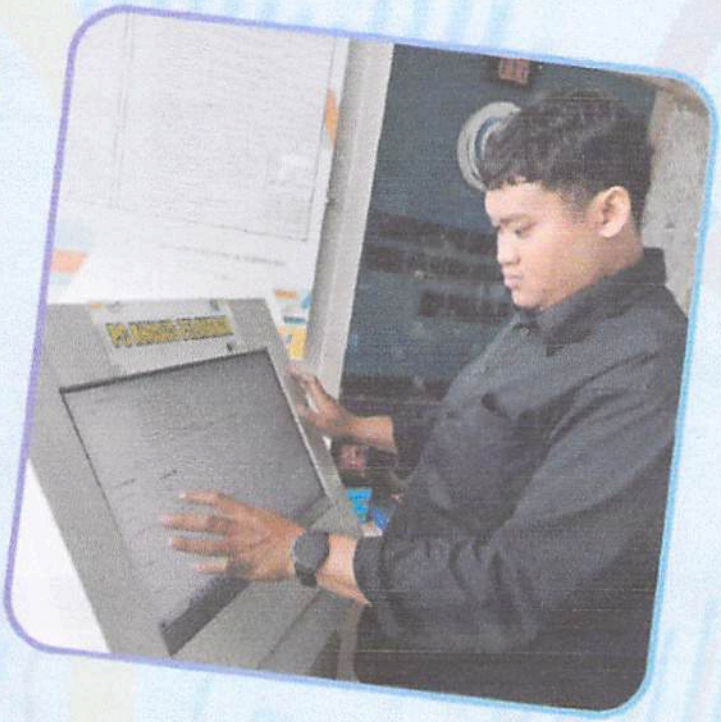

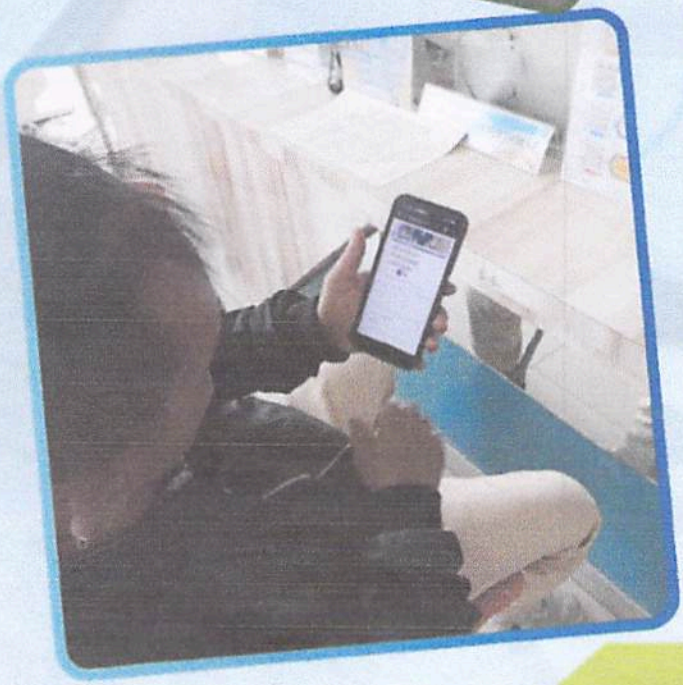

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN

PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIl KELAUTAN DAN PERIKANAN BALIKPAPAN TRIWULAN II TAHUN 2026

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN PERIKANAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

TAHUN 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan petunjuk-Nya sehingga Laporan Monitoring Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat/ Pelanggan Pada Triwulan II Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan Tahun 2026 dapat diselesaikan.

Laporan Monitoring Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat/ Pelanggan Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan ini dimaksudkan untuk mengukur dan mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/ pelanggan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan dengan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat/ pelanggan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan. Diharapkan laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan, peningkatan dan pengambilan kebijakan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan di masa yang akan datang, khususnya dilingkup Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan.

Kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat kami harapkan guna perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga Laporan Monitoring Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat/ Pelanggan Triwulan II Tahun 2026 Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan.

Balikpapan, 07 Juli 2026

Plh. Kepala Balai PPMHKP Balikpapan

Drh. Frederica Ethis M

NIP. 19851028 200912 2 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan sebagai salah satu Unit Pelayanan Publik (UPP) di Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; dan
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan administrasi yang telah diberikan oleh Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik; dan
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; dan
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada UPP Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan adalah tim yang sesuai DPA pada Kegiatan Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2026 (sebagaimana terlampir).

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner *online* melalui link *https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/22* yang disebarkan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 (sembilan) pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan melalui link kuesioner yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik per-triwulan dengan jangka waktu (periode) yaitu 1 (satu) tahun. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 4 (empat) bulan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	April 2026	8
2.	Pengumpulan Data	April - Juni 2026	90
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Juli 2026	7
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	Juli 2026	7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan triwulan I tahun 2026, maka populasi penerima layanan pada Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan dalam kurun waktu triwulan I tahun 2026 adalah sebanyak 57 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode SKM adalah 48 orang.

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 41 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	11	27%
		Perempuan	30	73%
2	Usia	<25	1	2%
		25-45	21	51%
		46-60	19	46%
		>60	0	0%
3	Pendidikan	SD	0	0%
		SMP	1	2%
		SMA	16	39%
		D3	0	0%
		S1	24	59%
		S2	0	0%
		S3	0	0%
4	Pekerjaan	ASN	1	2%
		TNI/POLRI	0	0%
		Pelaku Usaha KKP	2	5%
		Pegawai Swasta	36	88%
		Wirausaha Non KKP	2	5%
		Pelajar/Mahasiswa	0	0
5	Jenis Layanan	Uji Profisiensi bagi laboratorium pengujian penyakit ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	0	0%
		Penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif	0	0%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		Laporan hasil uji mutu produk perikanan	5	12%
		Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)	0	0%
		Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor)	35	85%
		Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	1	2%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik	0	0%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,78	3,63	3,90	3,61	3,85	3,46	3,63	4,0	4,0
Kategori	A	A	A	A	A	B	A	A	A
IKM Unit Layanan	94,11 (A atau Sangat Baik)								

Gambar 1. Grafik Nilai SKM Per Unsur

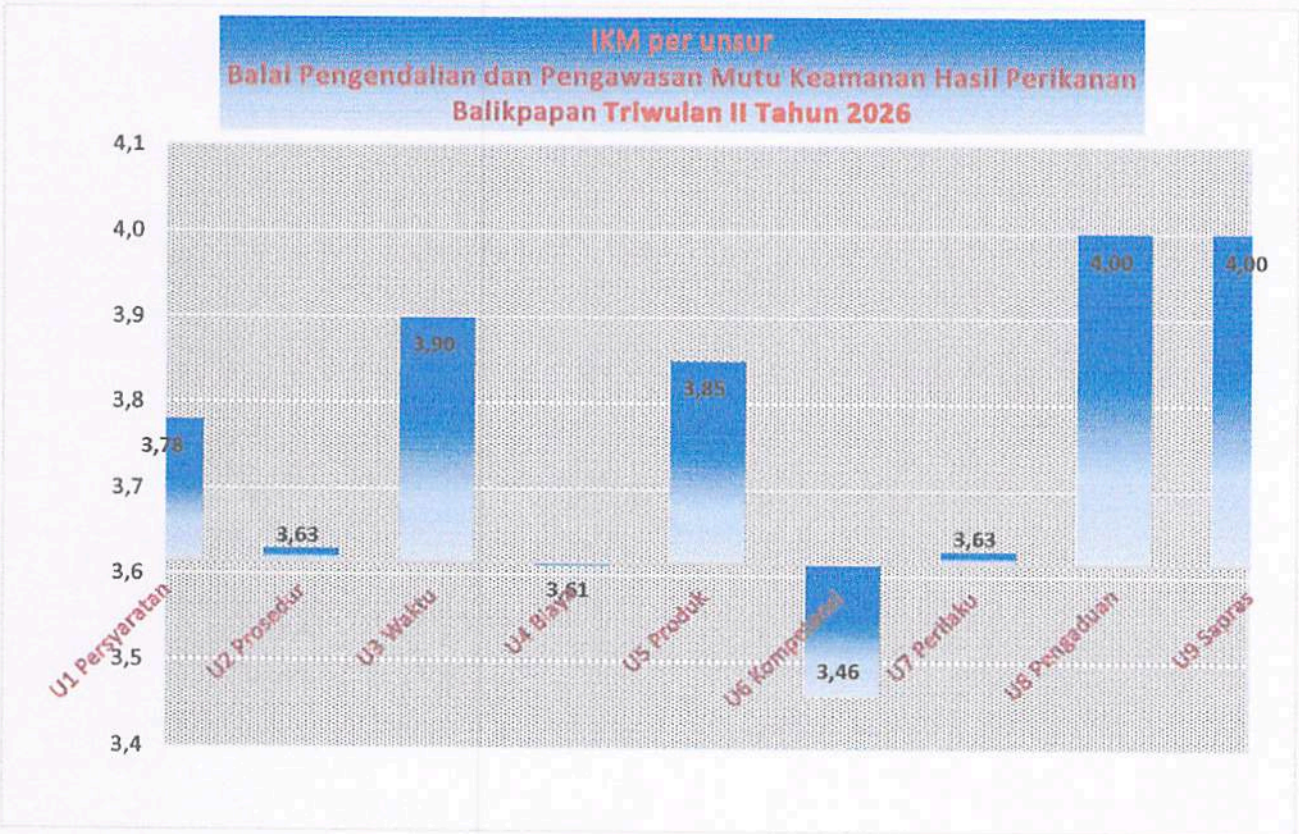

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/ Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Tiga unsur layanan terendah yang didapatkan ialah Kompetensi Pelaksana mendapatkan nilai terendah yaitu 3,46. Selanjutnya Biaya dan Tarif mendapatkan nilai 3,61 adalah nilai terendah kedua dan Perilaku yang mendapatkan nilai 3,63 adalah nilai terendah ketiga.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan serta Sarana dan Prasarana mendapatkan nilai tertinggi yaitu 4,00 dan selanjutnya Waktu Penyelesaian mendapatkan nilai yaitu 3,90.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/ kritik serta pengaduan yang masuk melalui link kuesioner pengisian SKM Online yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- Tetap dan terus ditingkatkan layanan SMHKP
- Pelayanan HC siap mutu on line terus ditingkatkan
- Aplikasi sistem layanan SMHKP tetap dan terus ditingkatkan fitur-fiturnya

Adapun kondisi permasalahan/ kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Layanan SMHKP masih perlu ditingkatkan untuk mendukung kualitas dan efektivitas pelayanan.
- Pelayanan HC Siap Mutu berbasis online masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam aspek kecepatan layanan, kemudahan penggunaan sistem, dan optimalisasi pelayanan digital kepada masyarakat.
- Fitur pada aplikasi layanan SMHKP masih perlu dikembangkan dan disempurnakan sesuai kebutuhan pengguna.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui monitoring dan evaluasi serta rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan pada bulan Juli sampai dengan September 2026. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek kurang dari 12 bulan. Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut :

No.	Prioritas Unsur	Program Kegiatan	Waktu (Triwulan II Tahun 2026)			Penanggung Jawab
			Juli	Agustus	September	
1.	Kompetensi Pelaksana	1. Rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan (kecepatan jaringan internet, kendala aplikasi OSS, aplikasi SIAPMUTU) 2. Melakukan refreshment pelatihan pelayanan publik bagi petugas pelayanan	√			Tim Pelayanan Publik
2.	Biaya dan Tarif	1. Membuat Infografis biaya/tarif Layanan sesuai dengan 2. Sosialisasi secara daring maupun luring kepada pengguna jasa terkait biaya/tarif pelayanan	√			Tim Pelayanan Publik
3.	Perilaku Pelaksana	1. Sosialisasi secara daring maupun luring kepada pengguna jasa terkait penggunaan aplikasi SIAPMUTU dan OSS	√			Tim Pelayanan Publik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		2. Melakukan asistensi penggunaan aplikasi SIAPMUTU dan OSS di ruang pelayanan				

4.3 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan dapat dilihat melalui grafik berikut :

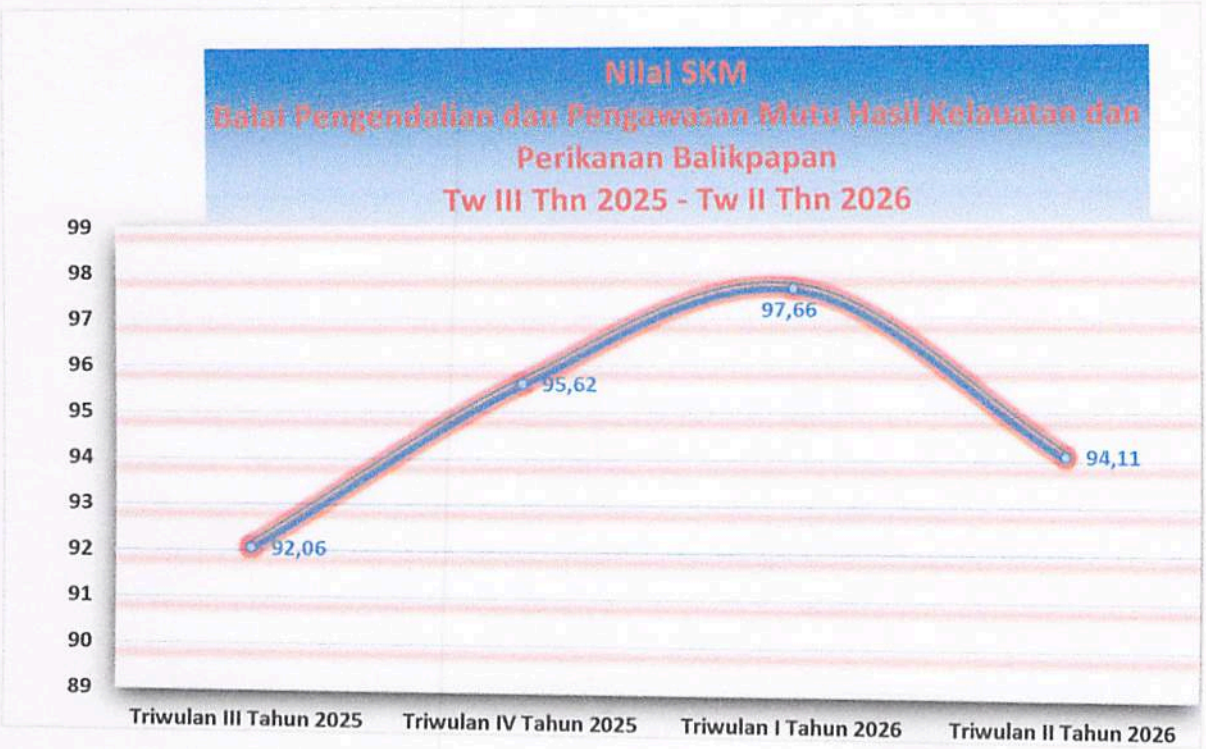

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan secara berkala, terlihat adanya dinamika tingkat kepuasan penerima layanan di Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan. Pada Triwulan III Tahun 2025, nilai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

indeks kepuasan masyarakat tercatat sebesar 92,06, kemudian mengalami peningkatan pada Triwulan IV Tahun 2025 menjadi 95,62 atau naik sebesar 3,56 poin. Selanjutnya, pada Triwulan I Tahun 2026 nilai indeks kembali meningkat menjadi 97,66, yang merupakan nilai tertinggi dalam periode pengukuran tersebut, dengan kenaikan sebesar 2,04 poin dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun demikian, pada Triwulan II Tahun 2026 nilai indeks kepuasan masyarakat mengalami penurunan menjadi 94,11 atau turun sebesar 3,55 poin dibandingkan Triwulan I Tahun 2026. Meskipun terjadi penurunan, nilai yang diperoleh masih berada pada kategori sangat baik, yang menunjukkan bahwa secara umum masyarakat tetap merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan.

Hasil ini menjadi bahan evaluasi bagi Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan untuk mempertahankan aspek pelayanan yang telah berjalan baik serta melakukan perbaikan pada aspek-aspek yang berpotensi memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode Triwulan II mulai April hingga Juni 2026, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keamanan Hasil Perikanan Balikpapan, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 94,11.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Kompetensi Pelaksana, Biaya dan Tarif dan Perilaku Pelaksana.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Penanganan, pengaduan, Saran dan Masukan serta Sarana dan Prasarana, dan unsur selanjutnya adalah Waktu Penyelesaian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN

1. Kuesioner Online

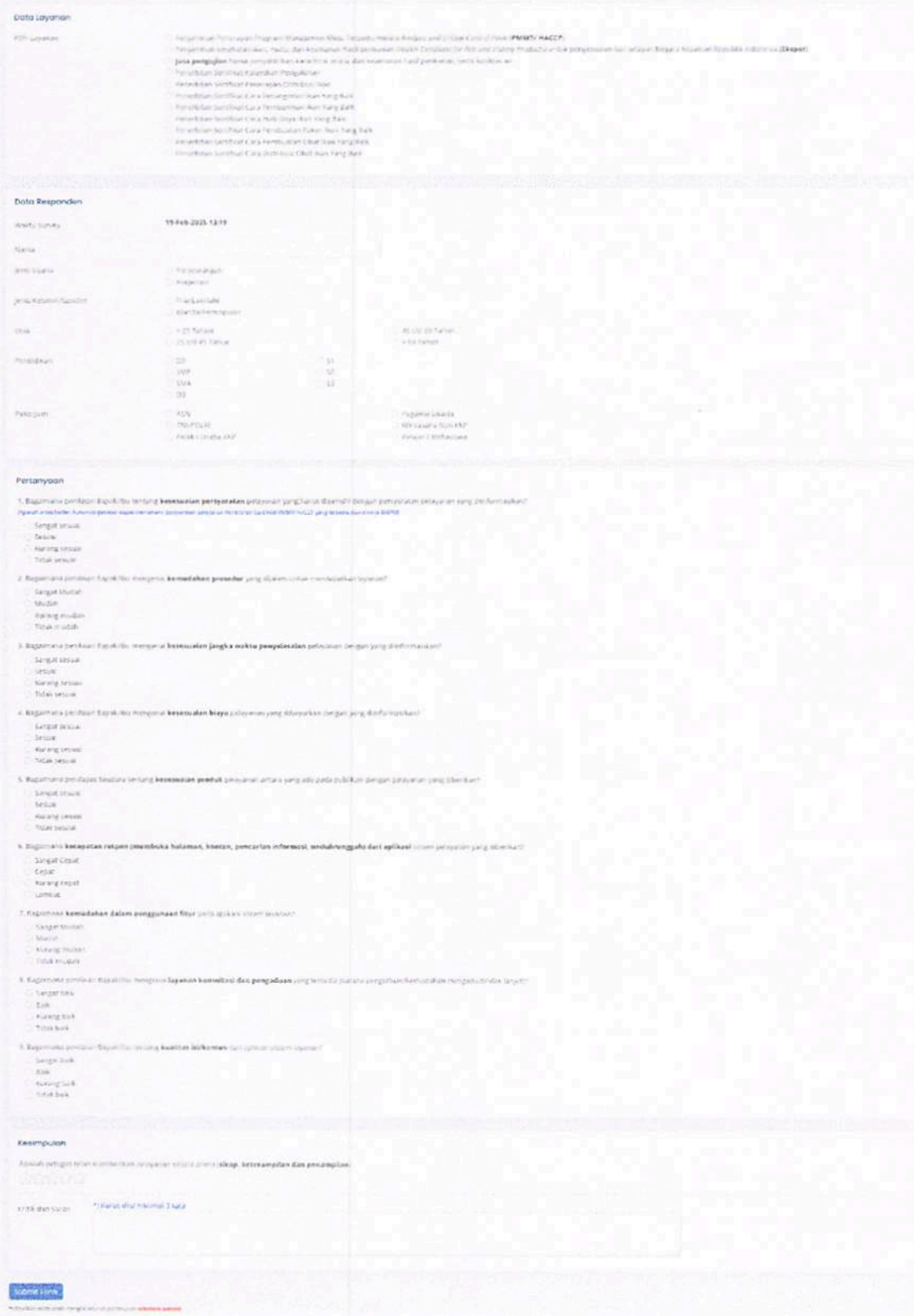

Data Layanan

Data Responden

Pertanyaan

Kesimpulan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Hasil Pengolahan Data SKM

TABEL PERHITUNGAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN
PERIODE TRIWULAN II 2026

NO	JENIS LAYANAN	JENIS KELAMIN	USIA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	NILAI UNSUR PELAYANAN U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	KRITIK DAN SARAN	NILAI PER JENIS LAYANAN	NRR PER JENIS LAYANAN
1	Laporan hasil uji mutu produk perikanan	L	46-60	SMA	wiraswasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Tingkatkan Lagi dan lanjutkan	100,00	
2	Laporan hasil uji mutu produk perikanan	L	46-60	SMA	pns	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sekali tetap berinovasi	100,00	
3	Laporan hasil uji mutu produk perikanan	L	25-45	SMA	wiraswasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Lanjutkan pelayanan terbaik	100,00	100,00
4	Laporan hasil uji mutu produk perikanan	L	46-60	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sekali Menjadi yang terbaik	100,00	
5	Laporan hasil uji mutu produk perikanan	L	25-45	S1	P.UKKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Tetap Sekali Lakukan yang terbaik	100,00	
6	Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB)	L	25-45	SMP	P.UKKP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan sudah sangat baik dan cepat	100,00	100,00
7	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	P	46-60	S1	swasta	3	3	4	3	3	3	3	4	4	Tetap dan terus ditingkatkan layanan penerbitan HC SMKHP	83,33	
8	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	P	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan Sangat Memuaskan	100,00	
9	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	L	25-45	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	PELAYANAN SANGAT MEMUASKAN	100,00	
10	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	P	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	PELAYANAN SANGAT MEMUASKAN	100,00	
11	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	P	46-60	S1	swasta	4	3	4	3	3	3	3	4	4	Tetap dan terus ditingkatkan aplikasi sistem layanan SMKHP	86,11	
12	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	P	46-60	S1	swasta	4	3	4	3	4	3	3	4	4	Tetap dan terus ditingkatkan aplikasi HC siap mutu	88,89	
13	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	P	46-60	S1	swasta	4	3	4	3	3	2	3	4	4	**Tetap dan terus ditingkatkan layanan SMKKP**	83,33	
14	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	P	46-60	S1	swasta	4	3	4	3	4	2	3	4	4	Tetap ditingkatkan aplikasi layanan SMKHP	86,11	
15	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	L	25-45	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	pelayanan tepat dan cepat	100,00	
16	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	P	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	PELAYANAN SANGAT MEMUASKAN	100,00	
17	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	P	46-60	S1	swasta	4	3	4	3	4	2	3	4	4	Tetap dan terus ditingkatkan pelayanan HCSiap Mutu	86,11	
18	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	P	46-60	S1	swasta	4	3	3	3	4	2	3	4	4	Tetap dan terus ditingkatkan	83,33	
19	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	L	25-45	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	proses penerbitan cepat	100,00	
20	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	P	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	PELAYANAN SANGAT MEMUASKAN	100,00	
21	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	P	46-60	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	pelayanan dapat terus pertahankan	100,00	
22	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	P	46-60	S1	swasta	3	3	3	3	4	3	3	4	4	Tetap ditingkatkan aplikasi untuk siap mutu	83,33	
23	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	L	25-45	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	PELAYANAN CEPAT SEKALI	100,00	
24	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	P	46-60	S1	swasta	3	3	4	3	3	3	3	4	4	Tetap ditingkatkan aplikasi layanan untuk siap mutuaya	83,33	93,29
25	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	P	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	PELAYANAN SANGAT MEMUASKAN	100,00	
26	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	L	<25	SMA	swasta	3	4	3	3	4	4	4	4	4	Pelayanan Sudahsangat baik	91,67	
27	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	P	46-60	S1	swasta	3	3	4	3	3	2	3	4	4	**Pelayanan HC siap mutu on line terus ditingkatkan**	80,56	
28	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	P	25-45	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	terus ditingkatkan ketepatan waktunya	100,00	
29	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	P	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	PELAYANAN SANGAT MEMUASAKAN	100,00	
30	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	P	25-45	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Pelayanan sangat memuaskan	100,00	
31	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	P	25-45	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	DIPERTAHANKAN KUALITAS TERBAIKNYA	100,00	
32	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	P	46-60	S1	swasta	3	3	4	3	3	2	3	4	4	Tetap dan terus ditingkatkan layanan cepatkip	80,56	
33	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	P	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	PELAYANAN SANGAT MEMUASKAN	100,00	
34	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	P	25-45	S1	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	pelayanan terus dipertahankan	100,00	
35	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	P	46-60	S1	swasta	4	3	4	3	4	3	3	4	4	Tetap dan terus ditingkatkan layanan terutama dalam penerbitan SMKHP	88,89	
36	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	P	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	PELAYANAN SANGAT MEMUASKAN	100,00	
37	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	P	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	PELAYANAN SANGAT MEMUASKAN	100,00	
38	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	P	46-60	S1	swasta	3	3	3	3	4	2	3	4	4	Tetap dan terus ditingkatkan layanan penerbitan SMKHP	80,56	
39	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	P	46-60	S1	swasta	3	3	4	3	4	3	3	4	4	**fitur-fiturnya**	86,11	
40	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	P	25-45	SMA	swasta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	PELAYANAN SANGAT MEMUASKAN	100,00	
41	Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP)	P	46-60	S1	swasta	3	3	4	3	4	3	3	4	4	Aplikasi sistem layanan SMKKP tetap dan terus ditingkatkan	86,11	
JUMLAH NILAI PER-UNSUR						155	149	160	148	158	142	149	164	164			
RATA-RATA PER-UNSUR						**	**	**	**	**	**	**	**	**			
NILAI INDEKS PER-UNSUR						**	**	**	**	**	**	**	**	**			
NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT						94,11									SANGAT BAIK		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	ARAKTERIST	INDIKATOR	JUMLAH	ERSENTAS
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	11	27%
		Perempuan	30	73%
2	Usia	Dibawah 25	1	2%
		25-45	21	51%
		46-60	19	46%
		>60	0	0%
3	Pendidikan	SD	0	0%
		SMP	1	2%
		SMA	16	39%
		D3	0	0%
		S1	24	59%
		S2	0	0%
		S3	0	0%
4	Pekerjaan	ASN	1	2%
		TNI/POLRI	0	0%
		Pelaku Usaha KKP	2	5%
		Pegawai Swasta	36	88%
		Wirausaha Non KKP	2	5%
		Pelajar/Mahasiswa	0	0%
5	Jenis Layanan	Uji Profisiensi bagi laboratorium pengujian penyakit ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan	0	0%
		Penyediaan koleksi standar/bahan acuan/kontrol positif	0	0%
		Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air	5	12%
		Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMTI HACCP)	0	0%
		Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (Health Certificate for Fish and Fishery Products) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (E	35	85%
		Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik	1	2%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik	0	0%
		Penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik	0	0%

NO	UNSUR PELAYANAN	AKTUAL MASYARAKAT		
		INDEKS KONVERSI	MUTU	KINERJA
U1	Persyaratan	94,51	A	Sangat Baik
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	90,85	A	Sangat Baik
U3	Waktu Penyelesaian	97,56	A	Sangat Baik
U4	Biaya/Tarif	90,24	A	Sangat Baik
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	96,34	A	Sangat Baik
U6	Kompetensi Pelayanan	86,59	B	Baik
U7	Perilaku Pelaksana	90,85	A	Sangat Baik
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan	100,00	A	Sangat Baik
U9	Sarana dan Prasarana	100,00	A	Sangat Baik

NO	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,0000 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,6000 - 3,0640	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,5320	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,0000	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM

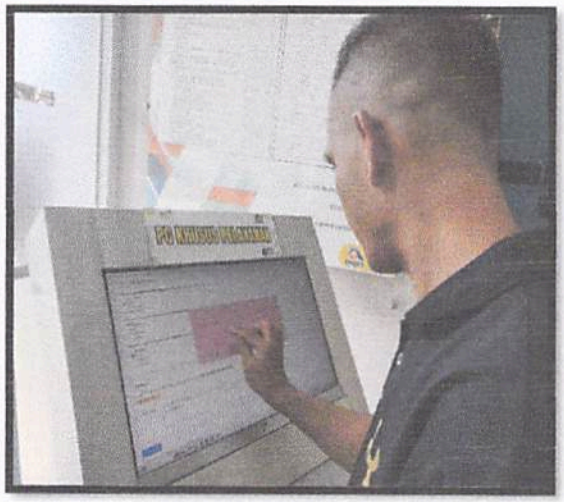

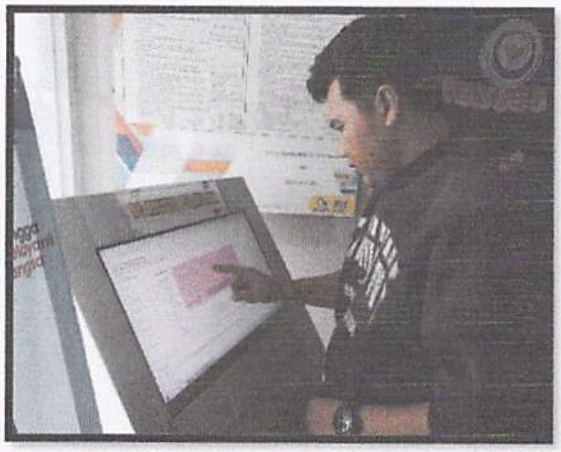

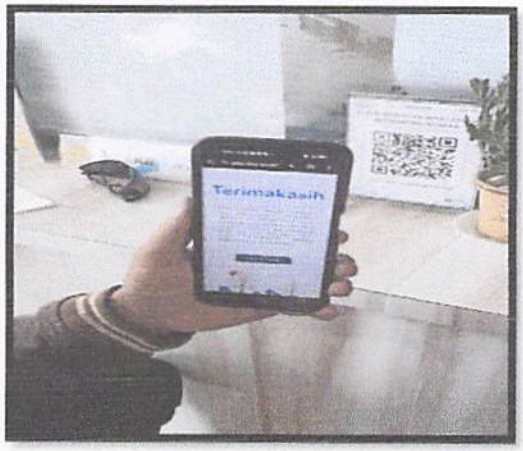

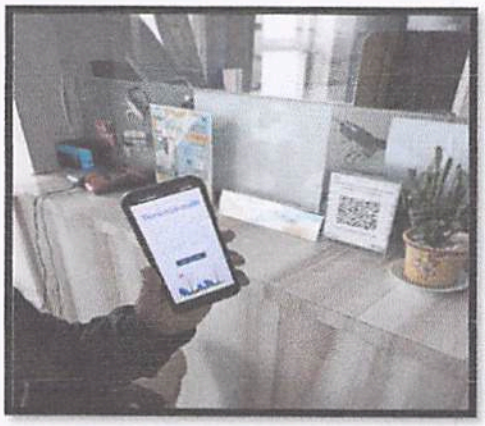

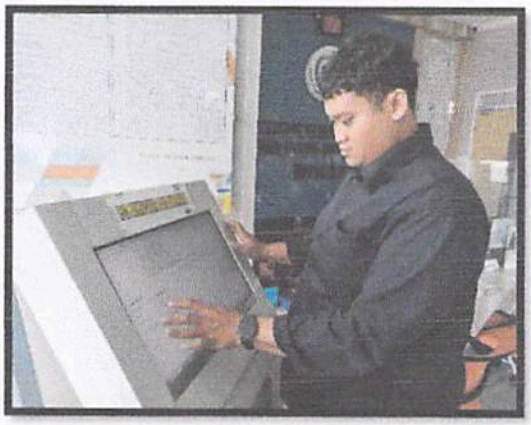

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BALIKPAPAN
JALAN KOLONEL SYARIFUDDIN YOES RT.094 NO.10 BALIKPAPAN 76115
TELEPON (0542) 7581284
LAMAN www.kkp.go.id SUREL bkipmbalikpapan@kkp.go.id

SURAT TUGAS
KEPALA BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BALIKPAPAN
NOMOR : B.12/BKIPM.BPN/KP.440/I/2026

TENTANG

PENUNJUKKAN TIM PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT/PELANGGAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN BALAI PPMHKP BALIKPAPAN TAHUN 2026

Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui kinerja pelayanan yang diberikan oleh Balai PPMHKP Balikpapan kepada masyarakat dalam hal pelanggan/pengguna jasa, perlu dilakukan penilaian atas pendapat pelanggan/pengguna jasa terhadap pelayanan melalui penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat;

b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi/pelaporan terhadap penyelenggaraan pelayanan;

c. bahwa untuk melakukan survei tersebut perlu dibentuk tim pengelola untuk melaksanakan tugas tersebut yang ditetapkan dalam Surat Tugas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan,

2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMBERI TUGAS

Menetapkan : Surat Tugas Kepala Balai PPMHKP Balikpapan Tentang Penunjukkan Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat/Pelanggan Terhadap Penyelenggaran Pelayanan Balai PPMHKP Balikpapan Tahun 2026.

PERTAMA : Menunjuk pegawai Balai PPMHKP Balikpapan yang namanya tercantum dibawah ini sebagai tim Kegiatan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat/Pelanggan terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Balai PPMHKP Balikpapan Tahun 2026 dengan susunan:

Pembina/Pengarah	:	Eko Sulystianto, S.Pi, M.Si
Ketua	:	Winda Anggraini, S.St.Pi
Penanggung Jawab	:	Drh. Frederica Ethis M
Sekretaris	:	Novita, S.St.Pi
Anggota	:	Heri Supriadi
		Frederik Sanda
		Zainal, S.Pi
		Moochamad Eko Y
		Nadia Rizki Oktaviani

KEDUA : Uraian Tugas Tim Pelaksanaan Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat/Pelanggan pada Balai PPMHKP Balikpapan sebagai berikut:

1. Pembinan/Pengarah : - Memberikan arahan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat agar dapat berjalan dengan baik.
2. Ketua : - Membantu Penanggungjawab dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat.
3. Penanggung Jawab : - Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan sistem yang ada.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Sekretaris : - Mengumpulkan dan mengarsipkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat.
- Melakukan kompilasi dan pengolahan data operasional dalam rangka penyusunan laporan Survei Kepuasan Masyarakat.
- Bertanggung jawab atas penyelesaian laporan Survei Kepuasan Masyarakat.

4. Anggota : - Membantu pelaksanaan dan penyusunan laporan Survei Kepuasan Masyarakat.
- Melaksanakan tugas lain yang dibebankan kepadanya oleh pengarah kegiatan maupun ketua.

KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Balai PPMHKP Balikpapan Tahun Anggaran 2026, Nomor: SP DIPA-032 13.2.567610/2026 Tanggal 1 Desember 2025.

KEEMPAT : Pelaksanaan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat/Pelanggan dilakukan empat kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret, Juni, September dan Desember 2026.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas tim bertanggung jawab kepada Kepala Balai PPMHKP Balikpapan.

KEENAM : Surat Tugas ini berlaku pada sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan serta perbaikan seperlunya dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Balikpapan, 2 Januari 2026
Kepala Balai PPMHKP Balikpapan,

Lembar Pengesahan	
Nama Jabatan	Paraf
Kasubbag Umum	

Eko Sulystianto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Periode Sebelumnya

Laporan Hasil Tindak Lanjut Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

Periode Triwulan I Tahun 2026

Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu

Hasil Kelautan dan Perikanan

2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam laporannya, World Bank menjelaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat dicapai jika ekspektasi dan kebutuhan dari pengguna layanan diakomodir dalam proses penyediaan pelayanan. Hal ini juga sejalan dengan salah satu asas dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tertulis dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu asas partisipatif. Asas partisipatif selanjutnya diatur dalam bab khusus Pengikutsertaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selanjutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai pembina pelayanan publik nasional telah merumuskan berbagai instrumen pengikutsertaan masyarakat dalam pelayanan publik untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instrumen tersebut adalah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Terdapat beberapa tujuan dari pelaksanaan SKM. Pertama, untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan. Kedua, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Terakhir, untuk mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Untuk mencapai berbagai tujuan tersebut, maka Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan perlu menyusun rencana tindak lanjut dan laporan hasil tindak lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

agar proses *continuous improvement* dalam proses layanan publik dapat dipastikan dan pada akhirnya terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB II

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan periode triwulan I tahun 2026 menunjukkan angka yang sangat baik nilai 97,66 (sembilah puluh tujuh koma enam puluh enam) dengan kualitas mutu A pada berbagai unsur pelayanan, seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Triwulan I Tahun 2026

No	Unsur	IKM	Mutu Layanan
1	Persyaratan	**3,89**	**A**
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	**3,88**	**A**
3	Waktu Penyelesaian	**3,95**	**A**
4	Biaya/Tarif	**3,86**	**A**
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	**3,91**	**A**
6	Kompetensi Pelaksana	**3,82**	**A**
7	Perilaku Pelaksana	**3,84**	**A**
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	**4,00**	**A**
9	Sarana dan Prasarana	**4,00**	**A**

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari 3 (tiga) unsur

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu (Triwulan IV 2025)			Penanggung Jawab
			April	Mei	Juni	
1.	U6 - Kompetensi Pelaksana	• Rapat internal petugas pelayanan dengan pembahasan (kecepatan jaringan internet, kendala aplikasi OSS, aplikasi SIAPMUTU dsb)	√			Tim Pelayanan Publik
		• Melakukan refreshment pelatihan bagi petugas pelayanan (Inspektur Mutu dan Petugas Administrasi)	√			
2.	U7 - Perilaku Pelaksana	• Sosialisasi secara daring maupun luring kepada pengguna jasa terkait penggunaan aplikasi SIAPMUTU dan OSS	√			Tim Pelayanan Publik
		• Melakukan asistensi penggunaan aplikasi SIAPMUTU dan OSS di ruang pelayanan	√			
3.	U5 – Biaya/ Tarif	• Membuat Infografis biaya/ tarif Layanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada	√			Tim Pelayanan Publik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		Kementerian Kelautan dan Perikanan • Sosialisasi secara daring maupun luring kepada pengguna jasa terkait biaya/tarif pelayanan	√			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB III
REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan / Hambatan
1.	**U6** **Kompetensi Pelaksana** Balai PPMHKP Balikpapan melaksanakan *morning briefing* sebelum dimulainya pelayanan setiap hari kerja yang diikuti oleh Inspektur Mutu dan Petugas Administrasi. Balai PPMHKP Balikpapan telah melaksanakan FGD Peninjauan Ulang Standar Pelayanan pada yang diikuti oleh petugas pelayanan, Inspektur Mutu, dan stakeholder terkait.	Sudah	*Morning briefing* dilaksanakan sebagai sarana koordinasi, penyampaian informasi terkini, evaluasi pelayanan hari sebelumnya, serta penguatan budaya pelayanan prima, serta kegiatan ini juga menjadi media untuk meningkatkan disiplin, komunikasi, dan kesiapan petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Pelaksanaan FGD dilakukan untuk meningkatkan pemahaman petugas terhadap standar pelayanan yang berlaku, menyamakan persepsi dalam pelaksanaan pelayanan, serta meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Laporan Kegiatan Terlampir)	 	Tidak ada hambatan saat pelaksanaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.	**U7 - Perilaku Pelaksana** Sosialisasi dan asistensi kepada pengguna layanan terkait penggunaan aplikasi SIAPMUTU dan OSS.	Sudah	Balai PPMHKP Balikpapan memberikan asistensi secara langsung kepada pengguna layanan di ruang pelayanan terkait penggunaan aplikasi SIAPMUTU dan OSS serta pemahaman standar pelayanan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengguna terhadap prosedur layanan dan penggunaan aplikasi, sehingga akses layanan menjadi lebih mudah serta proses pelayanan dapat berlangsung secar efektif dan tepat.	 	Tidak ada hambatan saat pelaksanaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3.	**U4** **Biaya dan Tarif** Balai PPMHKP Balikpapan meningkatkan publikasi informasi biaya/tarif layanan (PNBP) secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.	Sudah	Balai PPMHKP Balikpapan melakukan pembaruan dan penyebarluasan informasi tarif PNBP sesuai ketentuan yang berlaku melalui media informasi di ruang pelayanan, website, media sosial, serta media digital lainnya. Informasi disajikan dalam bentuk infografis yang mudah dipahami sehingga pengguna layanan dapat mengetahui besaran tarif dan dasar hukumnya secara jelas sebelum memperoleh layanan.	 	Tidak ada hambatan saat pelaksanaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil kelautan dan Perikanan Balikpapan telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100%.
2. Guna memastikan rencana tindak lanjut tetap terimplementasi, maka perlu disusun berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong diimplementasikannya rencana tindak lanjut antara lain :

No	RTL	Strategi Penyelesaian	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Stakeholder Terkait
1.	**U6 Kompetensi Pelaksana** Balai PPMHKP Balikpapan melaksanakan *morning briefing* sebelum dimulainya pelayanan setiap hari kerja yang diikuti oleh Inspektur Mutu dan Petugas Administrasi.	*Morning briefing* dilaksanakan sebagai sarana koordinasi, penyampaian informasi terkini, evaluasi pelayanan hari sebelumnya, serta penguatan budaya pelayanan prima, serta kegiatan ini juga menjadi media untuk meningkatkan disiplin, komunikasi, dan kesiapan petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	< 3 bulan	Tim pelayanan publik	---------
	Balai PPMHKP Balikpapan telah melaksanakan FGD Peninjauan Ulang Standar Pelayanan pada yang diikuti oleh petugas pelayanan, Inspektur Mutu, dan stakeholder terkait.	Pelaksanaan FGD dilakukan untuk meningkatkan pemahaman petugas terhadap standar pelayanan yang berlaku, menyamakan persepsi dalam pelaksanaan pelayanan, serta meningkatkan kompetensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Laporan Kegiatan Terlampir) Pelatihan *Microlearning Pelayanan Prima* bertujuan			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.	**U7 Perilaku Pelaksana** Sosialisasi dan asistensi kepada pengguna layanan terkait penggunaan aplikasi SIAPMUTU dan OSS.	Balai PPMHKP Balikpapan memberikan asistensi secara langsung kepada pengguna layanan di ruang pelayanan terkait penggunaan aplikasi SIAPMUTU dan OSS serta pemahaman standar pelayanan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengguna terhadap prosedur layanan dan penggunaan aplikasi, sehingga akses layanan menjadi lebih mudah serta proses pelayanan dapat berlangsung secar efektif dan tepat.	< 3 bulan	Tim pelayanan publik	---------
3.	**U4** **Biaya dan Tarif** Balai PPMHKP Balikpapan meningkatkan publikasi informasi biaya/tarif layanan (PNBP) secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.	Balai PPMHKP Balikpapan melakukan pembaruan dan penyebarluasan informasi tarif PNBP sesuai ketentuan yang berlaku melalui media informasi di ruang pelayanan, website, media sosial, serta media digital lainnya. Informasi disajikan dalam bentuk infografis yang mudah dipahami sehingga pengguna layanan dapat mengetahui besaran tarif dan dasar hukumnya secara jelas sebelum memperoleh layanan.	< 3 bulan	Tim pelayanan publik	---------

Balikpapan, 07 Juli 2026

Plh. Kepala Balai PPMHKP Balikpapan

Drh. Frederica Ethis M
NIP 19851028 200912 2 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAPORAN

FORUM KONSULTASI PUBLIK
PENINJAUAN ULANG STANDAR PELAYANAN

Balai PPMHKP Balikpapan
Tahun 2026

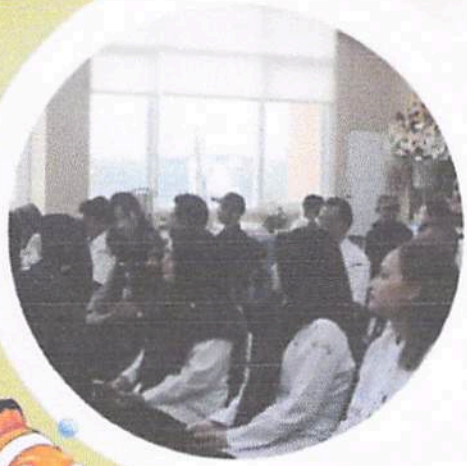

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BALIKPAPAN
2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi. Sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP), Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (PPMHKP) Balikpapan berkewajiban menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas, transparan, akuntabel, mudah diakses, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, menerapkan, dan melakukan evaluasi terhadap Standar Pelayanan sebagai tolok ukur penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa Standar Pelayanan yang telah ditetapkan wajib dilakukan peninjauan ulang secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, perubahan regulasi, perkembangan teknologi, serta kondisi organisasi penyelenggara pelayanan.

Pada tahun 2025, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 61 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik yang menggantikan ketentuan sebelumnya. Keputusan tersebut memuat penyesuaian terhadap jenis layanan, persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian, produk layanan, serta komponen standar pelayanan lainnya yang harus diterapkan oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPPMHKP.

Sebagai tindak lanjut atas perubahan regulasi tersebut, Balai PPMHKP Balikpapan perlu melakukan peninjauan ulang terhadap Standar Pelayanan yang berlaku guna memastikan kesesuaian antara standar pelayanan yang diterapkan dengan ketentuan terbaru dalam Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 61 Tahun 2025. Peninjauan ulang ini juga bertujuan untuk memperoleh masukan dari pengguna layanan, pemangku kepentingan, pelaku usaha, akademisi, instansi terkait, serta masyarakat sebagai bagian dari prinsip partisipatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Salah satu mekanisme yang digunakan dalam proses peninjauan ulang Standar Pelayanan adalah melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Forum ini menjadi sarana dialog dan komunikasi dua arah antara penyelenggara pelayanan dengan pengguna layanan guna memperoleh saran, masukan, tanggapan, dan rekomendasi terhadap substansi Standar Pelayanan yang akan diterapkan. Melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini diharapkan Standar Pelayanan Balai PPMHKP Balikpapan Tahun 2026 dapat lebih adaptif, responsif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan regulasi yang berlaku.

Oleh karena itu, Balai PPMHKP Balikpapan menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Peninjauan Ulang Standar Pelayanan Tahun 2026 dalam rangka Penyesuaian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 61 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan.

B. Tujuan

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Peninjauan Ulang Standar Pelayanan Balai PPMHKP Balikpapan Tahun 2026 bertujuan untuk :

1. Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 terkait kewajiban peninjauan ulang Standar Pelayanan.
2. Menyesuaikan Standar Pelayanan Balai PPMHKP Balikpapan dengan Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 61 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik.
3. Mengidentifikasi kesesuaian, efektivitas, dan implementasi Standar Pelayanan yang telah diterapkan.
4. Menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi dari pengguna layanan dan pemangku kepentingan terhadap Standar Pelayanan yang akan diterapkan.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan penyempurnaan kebijakan pelayanan publik.
6. Menjamin bahwa Standar Pelayanan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan dan perkembangan regulasi terkini.
7. Menetapkan rekomendasi hasil peninjauan ulang sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan Standar Pelayanan Balai PPMHKP Balikpapan.

C. Manfaat

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Balai PPMHKP Balikpapan

a. Memperoleh masukan yang objektif terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan.
b. Menjadi dasar dalam penyempurnaan dan penyesuaian Standar Pelayanan.
c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
d. Mendukung pemenuhan indikator penilaian pelayanan publik oleh Kementerian PANRB dan Ombudsman RI.
e. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Bagi Pengguna Layanan

a. Memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan saran terhadap pelayanan yang diterima.
b. Mendapatkan informasi mengenai perubahan dan penyesuaian Standar Pelayanan.
c. Mendorong terwujudnya pelayanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan berkualitas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Bagi Pemangku Kepentingan

a. Menjadi media komunikasi antara penyelenggara pelayanan dengan stakeholder.
b. Meningkatkan sinergi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sektor kelautan dan perikanan.
c. Mendukung terciptanya pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Forum Konsultasi Publik Peninjauan Ulang Standar Pelayanan Balai PPMHKP Balikpapan Tahun 2026 meliputi :

1. Substansi yang Dikonsultasikan

Kesesuaian Standar Pelayanan dengan Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 61 Tahun 2025, meliputi ;

a. Persyaratan pelayanan pada setiap jenis layanan.
b. Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan.
c. Jangka waktu penyelesaian pelayanan.
d. Biaya atau tarif pelayanan.
e. Produk pelayanan yang dihasilkan.
f. Sarana dan prasarana pelayanan.
g. Kompetensi pelaksana pelayanan.
h. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan.
i. Evaluasi terhadap implementasi standar pelayanan yang telah berjalan.

2. Peserta Forum Konsultasi Publik

Peserta Forum Konsultasi Publik terdiri atas :

a. Pengguna layanan Balai PPMHKP Balikpapan.
b. Pelaku usaha perikanan dan kelautan.
c. Eksportir hasil perikanan.
d. Instansi pemerintah terkait.
e. Unsur masyarakat lainnya yang berkepentingan.

3. Jenis Layanan yang Ditinjau Ulang

Peninjauan ulang dilakukan terhadap seluruh jenis layanan yang tercantum dalam Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 61 Tahun 2025 yang menjadi kewenangan Balai PPMHKP Balikpapan, baik pelayanan teknis maupun pelayanan administrasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Hasil yang Diharapkan

a. Tersusunnya rekomendasi hasil Forum Konsultasi Publik.
b. Tersusunnya berita acara kesepakatan hasil peninjauan ulang Standar Pelayanan.
c. Tersusunnya dokumen tindak lanjut perbaikan Standar Pelayanan.
d. Terwujudnya Standar Pelayanan Balai PPMHKP Balikpapan Tahun 2026 yang sesuai regulasi dan kebutuhan pengguna layanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Dasar Hukum

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Peninjauan Ulang Standar Pelayanan Balai PPMHKP Balikpapan Tahun 2026 didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur tugas dan fungsi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
6. Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik.
7. Program Kerja Balai PPMHKP Balikpapan Tahun 2026.

B. Maksud Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan sebagai sarana komunikasi dua arah antara penyelenggara pelayanan dengan pengguna layanan dalam rangka memperoleh masukan terhadap hasil peninjauan ulang Standar Pelayanan Balai PPMHKP Balikpapan yang disesuaikan dengan Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 61 Tahun 2025.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Forum Konsultasi Publik dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal	:	Senin/ 08 Juni 2026
Waktu	:	09.00 WITA – Selesai
Tempat	:	Aula Rapat Balai PPMHKP Balikpapan
Alamat	:	Jalan. Kol. Syarifuddin Yoes Rt.41 No.10 Balikpapan 76114
Tema	:	"Forum Konsultasi Publik Peninjauan Ulang Standar Pelayanan Balai PPMHKP Balikpapan Tahun 2026 dalam rangka Penyesuaian Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 61 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

D. Penyelenggara dan Peserta Kegiatan

Penyelenggara kegiatan FKP ini adalah Balai PPMHKP Balikpapan itu sendiri, dengan melibatkan unsur masyarakat yaitu :

1. Unsur Penyelenggara Layanan yaitu Balai PPMHKP Balikpapan
2. Unsur Pengguna Layanan yaitu Pengguna jasa SMHKP, CPIB KAPAL, CPIB, CBIB, SKP dan HACCP
3. Unsur stakeholder dari instansi terkait yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Kaltim, Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak, Penyuluh Perikanan Kota Balikpapan,

E. Narasumber

Narasumber dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik terdiri atas :

1. Kepala Balai PPMHKP Balikpapan.
2. Tim Penyusun dan Peninjauan Ulang Standar Pelayanan.

F. Susunan Acara

Waktu	Kegiatan
08.00 – 08.30	Registrasi Peserta
08.30 – 08.40	Pembukaan
08.40 – 08.50	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
08.50 – 09.00	Doa
09.00 – 09.20	Sambutan Kepala Balai PPMHKP Balikpapan
09.20 – 10.00	Paparan Hasil Peninjauan Ulang Standar Pelayanan
10.00 – 11.30	Diskusi dan Penyampaian Masukan Stakeholder
11.30 – 12.00	Penyusunan dan Penyampaian Rekomendasi
12.00 – 12.15	Penutupan

G. Metode Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan melalui :

1. Paparan materi terkait perubahan Standar Pelayanan.
2. Penyampaian hasil komparasi standar pelayanan lama dan standar pelayanan baru.
3. Diskusi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Penyampaian saran dan masukan dari stakeholder.
5. Penyusunan rekomendasi hasil konsultasi publik.
6. Penandatanganan berita acara hasil kesepakatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Forum Konsultasi Publik

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan sebagai bagian dari proses peninjauan ulang Standar Pelayanan Balai PPMHKP Balikpapan Tahun 2026. Kegiatan berlangsung secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang secara langsung menggunakan layanan Balai PPMHKP Balikpapan. Berdasarkan hasil pemaparan dan diskusi, peserta pada prinsipnya mendukung penyesuaian Standar Pelayanan yang mengacu pada Keputusan Kepala BPPMHKP Nomor 61 Tahun 2025.

Hasil dari kegiatan peninjauan ulang adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian standar pelayanan berdasarkan Kepkaban Nomor 61 Tahun 2025
2. Penyusunan matriks komparasi perubahan standar pelayanan.
3. Masukan dan tanggapan stakeholder dan penyusunan rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut.
4. Pembaruan media informasi pelayanan.
5. Penguatan sarana pelayanan bagi kelompok rentan.
6. Pembaruan mekanisme pengaduan masyarakat.
7. Sosialisasi standar pelayanan kepada pengguna layanan.

B. Hasil Peninjauan Ulang Standar Pelayanan

Secara umum hasil peninjauan ulang menunjukkan bahwa standar pelayanan masih relevan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan. Terdapat penyesuaian nomenklatur dan jenis layanan sesuai KepKaban Nomor 61 Tahun 2025. Informasi pelayanan perlu lebih diperluas melalui media digital, serta monitoring dan evaluasi pelayanan perlu dilakukan secara berkala. Berikut hasil peninjauan ulang, diperoleh beberapa masukan sebagai berikut :

1. Permasalahan
   - perubahan regulasi yang mengharuskan penyesuaian terhadap nomenklatur, nama layanan, produk layanan, serta klasifikasi layanan agar lebih jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
   - secara umum standar pelayanan yang berlaku masih relevan dan dapat digunakan sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan dengan beberapa penyesuaian dan penyempurnaan.
   - terdapat pengguna layanan yang belum memahami secara optimal persyaratan pelayanan, alur layanan elektronik, serta waktu penyelesaian layanan
   - Informasi mengenai persyaratan dan prosedur pelayanan dinilai perlu disampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana, mudah dipahami, dan dipublikasikan secara lebih luas melalui website serta media sosial resmi
   - Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan, peserta mengusulkan penerapan pelayanan yang inklusif serta peningkatan aksesibilitas bagi kelompok rentan, sehingga seluruh pengguna layanan dapat memperoleh

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

pelayanan publik yang mudah dijangkau, ramah, dan tanpa diskriminasi dan lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan.

- perlunya peningkatan kompetensi teknis serta kemampuan komunikasi petugas pelayanan guna mendukung pelayanan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan
- pemanfaatan kanal pengaduan online oleh masyarakat.

2. Tindak Lanjut dan Rekomendasi
   - Melakukan penyesuaian standar pelayanan terhadap perubahan regulasi yang berlaku, termasuk pembaruan nomenklatur, nama layanan, produk layanan, serta klasifikasi layanan agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memudahkan pemahaman pengguna layanan.
   - Mempertahankan standar pelayanan yang saat ini masih relevan sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik, dengan melakukan penyempurnaan pada komponen-komponen tertentu sesuai kebutuhan dan perkembangan kebijakan pelayanan.
   - Meningkatkan sosialisasi kepada pengguna layanan mengenai persyaratan pelayanan, alur layanan elektronik, dan jangka waktu penyelesaian layanan melalui berbagai media komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
   - Menyederhanakan penyajian informasi pelayanan dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami serta memperluas publikasi informasi melalui website resmi, media sosial, media informasi digital, dan sarana informasi lainnya guna meningkatkan keterbukaan informasi pelayanan publik.
   - Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan secara bertahap sesuai kemampuan organisasi, serta mengembangkan pelayanan yang inklusif melalui penyediaan fasilitas yang mendukung aksesibilitas kelompok rentan dan penyandang disabilitas sehingga pelayanan dapat diakses secara mudah, setara, dan tanpa diskriminasi.
   - Meningkatkan kompetensi teknis dan kemampuan komunikasi petugas pelayanan melalui pelatihan, bimbingan teknis, coaching, dan kegiatan pengembangan kapasitas lainnya guna mewujudkan pelayanan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.
   - Mengoptimalkan pengelolaan pengaduan masyarakat dengan meningkatkan sosialisasi dan pemanfaatan kanal pengaduan online, memperluas akses informasi pengaduan, serta memastikan setiap pengaduan ditindaklanjuti secara cepat, transparan, dan akuntabel.
   - Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap implementasi standar pelayanan sebagai upaya perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

- Forum Konsultasi Publik telah terlaksana dengan baik dan mendapatkan partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan.
- Peninjauan ulang standar pelayanan Balai PPMHKP Balikpapan Tahun 2026 telah dilaksanakan dengan membandingkan Kepkaban Nomor 45 Tahun 2024 dan Kepkaban Nomor 61 Tahun 2025. Berdasarkan hasil peninjauan ulang, terdapat perubahan substansi yang memerlukan penyesuaian standar pelayanan sehingga direkomendasikan untuk mengadopsi ketentuan dalam Kepkaban Nomor 61 Tahun 2025 sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan publik di Balai PPMHKP Balikpapan.
- Peserta pada prinsipnya menyetujui standar pelayanan yang telah diterapkan dengan beberapa rekomendasi perbaikan.
- Masukan yang diperoleh akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan Standar Pelayanan BPPMHKP Balikpapan.
- Hasil Forum Konsultasi Publik akan ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.

B. Penutup

Demikian laporan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Balikpapan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan bahan tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel Komparasi Kepkaban 45 Tahun 2024 dan Kepkaban 61 Tahun 2025

No	Aspek Standar Pelayanan	Kondisi Kepkaban 45 Tahun 2024	Kondisi Kepkaban 61 Tahun 2025	Gap/Kesenjangan yang Ditemukan	Tindak Lanjut Balai PPMHKP Balikpapan
1	Nomenklatur Layanan	Menggunakan nomenklatur layanan lama.	Disesuaikan dengan nomenklatur layanan terbaru KKP.	Dokumen standar pelayanan UPT masih menggunakan nomenklatur lama pada beberapa layanan.	Melakukan reviu dan penyesuaian nomenklatur seluruh layanan sesuai Kepkaban Nomor 61 Tahun 2025.
2	Nama Layanan	Nama layanan masih mengikuti struktur tahun 2024.	Nama layanan disesuaikan dengan kebijakan nasional pelayanan publik KKP.	Terdapat ketidaksesuaian nama layanan pada media informasi dan dokumen pelayanan.	Memperbarui nama layanan pada standar pelayanan, website, maklumat pelayanan, brosur, dan media informasi lainnya.
3	Produk Layanan	Produk layanan masih menggunakan klasifikasi lama.	Produk layanan telah diselaraskan dengan regulasi terbaru.	Sebagian produk layanan belum terpetakan sesuai nomenklatur baru.	Menyesuaikan produk layanan pada standar pelayanan dan aplikasi pelayanan.
4	Klasifikasi Layanan	Pengelompokan layanan belum sepenuhnya terstruktur.	Klasifikasi layanan lebih jelas dan sistematis.	Masih terdapat layanan yang belum dikelompokkan secara tepat.	Menyusun klasifikasi layanan berdasarkan kategori layanan administrasi, jasa, dan layanan teknis.
5	Persyaratan Pelayanan	Informasi persyaratan tersedia namun masih bersifat teknis.	Menekankan kemudahan pemahaman bagi pengguna layanan.	Sebagian pengguna layanan masih mengalami kesulitan memahami persyaratan layanan.	Menyederhanakan bahasa persyaratan dan menyediakan infografis pelayanan.
6	Informasi Pelayanan Digital	Informasi pelayanan tersedia	Mendorong digitalisasi informasi	Belum seluruh informasi pelayanan tersedia secara optimal pada kanal digital.	Mengoptimalkan website, media sosial, QR Code layanan, dan sistem informasi pelayanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Aspek Standar Pelayanan	Kondisi Kepkaban 45 Tahun 2024	Kondisi Kepkaban 61 Tahun 2025	Gap/Kesenjangan yang Ditemukan	Tindak Lanjut Balai PPMHKP Balikpapan
		melalui beberapa media.	pelayanan yang lebih luas.		
7	Sarana dan Prasarana Pelayanan	Sarana pelayanan tersedia sesuai standar minimum.	Menekankan peningkatan kualitas fasilitas pelayanan.	Fasilitas ruang tunggu dan media informasi masih perlu ditingkatkan.	Melakukan peningkatan kenyamanan ruang tunggu dan pembaruan media informasi pelayanan.
8	Pelayanan Disabilitas	Diatur secara umum.	Menekankan aksesibilitas dan pelayanan inklusif.	Sarana pendukung penyandang disabilitas belum sepenuhnya optimal.	Menambah fasilitas aksesibilitas dan memastikan kemudahan layanan bagi penyandang disabilitas.
9	Pelayanan Kelompok Rentan	Belum menjadi fokus utama.	Menjadi salah satu aspek penting pelayanan publik.	Belum tersedia mekanisme pelayanan khusus yang terdokumentasi dengan baik.	Menyusun SOP pelayanan kelompok rentan dan memastikan implementasinya.
10	Pengarusutamaan Gender (PUG)	Belum menjadi indikator utama pelayanan.	Menjadi salah satu indikator pelayanan publik.	Belum terdapat indikator PUG dalam evaluasi pelayanan.	Mengintegrasikan indikator PUG dalam pelaksanaan dan evaluasi pelayanan.
11	Kompetensi Pelaksana Pelayanan	Mengacu pada kompetensi jabatan yang berlaku.	Menekankan peningkatan kompetensi teknis dan pelayanan prima.	Masih diperlukan peningkatan kompetensi teknis dan kemampuan komunikasi petugas layanan.	Menyelenggarakan pelatihan pelayanan prima, komunikasi publik, dan kompetensi teknis.
12	Pengelolaan Pengaduan	Kanal pengaduan telah tersedia.	Menekankan kemudahan akses dan responsivitas pengaduan.	Pemanfaatan kanal pengaduan online masih rendah.	Meningkatkan sosialisasi kanal pengaduan dan menyederhanakan akses pengaduan digital.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Aspek Standar Pelayanan	Kondisi Kepkaban 45 Tahun 2024	Kondisi Kepkaban 61 Tahun 2025	Gap/Kesenjangan yang Ditemukan	Tindak Lanjut Balai PPMHKP Balikpapan
13	Survei Kepuasan Masyarakat	Evaluasi kepuasan telah dilaksanakan.	Mendorong evaluasi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.	Belum seluruh layanan memiliki data evaluasi kepuasan yang memadai.	Memperluas cakupan survei dan analisis umpan balik pengguna layanan.
14	Indikator Pelayanan Publik	Berorientasi pada pemenuhan standar pelayanan.	Menekankan indikator kinerja pelayanan yang lebih terukur.	Indikator pelayanan publik masih perlu diperkuat.	Menyusun indikator kinerja pelayanan yang lebih spesifik dan terukur.
15	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan	Monitoring dilakukan secara periodik.	Menekankan monitoring berbasis kinerja dan hasil evaluasi.	Belum seluruh hasil evaluasi terdokumentasi sebagai dasar perbaikan layanan.	Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi berkala yang terdokumentasi dan terintegrasi.
16	Transparansi Informasi Pelayanan	Informasi pelayanan telah tersedia.	Menekankan transparansi dan keterbukaan informasi publik.	Sebagian informasi belum tersampaikan secara merata kepada seluruh pengguna layanan.	Memperkuat publikasi standar pelayanan dan informasi layanan melalui berbagai media.
17	Standar Pelayanan Secara Keseluruhan	Masih relevan sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan.	Disempurnakan untuk menyesuaikan perkembangan regulasi dan kebutuhan masyarakat.	Diperlukan penyesuaian terhadap beberapa komponen standar pelayanan.	Melakukan revisi standar pelayanan dan menetapkannya sesuai Kepkaban Nomor 61 Tahun 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : **Senin / 08 Juni 2026**

KEGIATAN : **Forum Konsultasi Publik peninjauan Ulang Standar Pelayanan**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI/ PERUSAHAAN	TANDA TANGAN
1	Ardiansah	Balai PK Pontianak	
2	Hetty Prayanti E	Balai PK PNK	
3	Zakaj Abdul Fadhil	Balai PK PNK	
4	Faisal Noor	BP3 Banjarmasin	
5.	Atikah M.	LPRL Serang	
6	Ulis Dharmawan	Lab DRL Serang	
7.	A.S-ATHRON	UPTD PP MB	
8.	Suhermanto	BPPMHKP BPN	
9	[illegible]	"	
10	Santi	CV TUGA A	
11.	CV. 3M	CV. 3M	
12	Kadsm		
13	Eko.	BPPMHKP	
14	Nadi	BPPMHKP	
15	Erwin Nour F	— " —	
16	~~FAJAR SAGUS~~	BBKHIT KALTIM	
17	Yusir	— " —	
18	Frizkon. Patah	Bppmhkp Balikpapan	
19	Fabry Prian J	Bppmhkp Bpn	
20	Danakurniawan	— " —	
21	Adhiwira N	Bppmhkp Bpn	
22	Arman	— " —	
23	Yans K.	BPPMHKP.	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : **Senin / 08 Juni 2026**

KEGIATAN : **Forum Konsultasi Publik peninjauan Ulang Standar Pelayanan**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI/ PERUSAHAAN	TANDA TANGAN
1.	SAB LESTARUM	TAMU	
2	Taufik	PT. SKA	
3	Ardiansah	Balai PK Pontianak	
4.	Hetty Priyanti E.	Balai PK Pontianak	
5	Faisal Noor	Bpg Banyuwangi	
6	Zaky Abdul Fathir	Balai PK PNK	
7.	Atikah	LPPL Serang	
8.	Uto Dhermawan	Ldr PPL Serang	
9	A. STAHRON	UPTD PP MB	
10	Suherman	BPPMKP Bpn	
11	Ahmad.	"	
12.	Sumaryono	CV. 3A	
13	Santi	CV 3A	
14	Kadrm		
15	EKO J	BPPMKP	
16	Nurdin Anakodar	BPPMKP	
17	Erwin N.F	— " —	
18	FAJAR DAGUS	DINKIT KALTIM	
19	Yaser	— " —	
20	Forizka. Patel	Bppmkp. Balikpapan	
21	Febry Briana	Bppmkp bpn	
22	Dana Kurniawan	—	
23	Arman	—	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NOTULENSI

FORUM KONSULTASI PUBLIK PENINJAUAN ULANG STANDAR PELAYANAN

BALAI PENEGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BALIKPAPAN

Waktu Pelaksanaan	:	Senin, 08 Juni 2026
Tempat	:	Aula Balai PPMHKP Balikpapan
Pimpinan Rapat	:	Eko Sulystianto
Notulen	:	Novita, S.St.Pi
Agenda	:	Peninjauan Ulang Standar Pelayanan berdasarkan Kepkaban Nomor 45 Tahun 2024 dan Kepkaban Nomor 61 Tahun 2025

Hasil Pembahasan :

1. Terdapat perubahan regulasi dan standar pelayanan yang telah berlaku tetap dilaksanakan dengan beberapa penyempurnaan.
2. Terdapat penyesuaian nomenklatur dan produk layanan dan penyempurnaan meliputi persyaratan pelayanan, jangka waktu pelayanan, dan mekanisme pelayanan berbasis elektronik.
3. Terdapat penguatan aspek pelayanan inklusif dan kelompok rentan.
4. Standar Pelayanan Balai PPMHKP Balikpapan perlu disesuaikan dengan Kepkaban Nomor 61 Tahun 2025.
5. Pembaruan mekanisme pengaduan masyarakat.
6. Sosialisasi Standar Pelayanan kepada pengguna layanan.

Mengetahui,
Kepala Balai,

Eko Sulystianto
NIP. 19[illegible]2111997031003

Balikpapan, 08 Juni 2026
Notulensi,

Novita, S.St.Pi
Nip. 197911222006042011

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BERITA ACARA PENINJAUAN ULANG STANDAR PELAYANAN

BALAI PENEGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BALIKPAPAN

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Balai PPMHKP Balikpapan telah dilaksanakan Peninjauan Ulang Standar Pelayanan dengan agenda membahas kesesuaian Standar Pelayanan yang mengacu pada Kepkaban Nomor 45 Tahun 2024 terhadap Kepkaban Nomor 61 Tahun 2025.

Forum dihadiri oleh unsur penyelenggara pelayanan dan pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil pembahasan, seluruh peserta menyepakati bahwa Standar Pelayanan Balai PPMHKP Balikpapan dapat ditetapkan dengan beberapa rekomendasi perbaikan sebagaimana Berdasarkan hasil pembahasan disepakati :

1. Terdapat perubahan regulasi dan standar pelayanan yang telah berlaku tetap dilaksanakan dengan beberapa penyempurnaan.
2. Terdapat penyesuaian nomenklatur dan produk layanan dan penyempurnaan meliputi persyaratan pelayanan, jangka waktu pelayanan, dan mekanisme pelayanan berbasis elektronik.
3. Terdapat penguatan aspek pelayanan inklusif dan kelompok rentan.
4. Standar Pelayanan Balai PPMHKP Balikpapan perlu disesuaikan dengan Kepkaban Nomor 61 Tahun 2025.
5. Pembaruan mekanisme pengaduan masyarakat.
6. Sosialisasi Standar Pelayanan kepada pengguna layanan.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai bukti pelaksanaan tindak lanjut hasil peninjauan ulang standar pelayanan.

Balikpapan, 08 Juni 2026

Kepala Balai,

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BALIKPAPAN

Eko Sulystianto
NIP. 197002111997031003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PESERTA FORUM KONSULTASI PUBLIK PENINJAUAN ULANG STANDAR PELAYANAN
BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALIKPAPAN 2026

NO.	NAMA	UNSUR PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1	Tayfo Ismak	PT. SPA	
2	Ardiansah	Balai PK Pontianak	
3.	Hetty Priyanti E	Balai PF STC	
4	Zaky Abdul Fadhil	Balai PK PNK	
5	Faisal Nur	BPS Banjarmasin	
6.	Atikah M.	LPPL Serang	
7.	Uto Dharmawan	Lab PPL Serang	
8.	A. SYAHRON	UPTD PP MB	
9.	Suherman	BPPMHKP BPN	
10	Anni.	"	
11	Santi	CV TIGA A	
12.	Sumanyano	CV. 3A	
13	Kadrin		
14	EKO	BPPMHKP	
15	Nadus Auladdin	BPPMHKP	
16	Erwin N.F	— " —	
17	FAJAR DAGUS	BBKHIT MATIM	
18	Yasir	— " —	
19	Frizlan. Pateh	Bppmhkp Balikpapan	
20	Febry Diana J	BPPMHKP Balikpapan	
21	Dana Kurniawan	— " —	
22	Hikmiwira N	BPPMHKP BPP	
23	Arman	— " —	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PESERTA FORUM KONSULTASI PUBLIK PENINJAUAN ULANG STANDAR PELAYANAN BALAI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BALIKPAPAN 2026

NO.	NAMA	UNSUR PERWAKILAN	TANDA TANGAN
	Ayus. R.	BPPMHKP.	
	Akil	BPPMHKP	
	Rudi Y	PPL	
	Suranto	BPPMHKP Bpp	
	Ayu Sabrina	BPPMHKP Bpp	
	Arlani	BKI	
	Faris	PPL	
	Emay	Bríankin	
	Irpan	PPL	
	Poerwan		
	Akbar	PPL	
	Hanafi	BPPMHKP	
	WINARTI BIGA	BPPMHKP	
	ASMAN A	BIBKHIT KALTIM	
	Raflina H	BPPMHKP Bpn	
	Suhermin		
	Bainal	BPPMHKP Balikpapan	
	Salmah	Balai PPMHKP Balikpapan	
	Engah	BPPMHKP	
	Siti Hadiyas	BPPMHKP Balikpapan	
	Tika Wahyu P	BPPMHKP Bpp	
	Ubin Mahfud a.	BPPMHKP Bpp	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DOKUMENTASI KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

PENINJAUAN ULANG STANDAR PELAYANAN BALAI PPMHKP BALIKPAPAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara